



**SPEKIAL HARI BUMI 2026**

**FAKTA  
EKOLOGI**

PROTECT  
OUR

# **MERAWAT BUMI, MENJAGA KEHIDUPAN**

**KUMPULAN TULISAN PESERTA SEKOLAH PEREMPUAN  
DAN EKOLOGI WALHI SULAWESI SELATAN**

**EDISI APRIL 2026**



# FAKTA EKOLOGI

**Edisi April 2026**

## **Tim Penulis**

### **Alumni Sekolah Perempuan dan Ekologi WALHI Sulawesi Selatan:**

Agnesh Br. Lingga, Suci Rahmawati, Erma Suryani Ibrahim, Yusni Reski, Ilda Cita Suci, Nur Fatih Khanifah, Dita Angelia, Sukaedah Dewi Mayumi, Wa Ode Indah Febriana, Mariam Lanmay, Novita Sari, Nurfauziah, Rara Yangsen, Nur Herliati Hidayah Herman, Aprianti Angelina, Asrisnawanti, Aisyah Sahabuddin, Nurwahyuni Muslimin, Winona Lutfiah, Hikmawaty Sabar, Aini Syahrunnisa, Musnika Muharani Albantani, dan Nunky Aulya Syakiroh.

## **Layouter**

Fitrah Yusri

## **Editor**

Slamet Riadi

## **Diterbitkan oleh**

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan  
Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) Sulawesi Selatan  
Both ENDS

Jalan Aroepala, Kompleks Permata Hijau Lestari, Blok Q1 No.8, Makassar Indonesia

+628229 393 9591

+62411 467 1368

[walhisulsel@gmail.com](mailto:walhisulsel@gmail.com)

[www.walhisulsel.or.id](http://www.walhisulsel.or.id)

**22 April 2026**

**Selamat Hari Bumi untuk Kita Semua**

---

## Merawat Bumi, Menjaga Kehidupan

### *Ekofeminisme dan Pengalaman Perempuan dalam Krisis Ekologi*

Krisis ekologi global yang ditandai oleh perubahan iklim, degradasi lingkungan, konflik sumber daya alam, dan krisis pangan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis atau kegagalan tata kelola lingkungan. Ia merupakan krisis struktural yang berakar pada relasi kuasa historis antara manusia dan alam, antara negara dan warga, serta antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, perempuan khususnya perempuan adat, pesisir, dan komunitas lokal, sering berada pada posisi yang paling rentan terhadap dampak krisis, sekaligus menjadi aktor utama dalam kerja-kerja perawatan kehidupan.

Buku Merawat Bumi, Menjaga Kehidupan memposisikan ekofeminisme sebagai kerangka analisis utama untuk membaca keterkaitan antara krisis ekologis dan ketidakadilan gender. Mengacu pada pemikiran ekofeminis seperti Vandana Shiva, Maria Mies, Bina Agarwal, serta pendekatan ekologi politik feminis (feminist political ecology), buku ini menolak pandangan yang memisahkan eksploitasi alam dari penindasan terhadap perempuan. Sebaliknya, buku ini menegaskan bahwa keduanya beroperasi dalam sistem patriarki-kapitalistik yang sama, yang memproduksi ketimpangan ekologis, sosial, dan gender secara simultan.

---

## PART I: Eksploitasi Alam, Membaca Krisis Ekologi dalam Perspektif Ekofeminisme

Bagian pertama buku ini berfungsi sebagai landasan teoritik dan kritis dengan menguraikan bagaimana kekerasan struktural bekerja melalui kebijakan pembangunan, ekonomi ekstraktif, dan pengetahuan dominan tentang alam. Dalam perspektif ekofeminisme material dan politik, alam dan perempuan sama-sama diposisikan sebagai entitas yang dapat dikontrol, dieksploitasi, dan direproduksi demi akumulasi kapital dan kepentingan negara.

Tulisan-tulisan dalam bagian ini mengkritisi paradigma pembangunan modern, termasuk revolusi hijau, industrialisasi pertanian, dan wacana transisi energi yang kerap dibingkai sebagai solusi ekologis, namun pada praktiknya justru memperdalam ketimpangan gender dan perampasan sumber daya. Perempuan sering kali menanggung beban ekologis yang tidak proporsional melalui kerja reproduktif, pengelolaan pangan, air, dan kesehatan keluarga, tanpa pengakuan sebagai subjek politik. Bagian ini menegaskan bahwa krisis lingkungan adalah krisis keadilan, dan bahwa keadilan ekologis tidak mungkin tercapai tanpa transformasi relasi gender.

---

## PART II: Suara Perempuan dari Berbagai Wilayah: Kisah tentang Pengetahuan Lokal, dan Perlawanan Ekologis

Bagian kedua menggeser fokus dari struktur ke wilayah sebagai ruang hidup konkret tempat relasi kuasa ekologis dijalankan dan dipertentangkan. Dalam tradisi ekologi politik feminis, wilayah dipahami bukan hanya sebagai ruang fisik, tetapi sebagai ruang sosial, kultural, dan historis yang dibentuk oleh relasi gender, kelas, dan kekuasaan.

Kisah-kisah dalam bagian ini memperlihatkan bagaimana perempuan di berbagai wilayah seperti tanah adat, pesisir, komunitas agraris, dan ruang budaya menjalankan praktik penjagaan kehidupan (care and life sustaining practices) melalui pengetahuan lokal, kerja perawatan, serta strategi perlawanan terhadap ekstraktivisme dan perampasan ruang. Perempuan tidak diposisikan sebagai “korban pasif” krisis ekologi, melainkan sebagai produsen pengetahuan ekologis dan aktor politik yang menegosiasikan ruang hidupnya di tengah dominasi negara dan pasar.

---

## PART III: Menuju Keadilan Ekologis untuk Keberlangsungan Bumi

Bagian ketiga buku ini menawarkan refleksi ke depan dengan menempatkan perempuan sebagai aktor kunci dalam membayangkan dan membangun masa depan ekologis yang adil. Berangkat dari kritik ekofeminisme terhadap pendekatan teknokratis dalam agenda pembangunan berkelanjutan, bagian ini menegaskan bahwa solusi atas krisis lingkungan tidak cukup bertumpu pada inovasi teknologi atau kebijakan hijau yang netral gender.

Tulisan-tulisan dalam bagian ini menunjukkan bahwa tanpa perubahan relasi kuasa, agenda transisi energi dan pembangunan hijau berisiko mereproduksi bentuk baru dari kolonialisme ekologis dan ketimpangan gender. Ekofeminisme dihadirkan sebagai kerangka transformatif yang menekankan relasi, perawatan, dan keberlanjutan kehidupan sebagai prinsip dasar dalam merumuskan masa depan ekologi.

---

## Penutup

Sebagai refleksi kolektif dari Sekolah Perempuan dan Ekologi WALHI Sulawesi Selatan, buku ini menegaskan bahwa pengetahuan ekologis tidak hanya diproduksi di ruang akademik, tetapi juga lahir dari pengalaman hidup perempuan yang berhadapan langsung dengan krisis lingkungan. Merawat Bumi, Menjaga Kehidupan mengajak pembaca untuk memahami bahwa kerja merawat alam adalah kerja politik, sebuah praktik perlawanan terhadap sistem yang merusak kehidupan dan meminggirkan perempuan.

Dengan menghubungkan kritik struktural, pengalaman wilayah, dan visi masa depan, buku ini berkontribusi pada penguatan diskursus ekofeminisme dan ekologi politik feminis di Indonesia, sekaligus menjadi pijakan bagi perjuangan menuju keadilan ekologis dan gender.

**Slamet Riadi**

Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik  
WALHI Sulawesi Selatan

# PART I

## Eksplorasi Alam, Membaca Krisis Ekologi dalam Perspektif Ekofeminisme

---

Penulis :

Agnes Br. Lingga, Suci Rahmawati, Erma Suryani Ibrahim, Yusni Reski, Ilda Cita Suci, Nur Fatih Khanifah, dan Dita Angelia

# Ekofeminisme: Perempuan dan Alam

Oleh: Agnesh Br. Lingga

*Bumi adalah manusia, batunya sebagai tulang, tanah sebagai daging, airnya sebagai darah, dan hutan sebagai kulit, paru-paru dan rambut.*

-Aleta-

Beberapa waktu terakhir ini, isu lingkungan amat sangat hangat dibicarakan, banyak kaum dan golongan mengangkat topik ini sebagai bahan dalam suatu diskusi, bahan dalam ajang perlombaan, dan berbagai trend lainnya. Namun aplikasi pelestariannya masih sering terabaikan. Gerakan peduli lingkungan terkadang hanya sebatas eksistensi buta, dan parahnya lagi, keluh kesah yang keluar dari tiap bibir manusia dianggap sebagai bagian dari kontribusi pelestarian lingkungan, yang pada hakikatnya kalimat tanpa tindakan adalah nol.

Hubungan antar makhluk hidup dengan alam memiliki keterkaitan sangat penting, makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal dan sumber daya alam untuk kelangsungan hidupnya, sementara alam menyediakannya dengan catatan harus dijaga keberlangsungannya. Bumi diibaratkan sebagai "ibu pertiwi" dan harus diperlakukan sebagaimana layaknya seorang ibu, dijaga, dirawat, dan dilindungi. Namun pada faktanya, alam diperlakukan tidak adil, ia ditindas, dieksploitasi, dan mendapat kekerasan dari kaum kapitalis.

Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tentunya berkorelasi positif dengan kerusakan alam yang kita rasakan hingga saat ini. Seperti ungkapan Henri Manampiring dalam bukunya yang berjudul "Filosofi Teras" beliau mengatakan bahwa tidak ada peristiwa yang betul-betul 'kebetulan', artinya segala sesuatu di alam semesta ini saling berkaitan, kejadian-kejadian yang kita alami merupakan hasil dari rantai peristiwa yang panjang. Sama halnya dengan kerusakan alam yang kita rasakan saat ini, perubahan iklim, kenaikan suhu bumi, naiknya permukaan air laut, mencairnya es di kutub, banjir dan kekeringan, longsor, krisis ekonomi dan kelaparan, penyakit, punahnya berbagai spesies, bahkan kesetaraan gender di era krisis iklim juga merupakan dampak langsung dan tidak langsung dari eksploitasi sumber daya alam. Manusia dengan keegoisannya menggali habis-habisan sumber daya alam, hingga 'perutnya' hampir meledak. Mereka hanya mementingkan pribadinya sendiri dan karena keegoisannya maka alam yang menjadi korban dari tingkah-tingkah bodoh manusia. Padahal pada kenyataan sebenarnya yang menjadi korban keegoisan manusia adalah manusia itu sendiri.

Dari permasalahan lingkungan dan rusaknya bumi maka lahirlah suatu istilah yang kita sebut 'ecofeminism' atau ekofeminisme. Ekofeminisme muncul pertama kali pada tahun 1874 dalam buku Froincoise d'Eaubonne yang berjudul *Le Feminisme Ou la mort*. Dalam buku tersebut dia mengungkapkan pandangan bahwa ada hubungan langsung antara perempuan dan alam. Bila berbicara tentang ekofeminisme maka kita berbicara tentang adanya ketidakadilan di dalam masyarakat terhadap perempuan. Ketidakadilan terhadap perempuan dalam lingkungan ini berangkat dari pengertian adanya kesenjangan yang dilakukan oleh manusia terhadap non-manusia atau alam. Menurut Kristi Poerwandari, yang merupakan salah satu pendiri Yayasan Pulih, analogi dari ekofeminisme adalah apabila terjadi perusakan terhadap alam, maka sama halnya melakukan perusakan terhadap kaum perempuan. Sebaliknya apabila ada pembebasan alam, sama halnya dengan pembebasan terhadap perempuan.

Karena perempuan selalu dihubungkan dengan alam, maka secara konseptual, simbolik, dan linguistik ada keterkaitan antara isu feminis dan ekologis. Karen J. Waren, yang merupakan seorang ekofeminis mengatakan bahwa perempuan memang selalu di 'alam-kan' atau di 'feminim-kan'. Di 'alam-kan' artinya



adalah diasosiasikan dengan binatang misalnya, ayam, kucing, ular, sedangkan di 'feminim-kan' berkaitan dengan aktivitas diperkosa, digarap, dieksploitasi, dan lain-lain yang sejenis. Bila kita lihat penggunaan kata tersebut, menunjukkan korelasi yang erat dengan alam. Misalnya tanah yang digarap, hutan yang diperkosa, serta tambang yang dieksploitasi. Jadi tidaklah mengada-ngada bila perempuan dan alam sungguh memiliki kesamaan semacam simbolik karena sama-sama ditindas oleh manusia yang berciri maskulin. Disisi lain, banyaknya sejarah yang menceritakan tentang penindasan terhadap perempuan. Perempuan dipandang sebagai objek yang digunakan untuk memuaskan hawa nafsu kaum maskulin. Perempuan tidak dianggap sebagai manusia dan tidak diperlakukan seperti manusia laki-laki. Kita bisa melihat sejarah kasus di zaman Jahiliah. Pada zaman ini jika bayi yang lahir adalah perempuan, maka akan dikubur hidup-hidup. Karena bayi perempuan dianggap sebagai malapetaka. Perempuan diperlakukan sangat tidak adil, hak-hak mereka dirampas, bahkan mereka sendiri tidak punya hak atas dirinya sendiri.

Ekofeminisme berusaha menjelaskan hubungan antara feminisme dengan ekologi. Secara sederhana ekofeminisme menggunakan persamaan antara penindasan alam dan penindasan perempuan. Pada konteks ekofeminisme, tidak hanya melihat perempuan dan alam sebagai properti, melihat laki-laki sebagai kurator budaya dan perempuan sebagai kurator alam, namun juga melihat bagaimana laki-laki mendominasi perempuan dan manusia mendominasi alam. Menurut pendapat Mansour Fakih (1996), perempuan identik dengan sifat lemah lembut, memelihara, keibuan, dan cenderung emosional. Sedangkan laki-laki berkarakter maskulin, seperti atraktif, kompetitif, ambisius, dan agresif dalam interaksinya pada sesama manusia dan lingkungan. Pada prinsip feminisme, alam dipersepsikan dan dimaknai sebagai sumber penghidupan, dan perempuan dalam praktiknya secara khusus memiliki keahlian dalam mengelola alam sebagai penopang dalam keberlangsungan hidup.

Gerakan ekofeminisme merupakan gerakan yang berusaha menciptakan dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan dengan berbasis feminitas/perempuan. Perempuan dianggap memiliki peran yang krusial dalam upaya pencegahan kerusakan dan perbaikan lingkungan. Perempuan dan alam dianggap memiliki hubungan yang erat. Sementara itu pula persoalan lingkungan yang saat ini tidak netral dengan gender, karena ketika terjadi kerusakan alam, pihak yang paling beresiko terkena dampaknya adalah perempuan, hal tersebut disebabkan oleh konstruksi karakter yang dilabelkan pada perempuan.

Paham ekofeminisme juga dapat diartikan sebagai perempuan merupakan pemelihara, yang memiliki kemampuan dalam memproduksi dan mereproduksi kehidupan. Kaum perempuan memainkan peran yang sentral dan signifikan dalam usahanya menjaga keberlanjutan dan keahliannya sebagai penyedia sumber pangan.

Dalam bukunya yang berjudul 'Staying Alive: Women, Ecology, and Development' Maria Mies menyebutkan bahwa kegiatan perempuan dalam menyediakan pangan sebagai produksi kehidupan dan memandangnya sebagai hubungan yang benar-benar produktif dengan alam, karena perempuan tidak hanya mengumpulkan dan mengonsumsi apa yang tumbuh di alam, tapi membuat segala sesuatu menjadi tumbuh.

Perempuan dan alam bekerja sama sebagai mitra sehingga menciptakan hubungan yang intim diantara mereka. Maria juga mengatakan bahwa ekofeminisme mengajarkan cara hidup untuk saling menghargai serta melarang keras anggapan bahwa alam semesta ini merupakan milik manusia yang bebas untuk dieksploitasi secara brutal. Perempuan juga bukan makhluk yang rendah yang harus tunduk pada laki-laki. Sudah seharusnya paham antroposentrisme dan androsentrisme dihapuskan, bahwa pada hakikatnya kepentingan manusia tidak lebih diatas kepentingan makhluk lain dan kepentingan laki-laki lebih tinggi dibandingkan kepentingan kaum perempuan. Sebagai manusia, kita memiliki hak dan tanggung jawab yang sama atas apa yang disediakan alam bagi kita.

# Hubungan Ketertindasan Perempuan dan Eksploitasi Terhadap Alam

Oleh: Suci Rahmawati

Saat ini, kejadian mengeksploitasi alam telah banyak kita jumpai. Eksploitasi merupakan suatu sikap diskriminatif ataupun perlakuan yang dilakukan secara sewenang-wenang (Suharto, 2005). Eksploitasi alam merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan kepada alam secara berlebihan, tanpa adanya tanggung jawab, secara sewenang-wenang, untuk mendapatkan suatu keuntungan. Hal tersebut terlihat dari hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati dan telah menjadi rumah bagi satwa liar yang hampir punah, kini dikeruk, dirusak kemudian digunakan untuk memasok perusahaan yang membutuhkan kayu untuk memproduksi kertas dan kemasan sekali buang. Dampak dari perilaku tersebut pun terjadi kepada lingkungan seperti: tercemarnya siklus air, gangguan ekosistem, banjir, gempa bumi, longsor dan lain-lain. Bencana ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kemaslahatan semua makhluk hidup terutama manusia.

Sebenarnya, bentuk dari pengeksploitasian alam itu sendiri dilakukan oleh manusia demi keuntungan pribadi atau perusahaan. Perusahaan yang dibangun di Indonesia sebagian besar memproduksi suatu barang menggunakan bahan utama dari alam. Saat ini, terlihat begitu banyak tambang yang telah beroperasi, pengerukan terhadap gunung-gunung yang dulunya begitu asri, pembabatan terhadap hutan-hutan, dan pengangkutan batu secara berlebihan. Setelah musim hujan tiba, air yang dulunya tenang akan mengakibatkan banjir dan longsor.

Bentuk lain dari eksploitasi alam yang dilakukan manusia juga seperti: pembakaran hutan untuk pembukaan lahan, konversi fungsi lahan, dan pembuangan limbah beracun yang meresap ke dalam tanah. Hal tersebut membuat segala sesuatu yang terdapat di alam menjadi terganggu, tidak hanya manusia, tetapi juga makhluk hidup yang menggantungkan hidupnya di alam. Hal tersebut membuat ketidakberdayaan dan ketidakadilan terhadap alam. Meskipun tindakan-tindakan tersebut memiliki larangan keras dari pemerintah, akan tetapi sebagian besar kalangan masyarakat masih melakukan kegiatan tersebut. Sehingga solusi yang perlu diperhatikan adalah dengan menumbuhkan kesadaran itu sendiri dengan melakukan beberapa cara seperti menanam pohon, menggunakan produk yang ramah lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, melakukan perawatan lingkungan sekitar, pengurangan limbah industri, dan lain sebagainya.

Ketidakberdayaan dan ketidakadilan juga terjadi pada perempuan. Menurut Tyas Retno Wulan dalam jurnal ekofeminisme transformatif: perempuan tidak hanya sebagai korban terbesar dalam kerusakan lingkungan, tetapi juga justru dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Kerusakan alam dan bencana-bencana yang terjadi memberikan trauma yang mendalam bagi siapa saja terutama perempuan. Lebih lanjut, penelitian oleh News Unair, April, 2019 menyimpulkan bahwa perempuan mampu pertama kali bangkit dari trauma bencana alam yang terjadi. Perempuan dalam berbagai situasi dinilai mampu bangkit mengatasi masalah ekonomi dan sosial bagi keluarganya, menjadi penopang eksistensi komunitas yang memiliki ketangguhan, menjadi penyelenggara dapur umum, berperan sebagai perawat bagi keluarga, menjadi penyelamat barang-barang untuk kelangsungan hidup, bahkan menjadi sumber penyemangat bagi anggota keluarga agar tetap bertahan hidup dari bencana yang sedang terjadi.

Selain itu, perempuan juga bertanggung jawab dalam penyediaan layanan kesehatan reproduksi, dan memudahkan akses pendidikan, keterampilan, serta meredam terjadinya kondisi emosional yang berlebih seperti stres yang terjadi kepada anak. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): perempuan memiliki risiko 14 kali lebih tinggi menjadi korban bencana dibandingkan pria dewasa. Hal tersebut terjadi karena ketika bencana terjadi, perempuan terlebih dahulu



menyelamatkan keluarganya dan anak-anaknya. Selain itu, kurangnya pelatihan penyelamatan diri dari kondisi bencana alam juga dialami oleh perempuan.

Kemudian, menurut sejarah teori evolusi sosial yang dikemukakan Henry Morgan, penindasan terhadap perempuan telah dilakukan sejak zaman berburu dan meramu atau lebih tepatnya pada fase barbarisme. Laki-laki pada fase ini menjadi pihak yang lebih banyak bekerja dan menguasai alat produksi seperti tanah dan lahan. Sementara perempuan hanya dianggap sebagai mesin reproduksi dan mengurus ranah domestik. Pada masa tersebut manusia juga telah mengenal hak waris yang memperlihatkan ketimpangan pembagian peran di ruang publik yang didominasi oleh laki-laki dan ruang untuk perempuan yang lebih sedikit atau semakin sempit. Sebelum lahirnya konsep kepemilikan, perempuan dan laki-laki telah memiliki kesepakatan perihal pembagian kerja yang sangat bergantung kepada alam. Pada fase ini belum terjadi antara satu dengan lainnya karena orientasi pemikiran manusia hanya untuk memenuhi kebutuhan bersama.

Dalam pandangan ekofeminisme, perempuan selalu dikaitkan dengan alam. Pandangan ini berpendapat bahwa terdapat hubungan konseptual, simbolik, dan linguistik feminis terhadap isu ekologi. Masyarakat dibentuk oleh nilai, kepercayaan, pendidikan, tingkah laku yang memakai kerangka kerja patriarki dimana terdapat membenaran hubungan dominasi dan subordinasi berupa penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki (Karen dalam Arivia, 2006:381). Hal tersebut terlihat karena perempuan selalu “dinaturalisasi” dan alam yang selalu “difeminisasi”. Dalam pandangan tersebut, bila laki-laki dapat menguasai alam, maka hal yang sama juga dapat dilakukan laki-laki kepada perempuan.

Makna “perempuan dan alam” dapat dilihat sebagai kesadaran akan adanya hubungan kekuasaan yang tidak adil dan model relasi dominasi di dalam wacana lingkungan hidup yang sama dengan wacana perempuan (Arivia, 2006:381). Selain itu, tidak menginterpretasikan karakteristik perempuan dengan alam yang dapat melemahkan perempuan. Hal tersebut data dilihat di dalam anggapan bahwa perempuan memiliki kesamaan secara karakteristik dengan alam, oleh karena itu perempuan memiliki sifat penjaga, perawat dan pelestari alam. Sifat tersebut dapat didefinisikan tidak berdasar pada kesadaran manusia secara umum, namun berdasar pada kodrat perempuan. Pemikiran untuk mengembalikan perempuan sesuai dengan kodratnya inilah yang “menyanjung” perempuan namun sekaligus “menindas” perempuan. Para ekofeminis melihat terdapat relasi yang menindas di dalam wacana lingkungan sehingga menyebabkan ketidakadilan di dalam relasi yang terjadi dalam masyarakat.

Kemudian, menurut sejarah teori evolusi sosial yang dikemukakan Henry Morgan, penindasan terhadap perempuan telah dilakukan sejak zaman berburu dan meramu atau lebih tepatnya pada fase barbarisme. Laki-laki pada fase ini menjadi pihak yang lebih banyak bekerja dan menguasai alat produksi seperti tanah dan lahan. Sementara perempuan hanya dianggap sebagai mesin reproduksi dan mengurus ranah domestik. Pada masa tersebut manusia juga telah mengenal hak waris yang memperlihatkan ketimpangan pembagian peran di ruang publik yang didominasi oleh laki-laki dan ruang untuk perempuan yang lebih sedikit atau semakin sempit. Sebelum lahirnya konsep kepemilikan, perempuan dan laki-laki telah memiliki kesepakatan perihal pembagian kerja yang sangat bergantung kepada alam. Pada fase ini belum terjadi antara satu dengan lainnya karena orientasi pemikiran manusia hanya untuk memenuhi kebutuhan bersama.

Dalam pandangan ekofeminisme, perempuan selalu dikaitkan dengan alam. Pandangan ini berpendapat bahwa terdapat hubungan konseptual, simbolik, dan linguistik feminis terhadap isu ekologi. Masyarakat dibentuk oleh nilai, kepercayaan, pendidikan, tingkah laku yang memakai kerangka kerja patriarki dimana terdapat membenaran hubungan dominasi dan subordinasi berupa penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki (Karen dalam Arivia, 2006:381). Hal tersebut terlihat karena perempuan selalu “dinaturalisasi” dan alam yang selalu “difeminisasi”. Dalam pandangan tersebut, bila laki-laki dapat menguasai alam, maka hal yang sama juga dapat dilakukan laki-laki kepada perempuan.

Makna “perempuan dan alam” dapat dilihat sebagai kesadaran akan adanya hubungan kekuasaan yang tidak adil dan model relasi dominasi di dalam wacana lingkungan hidup yang sama dengan wacana perempuan (Arivia, 2006:381). Selain itu, tidak menginterpretasikan karakteristik perempuan dengan alam yang dapat melemahkan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam anggapan bahwa perempuan memiliki kesamaan secara karakteristik dengan alam, oleh karena itu perempuan memiliki sifat penjaga, perawat dan pelestari alam. Sifat tersebut dapat didefinisikan tidak berdasar pada kesadaran manusia secara umum, namun berdasar pada kodrat perempuan. Pemikiran untuk mengembalikan perempuan sesuai dengan kodratnya inilah yang “menyanjung” perempuan namun sekaligus “menindas” perempuan. Para ekofeminis melihat terdapat relasi yang menindas di dalam wacana lingkungan sehingga menyebabkan ketidakadilan di dalam relasi yang terjadi dalam masyarakat.

## Pengaruh Budaya Patriarki Yang Menjerat Perempuan dan Dampaknya Terhadap Lingkungan

Oleh: Erma Suryani Ibrahim

Berbicara tentang hubungan antara perempuan dan lingkungan sama halnya berbicara tentang ekofeminisme. Gerakan feminisme dan ekologi ini memiliki tujuan yang saling memperkuat, keduanya hendak membangun pandangan terhadap dunia dan prakteknya yang tidak berdasarkan dominasi. Pada titik inilah kajian ekofeminisme sebagai relasi antara feminisme dan ekologi menjadi krusial. Dimana pada masa sekarang ini, ekologi telah berkembang cepat dan semakin berubah menjadi sains yang lebih terbuka, akuntabel, interdisipliner, kolaboratif, dan perkembangan data yang begitu intensif. Dan saat ini juga telah diakui bahwasanya perempuan memiliki peran yang setara dengan laki-laki dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dan dalam kaitannya dengan perubahan iklim misalnya, secara internasional UNFCCC mengakui pentingnya kesetaraan pelibatan antara perempuan dan laki-laki terkait kebijakan iklim yang responsif gender, salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui suatu agenda khusus yang menangani masalah gender dan perubahan iklim, termasuk menuangkannya dalam Perjanjian Paris.

Namun, pertanyaannya apakah perempuan sudah maksimal dilibatkan dalam segala kebijakan terkait perlindungan lingkungan? Jawabannya mungkin saja tidak. Kita tahu hubungan perempuan dan lingkungan kini banyak disuarakan melalui ekofeminisme. Sedangkan untuk definisinya, ekofeminisme ini merupakan salah satu cabang dari feminisme yang menekankan pada lingkungan dan hubungan antara perempuan dan bumi sebagai dasar analisis dan praktis. Istilah ekofeminisme diperkenalkan oleh penulis Prancis, Françoise d'Eaubonne dalam bukunya yang berjudul “Le Féminisme ou la Mort”. Konsep ini menegaskan supaya tidak melihat perempuan dan lingkungan sebagai properti sebagaimana yang sering diberlakukan oleh sistem yang menganut patriarki.

Menurut Laila Fariha Zein dan Adib Rifqi Setiawan dalam bukunya yang berjudul “General Overview of Ecofeminism”, Akibat dari paham patriarki yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, mengakibatkan posisi perempuan cenderung ditempatkan hanya untuk urusan domestik. Oleh sebab itu ketika kerusakan lingkungan terjadi, tentu saja perempuanlah yang paling banyak merasakan dampaknya. Kecenderungan eksploitasi yang berakar dari paham patriarki ini membuat lingkungan semakin rusak akibat dari konflik lingkungan membuat produksi pertanian berkurang, sumber mata air rusak, identitas budaya hilang, dan kualitas kesehatan keluarga memburuk.

Meskipun begitu, perempuan mengalami dampak yang sangat serius dari kerusakan lingkungan, suara mereka tidak selalu didengar dan mereka kesulitan untuk dapat mengambil peran secara langsung dalam pengambilan keputusan selama konflik agraria berlangsung. Berdasarkan pengalaman tersebut, perempuan mengambil peran aktif dalam konflik agraria tidak hanya untuk melawan perusak lingkungan, tetapi juga untuk menjadi agen perubahan yang mempromosikan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam.



Indonesia yang masih kental dengan budaya patriarki hal itu ditunjukkan dengan persentase pemimpin laki-laki yang lebih banyak daripada perempuan. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan juga berlaku dalam masyarakat adat. Pada implementasinya di lapangan, masih banyak dari hak-hak perempuan sebagai bagian dari masyarakat adat yang tidak terpenuhi. Hal tersebut secara langsung membuat perempuan kehilangan akses terhadap perlindungan lingkungan sekitarnya. Menurut Dewi Candraningrum dalam materinya yang berjudul "Spiritual Baru Perempuan Adat" apabila seorang perempuan kehilangan akses atas sumber daya alamnya akan melahirkan implikasi yang berbeda pada perempuan dan lingkungan sehingga berakibat pada naiknya beban hidup, naiknya angka kemiskinan, dan menurunnya kesehatan. Dari pendapat tersebut, jika diselaraskan dengan fenomena saat ini yakni meningkatnya kepadatan penduduk yang semakin tak terelakkan setiap tahunnya tentu akan memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan seperti pada peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan untuk penduduk dan lama kelamaan akan menjadi penyebab terjadi degradasi lahan yang tidak terhindarkan. Selain itu kepadatan penduduk juga akan berakibat pada meningkatnya jiwa konsumtif yang berakhir pada pencemaran lingkungan dan perubahan iklim.

Deskripsi diatas hanya sepeggal data yang menunjukkan bahwa besarnya dampak yang dihadapi perempuan terhadap lingkungannya. Lantas apakah pembangunan yang selama ini gencar dipropagandakan bisa membebaskan perempuan dari jerat penindasan

tersebut? Jawabannya tentu tidak. Terlebih di era globalisasi saat ini, alih-alih menciptakan kesejahteraan umat manusia, globalisasi justru menghadirkan jurang ketimpangan yang teramat dalam terutama bagi kaum perempuan, baik ketimpangan sosial dan ekonomi. Kajian klasik Ester Boserup dalam bukunya berjudul *Women's Role in Economic Development* menyatakan bahwa pembangunan seringkali berdampak negatif terhadap perempuan. Menurutnya, pembagian kerja tradisional antara laki-laki dan perempuan dihancurkan karena proses pembangunan dan dalam pembagian kerja yang baru ini perempuan seringkali dirugikan.

Pembangunan kapitalis yang merupakan jalur utama pembangunan yang paling umum dilalui oleh sebagian besar negara berkembang cenderung secara progresif memiliki dampak marginalisasi terhadap perempuan. Sejak revolusi hijau, perempuan yang sebelumnya berdaulat atas praktik pertanian, mulai dari pemilihan benih, menanam, menyiangi, membuat pupuk alami, memanen, bahkan sampai menumbuk padi pun kini tersingkirkan. Perubahan kehidupan petani perempuan dalam proses integrasi ekonomi nasional ekonomi global yang luput dari perhatian pemerintah. Dampak revolusi hijau dan globalisasi merupakan gambaran suram nasib kaum tani khususnya perempuan. Lebih jauh dijelaskan, dalam era globalisasi saat ini, dimana hubungan struktur agrarian bercorak kapitalis, perempuan akan semakin menjadi pihak yang termarginalkan. Kondisi ini terlihat dari separuh penduduk miskin di negara berkembang adalah kaum perempuan. Pada titik ini nampak bahwa perempuan adalah korban dari kompleksitas persoalan dan ekologi dan pembangunan.

## Referensi

- Mudzakir, Amir. 2014. *Feminisme Kritis; Gender dan kapitalisme Dalam Pemikiran Nancy Fraser*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahman, Faisol, Retno Suyandari., dan Zakky Ahmad. 2022. *Perempuan dan Pelestarian Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada.  
<https://pslh.ugm.ac.id/perempuan-dan-pelestarian-lingkungan/>
- Fariha Zein, Laila., dan Adib Rifqi Setiawan. 2017. "General Overview of Ecofeminism". Indonesia: ResearchGate  
[https://www.researchgate.net/publication/335441481\\_General\\_Overview\\_of\\_Ecofeminism](https://www.researchgate.net/publication/335441481_General_Overview_of_Ecofeminism)
- Candraningrum, Dewi. 2022. "Spiritualitas Baru Perempuan Adat: Pengetahuan, Konservasi, dan Aktivisme". Solo: Sekolah Perempuan dan Ekologi.

# Relasi Perempuan, Alam, dan Eksploitasi Atas Keduanya Dalam Bidang Pertanian

Oleh: Yusni Reski

Krisis pangan tidak hanya berdampak di negara-negara maju, tetapi juga di negara berkembang, sebut saja Indonesia. Pemerintah di Indonesia berusaha keras membuat program-program yang dapat membantu menjaga ketahanan pangan dan program yang paling populer yang dianggap pemerintah sebagai sebuah solusi atau jalan keluar adalah “Revolusi Hijau”. Revolusi hijau berhasil mengubah kebiasaan dan sikap petani dari sistem bertani tradisional menjadi sistem bertani yang modern dengan beberapa penggunaan teknologi yang disuguhkan (Rahayu & Kumalasari, 2016). Namun ternyata, program yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan tersebut, menuai dampak negatif yang berkepanjangan.

Revolusi hijau didefinisikan sebagai suatu perubahan cara bercocok tanam dari konvensional berubah ke cara modern untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Definisi lain menyebutkan bahwa Revolusi Hijau merupakan revolusi produksi biji-bijian dari penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dari varietas gandum, padi, jagung yang membawa dampak tingginya hasil panen. Revolusi hijau bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara penelitian dan eksperimen bibit unggul yang akan dibudidayakan.

Hasil dari program Revolusi Hijau tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan terbesar dunia pada tahun 1984. Namun, pada dekade 1990-an beberapa masalah lingkungan mulai mencuat di antaranya kelimpungan petani untuk menghadapi serangan hama, kesuburan tanah yang merosot, dan ketergantungan pemakaian pupuk tinggi dan pestisida yang banyak menyumbang pencemaran pada lingkungan. Penggunaan pestisida sintesis yang berlebihan menyisakan residu yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Pencemaran residu yang berlebihan lalu menimbulkan sifat resistensi terhadap serangga yang menjadi penyebab terjadinya ledakan hama (Baehaki, 2016: 99-108). Ledakan hama tersebut kemudian menjadi cikal bakal siklus penggunaan bahan kimia yang lebih besar (Purnomo, 2010).

Selain pemakaian pestisida, penggunaan pupuk sintesis juga menjadi salah satu pemicu terjadinya masalah lingkungan dalam hal ini perubahan iklim. Input bahan-bahan sintesis yang berlebihan akan menjadi salah satu pemicu berkurangnya kadar C-Organik di dalam tanah dan menjadikan tanah tidak mampu lagi untuk mengikat C-Organik yang menjadi suplemen tumbuh bagi tanaman (Diara, 2017). Setelah beberapa tahun, tanah yang telah mengalami kondisi demikian akan menjadi gersang dan berubah menjadi wilayah yang mati. Hal ini tentu saja akan mengganggu kondisi lingkungan yang ada, baik makhluk hidup yang ada di air, maupun yang ada di tanah, dan di udara.

Selain itu, teknologi yang kemudian hadir dengan tujuan mempercepat pekerjaan justru berdampak pada lingkungan. Salah satunya adalah penggunaan alsintan yang mengakibatkan kompaksi pada tanah. Seiring berjalannya waktu, tanah yang mengalami kompaksi tidak dapat lagi menjadi media tumbuh bagi tanaman. Hal ini lagi-lagi akan mengganggu siklus ekologi yang ada dan pastinya berujung pada adanya perubahan iklim. Adanya benih tanaman unggul yang memungkinkan petani dapat menanam padi sebanyak empat kali dalam setahun begitu menggiurkan para petani. Namun dibalik semua itu, seiring berjalannya waktu tanah yang selalu menyediakan unsur hara tidak akan mampu lagi untuk memproduksi terlebih input-input bahan sintesis yang tidak dapat terelakkan. Komplit-lah sudah permasalahan lingkungan yang timbul karena kegiatan pertanian.

Revolusi hijau dipandang tidak hanya sebagai bentuk industrialisasi dan modernisasi pertanian yang keseluruhannya berdasar pada logika pertumbuhan, tetapi juga merupakan strategi transformasi sosial



untuk menggeser pertanian tradisional. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah pergeseran peran petani perempuan dalam proses produksi. Mekanisasi pertanian yang hadir sebagai bentuk modernisasi dari kerangka revolusi hijau membangun asumsi bahwa para petani perempuan mundur disebabkan ketidakmampuan perempuan untuk terlibat dalam pembangunan pertanian. Perempuan dinilai belum cakap untuk menguasai inovasi yang lahir untuk mendukung pembangunan tersebut. Anggapan ini yang kemudian menggiring petani laki-laki mendominasi kegiatan produksi pertanian. Lagi-lagi konstruksi sosial memarginalkan adanya peran perempuan. Pembangunan pertanian berbasis modernisasi dengan menggusur cara bertani konvensional ternyata belum mampu menjadi jawaban atas cita-cita pembangunan pertanian yang berlandaskan keberlanjutan lingkungan dan keadilan gender.

Lalu, bagaimana bentuk petani perempuan yang dikorbankan oleh Revolusi hijau? Di Jawa misalnya, secara tradisional petani perempuan memiliki peran penting dalam produksi, khususnya selama musim panen dan musim tanam. Dalam tradisi pertanian, kerja petani perempuan sangatlah penting terlebih pada penyiapan benih sampai kepada bibit menjadi cikal bakal sumber kehidupan. Namun, sejak mencuatnya Revolusi Hijau, tipe padi yang semakin cepat mendapatkan hasil panen dan teknologi baru yang tidak lagi membutuhkan tenaga yang banyak secara sistematis telah mengabaikan dan menggusur peran dan pekerjaan petani perempuan. Meskipun total input tenaga diakui lebih tinggi petani perempuan dibanding petani lelaki, namun teknologi yang diciptakan yang memudahkan dikontrol oleh petani lelaki, maka proses pengusuran petani perempuan pun tak terhindarkan (Solo, 2010).

Alam dengan segala kekayaannya yang melimpah dan memberi manusia napas kehidupan, pada akhirnya menjadi objek dari keserakahan manusia. Hutan-hutan digunduli, sawah-sawah disulap dengan bahan-bahan sintesis, bahkan perutnya dibongkar oleh tangan-tangan yang rakus. Begitu pun perempuan, dengan segala konstruksi sosial yang ada, mereka malah dimarginalkan, dieksploitasi dalam pembagian kerja, bahkan perannya hanya sebagai manusia kelas dua di bawah laki-laki.

Pertanyaan yang kemudian hadir dari beberapa anomali ekologi dan ketimpangan gender yang terjadi adalah: strategi apa yang akan dihadirkan untuk mendegradasi dampak berkepanjangan dan eksploitasi yang terjadi pada alam dan perempuan? Baik petani perempuan, maupun petani laki-laki, harus sama-sama memahami bahwa: "kedaulatan pangan" diusahakan untuk kehidupan, bukan untuk komoditas atau dijadikan keuntungan belaka tanpa mempersoalkan 'warna gender'. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada lagi relasi kuasa antara petani laki-laki dan petani perempuan.

## Eksploitasi Alam dan Peran Perempuan

Oleh: Ilda Cita Suci

Dewasa ini, permasalahan lingkungan dan eksploitasi alam selalu saja terjadi. Pemerintah dengan leluasa memberi izin kepada para pengusaha, mengambil sumber daya alam secara eksploitatif sehingga masyarakat melakukan bentuk perlawanan atas dasar eksploitatif yang dapat merusak ekosistem alam dan lingkungan. Terbaru, kebijakan mengenai percepatan arus investasi ini dengan dibentuknya rancangan Undang-undang Omnibus Law.

Melalui fenomena tersebut, dibutuhkan peran perempuan yang tidak kalah pentingnya. Contoh dari seorang polisi kehutanan perempuan muda yang bernama Santi. Ia mengatakan bahwa polisi tidak hanya berjenis laki-laki tapi juga perempuan, termasuk polisi hutan. Ia pun menyebut bahwa luas hutan Indonesia ±120 juta hektar, dengan luas hutan demikian, dibutuhkan emansipasi perempuan. Emansipasi ini bisa dilakukan melalui tindakan memberi supporting di rumah tangga, juga mendukung tugas-tugas di luar sebagai polisi hutan yaitu perlindungan, pengamanan, pelestarian kawasan hutan di Indonesia. Peranan ini menjadi setingkat dengan polisi hutan laki-laki. Santi mengatakan bahwa perempuan bisa menjalankan tugas menjaga lingkungan hidup kehutanan yang lebih baik kedepannya.

Contoh kedua datang dari kasus perusahaan Korea masuk ke Papua yang menimbulkan kontroversi karena perusahaan itu ingin membabat hutan Papua untuk investasi. Semua itu ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah yang memungkinkan siapa pun yang membutuhkan lahan akan disiapkan oleh pemerintah walaupun konsekuensinya adalah menggusur hak pohon untuk tumbuh, sungai untuk jernih, hak monyet untuk makan pisang, dan hak masyarakat Papua untuk menikmati cadangan pangan. Berbicara tentang perempuan Papua secara khusus seperti layaknya perempuan daerah manapun yang notabenehnya paham akan kebutuhan yang lebih kompleks. Baik itu dalam dunia domestik dan lainnya dari pada laki-laki, bergantung sepenuhnya pada hutan untuk keberlangsungan hidup. Mereka hanya ingin keberlangsungan sumber daya alam yang dapat digunakan secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang, dengan cara mereka dalam Mengolah dan memperhatikan sumber daya alam dengan pemakaian yang tidak berlebihan, sehingga sumber daya tersebut tidak cepat habis atau biasa disebut sustainability.

Hutan Papua memiliki luas 37 juta hektar. 80 persen dari hutan primer ada keanekaragaman hayati, ada 150.000 jenis serangga, ada 20.000 jenis pohon, ada 600 jenis mamalia. Keanekaragaman itu sekarang dihapus hanya oleh keputusan pemerintah untuk mengizinkan sebuah perusahaan mengeksploitasi tanah Papua. Jadi, kalau hutan Papua itu dirampok oleh industri itu artinya bukan sekadar kehilangan pangan, namun juga kehilangan kearifan lokal yang merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri dan telah diwariskan secara turun temurun atau biasa disebut local wisdom, sebuah ajaran dalam mengelola keseimbangan antara pangan dan populasi.

Melihat relasi antara perempuan Papua dan hak atas lingkungan yang biasa disebut ekofeminisme, memiliki keterkaitan dengan yang disampaikan oleh Dewi Candraningrum pada salah satu materi Sekolah Perempuan dan Ekologi dengan judul Spiritualitas Baru Perempuan Adat: Pengetahuan, Konservasi, & Aktifisme, yaitu Perempuan adat memiliki peran kunci dalam menjamin keberlangsungan, keberadaan masyarakat adat karena mereka memiliki pengetahuan soal tenun, benih, perladangan, ritual, pengobatan, persalinan dan lain sebagainya. Berdasarkan pengetahuan-pengetahuan tersebut, perempuan mengambil peran-peran tertentu di dalam masyarakat adat. Melalui peran inilah perempuan memastikan keberadaan dan juga kemandiriannya di dalam masyarakat adat juga negara. Ironis apabila terdapat kebijakan negara yang alih-alih menjamin hak malah membuat rentan posisi perempuan.

Contoh lain datang dari mama Aleta Baun dari NTT yang berupaya untuk mempertahankan wilayah konservasi hutan yang diserobot oleh perusahaan. Protes mama Aleta ini menghasilkan dalil baru di dalam komunitas hukum bahwa protes perempuan itu betul-betul mewakili kepentingan lingkungan. Perempuan jika melakukan protes langsung bekerja bersamaan dengan hak terhadap lingkungan.

Mama Aleta melakukan protes dengan bertukar posisi dengan suaminya. Suaminya memasak dan perempuan-perempuan yang protes membuat kain tenun serta menenunnya di lokasi ekspresi tambang yang menunjukkan bahwa hak untuk menenun itu tidak bisa dihalangi oleh tentakel mesin-mesin penggali tambang. Mama Aleta mengatakan bahwa pada saat itu tidak ada orang yang berjuang untuk bagaimana mengatasi tambang batu marmer. Bukan karena tidak peduli namun masyarakat masih merasa takut dan canggung dalam berekspresi, Menurut kepercayaan masyarakat NTT, batu dilambangkan sebagai tulang, hutan sebagai rambut atau pori-pori, tanah sebagai daging dan air sebagai darah. Sama halnya dengan seorang manusia yang memiliki rambut, tulang, darah, daging maka disebut manusia.

Tindakan mama Aleta ini bukanlah perkara mudah, karena untuk berbicara tentang alam di mana masyarakat NTT termasuk raja dan berbagai kalangan menganggap perempuan sebagai orang yang di nomor duakan. Dimana perempuan itu dianggap lemah dan tidak boleh bicara banyak. Bermodalkan keberanian dan kepedulian, satu perempuan mampu membawa pengaruh dan perubahan meski butuh



proses yang tentu tidak mudah. Itulah contoh- contoh peran perempuan yang dapat kita ambil pelajarannya bahwa sekalipun perempuan tidak terlepas dari permasalahannya yang kompleks, hal itu tidak akan menghalangi dirinya untuk terus mengambil peran penting, termasuk perannya dalam mempertahankan kelestarian alam. Seperti kutipan ibu kartini “tiada awan di langit yang tetap selamanya, tiada akan mungkin terang terus-menerus cuaca, sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa keindahan, kehidupan manusia serupa alam”.

Dapat disimpulkan bahwa pemecahan permasalahan ekologi juga dibarengi dengan menggugat ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Bentuk perlawanan diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan sebagainya perlu diperjuangkan dalam ranah sosial dan institusi. Ekofeminisme dalam gerakannya membuat sebuah kerangka acuan, pengetahuan terkini dan wacana kritis. Adanya kerangka acuan digunakan sebagai tolak ukur dari mana suatu perspektif yang digunakan dalam mengamati suatu sistem.

Kerangka acuan, nantinya akan berlanjut dengan wacana kritis. Wacana kritis yang dipilih dapat dijadikan media dalam pengungkapan. Gerakan perempuan dan alam seringkali terkotak-kotakkan oleh kepentingan dan permasalahan parsial. Setiap gerakan lupa akan kekuatan persatuan umat yang nantinya setiap bentuk perlawanan yang dilakukan hanya sesaat.

Kesadaran akan sejarah adanya kesadaran gerakan perempuan berkelindan dengan alam muncul sejak adanya gerakan ekofeminisme. Aliran ini kemudian populer di Indonesia sebagai bentuk perlawanan atas kerusakan alam dan perilaku eksploitatif industri yang juga berdampak terhadap perempuan. Gerakan ekofeminisme ini sebagai bentuk kesadaran akan sejarah baru kesadaran akan sejarah nantinya akan menciptakan perkembangan sejarah dalam bentuk gerakan perempuan dan alam kita sebagai subjek yang menentukan. Bagaimana gerakan tersebut berjalan sehingga tidak menghasilkan keadilan yang semua dimanfaatkan kelompok lain mengatasnamakan perempuan dan alam. Lebih lanjut, ekofeminisme hadir sebagai gerakan yang mengambil resiko untuk bertentangan dengan makro politik sehingga dibutuhkan konsistensi. Ekofeminisme adalah investasi peradaban bukan investasi politik.

## Referensi

Abby Gina. Ekofeminisme: menyoal perempuan dan alam. Jurnal Perempuan. Agustus 2017.

Krisanti, Dinda. Ekofeminisme dalam perbincangan. (Yogyakarta: Balairungpress, 2017).

Nadya, Karisma, Melati. Membicarakan Feminisme (Yogyakarta: EA Books, 2019).

Wicaksono, Raden Ariyo. Hutan Papua Hancur demi Kertas Korea Selatan. Diakses pada Maret 17, 2022. <https://betahita.id/news/lipsus/7284/hutan-papua-hancur-demi-kertas-korea-selatan.html?v=1650424320>.

# Pengaruh Kerusakan Ekologi di Kalangan Perempuan

Oleh: Nur Fatih Khanifah

Memahami tentang ekologi di masyarakat pada umumnya mengartikan sebagai salah satu bentuk keadaan lingkungan alam saat ini. Pada hakikatnya ekologi berasal dari Bahasa Yunani Oikos “Eko” yang artinya rumah-tempat tinggal, tempat tinggal seluruh perempuan dan laki-laki, hewan, tumbuhan, air, tanah, udara, dan matahari. Ekologi sendiri sebagai salah satu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup atau mati disekitarnya.

Melihat kondisi lingkungan saat ini, tentu perlu disadari bahwa ekologi setiap harinya mengalami krisis. Menjadi sosok perempuan yang memiliki peran positif tentu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik kemanfaatannya untuk masyarakat umum atau lingkungan tempat tinggalnya. Perempuan dalam kiasan masyarakat tradisional digambarkan seperti bunga, bumi, ayam, malam, bulan dan padi. Tentu pemberian gambaran tersebut memiliki makna yang sangat baik. Perempuan kerap kali dihubungkan dengan ekologi atau kondisi lingkungan sekitar. Karena pada dasarnya perempuan inilah sebagai salah satu faktor terjaganya suatu lingkungan. Adanya perempuan yang baik pastinya berasal dari lingkungan yang baik.

Seperti yang sudah banyak kita temui, mengenai kondisi ekologi atau lingkungan saat ini, sudah sangat menyedihkan. Contohnya, banyak pohon-pohon ditebang sembarangan, pembangunan pabrik dimana-mana, sawah semakin sempit dan berkurangnya penghijauan di daerah kota maupun desa yang semakin maju pembangunannya. Menjadi seorang perempuan yang memiliki kesadaran tentunya kita perlu memulai menjaga lingkungan dengan cara menyadari bahwa kita bisa untuk tetap melestarikan lingkungan, melalui nilai-nilai moral, etika, taboo, ritual, permainan dan seni tari dan semua kegiatan perempuan lainnya yang menimbulkan manfaat serta melestarikan adat beserta lingkungannya.

Sedari dahulu lingkungan itu sangat erat hubungannya dengan manusia, akan tetapi karena sifat manusia yang sangat rakus menyebabkan keasrian lingkungan semakin menipis. Lingkungan yang rusak justru lebih berpengaruh pada perkembangan perempuan di sekitarnya. Seperti contoh di tahun 1984 tepatnya tanggal 2-3 Desember terjadinya krisis ekologi yang sangat berpengaruh terhadap perempuan. Di tahun itu 40 ton gas beracun dilepaskan dari pabrik pestisida Union Carbide di Bhopal, India. Pada peristiwa tersebut menyebabkan paling tidak ada 3000 orang meninggal dan ada 400.000 jiwa yang terkena dampaknya. Setelah dilakukan survei jumlah korban jiwa, ternyata prosentase perempuanlah yang paling banyak pada kejadian tersebut. USA melakukan penelitian terhadap kejadian yang mengenai kota India, yang menyebutkan bahwa sekitar tahun 1970-1987 terjadi kelainan dalam kehamilan perempuan yang melonjak hingga 400%, ada juga yang terkena kanker payudara hingga mengalami peningkatan mencapai 22%. Selain itu ada juga kasus yang menyerang bayi akibat dari ASI yang menyebabkan para bayi terkena gangguan saraf. Dari peristiwa itu, bisa disimpulkan bahwa akan ada akibat fatal yang menyerang perempuan di dunia, jika kondisi lingkungan semakin memburuk.

Kesadaran terhadap ekologi harus dilihat dari kenyataan dunia secara integral holistik, bahwa dunia ini berisi berbagai keanekaragaman. Integral holistik sendiri merupakan pendidikan yang mengintegrasikan seluruh aspek dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan seperti nilai moral, etis, religius, psikologis, filosofis, dan sosial dalam kesatuan jiwa baik dari segi material, spiritual. Perempuan menjadi salah satu sosok yang sangat berpengaruh pada perkembangan dan kemajuan manusia. Perempuan adalah yang menjadi ibu dari para generasi-generasi yang sedang tumbuh.

Strong (1995) mengatakan bahwa salah satu kunci untuk memperbaiki kondisi lingkungan terletak pada penghormatan terhadap hukum alam yang diakui dan dipahami oleh masyarakat asli tradisional. Pemahaman masyarakat tradisional ini terletak pada perempuan, khususnya perempuan pedesaan yang lebih memahami keadaan lingkungannya. Perempuan desa dalam berpola pikir tentu sangat berbeda dengan perempuan kota. Perempuan desa lebih memikirkan bagaimana tetap mempertahankan lingkungan yang terus dirusak oleh lembaga-lembaga atau pengusaha dalam pembuatan pabrik, yang limbahnya berpengaruh pada perempuan dan anak. Bagaimana tidak berpengaruh? Kebanyakan masyarakat yang menetap di pedesaan tentunya perempuan dan anak-anaknya, sedangkan para suami bekerja ke luar kota. Maka dari itu rusaknya ekologi lebih berpengaruh terhadap perempuan di dunia.

Seperti yang telah disampaikan oleh Narasumber kami pada pertemuan pertama Sekolah Keperempuanan atau biasa disebut sebagai Sekolah Ekofeminisme yakni Dewi Candraningrum, menyampaikan bahwa modernitas dan kapitalisme yang melanda seluruh wilayah Indonesia ini membuat perpecahan antar manusia terkait kesatuan, kesetaraan, aksi mengenai kelestarian alam dan masih banyak lagi masyarakat yang tidak memperdulikan degradasi atau kerusakan lingkungannya. Dilanjut oleh Pro. Dr. Ir. Itji Diana Daud, M.S terkait persoalan lingkungan hidup yang mengalami degradasi akibat dari inkonsistensi kebijakan, penegakan hukum dan lingkungan yang masih lemah, kolusi dan korupsi Sumber Daya Alam, oligarki, yang akan menyebabkan seringnya terjadi bencana alam, krisis iklim, kelangkaan pangan dan sumber air yang bersih. Apabila kondisi tersebut tidak segera diperbaiki maka akan memperparah kondisi lingkungan yang sangat berbahaya.

Di era yang serba digital, tentunya sebagai perempuan yang cerdas, memanfaatkan teknologi dengan



membuat pamflet atau komunitas-komunitas yang berbaur tentang keberempuanan dan pelestarian lingkungan, dengan tujuan menghilangkan kerakusan manusia terkait perluasan bangunan-bangunan yang sebenarnya telah mengeksploitasi lingkungan. Di Indonesia sendiri sudah ada UU tentang Kesetaraan Gender yaitu UU Pasal 27 Ayat (1) Tahun 1945. Jadi, perempuan juga bisa melakukan gerakan pencegahan eksploitasi lingkungan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tergolong berlebihan dalam melakukan pembangunan tanpa memikirkan akibat lingkungan dan masyarakat sekitar untuk tahun-tahun selanjutnya.

Berbicara terkait modernitas dan zaman serba digital, terdapat sekelompok perempuan-perempuan adat di wilayah yang belum terjamah atau terkontaminasi dengan perkembangan zaman. Sebagai negara yang kaya akan ragam budaya, harusnya tetap melestarikan adat budaya daerah masing-masing. seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa perempuan lebih erat hubungannya dengan lingkungan, dan cara menjaga lingkungan tersebut salah satunya adalah melestarikan adat budayanya dengan cara diadakan sanggar tari budaya dan lain sebagainya. Namun, anggapan perempuan adat di Indonesia sendiri dianggap sebagai bentuk ketertinggalan negara di era zaman 5.0 dalam mengatasi seluruh masyarakatnya. Padahal adanya era 5.0 bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menyebarluaskan adanya pelestarian lingkungan dari perempuan adat Indonesia yang diimplementasikan dalam bentuk adat-adat daerah sedari dulu.

Seperti yang kita ketahui dari pandemi Covid-19 dua tahun yang lalu. Terdata bahwa korban perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini bisa disimpulkan bahwa perempuan lebih rentan kesehatannya dibandingkan dengan laki-laki. Karena di dalam tubuh perempuan terdapat sebagian anggota tubuh yang benar-benar sensitif dan sangat erat hubungannya dengan keadaan lingkungan yang bersih dan sehat.

## Referensi

Astuti, T. M. (2012). Ekofeminisme dan Peran Perempuan dalam Lingkungan. *Indonesian Journal of Conservation*, 49-60.  
Ulfah, S. (2019, Agustus 2). Holistik Integratif: Manfaat, Tujuan dan Pola Mengajar. Diambil kembali dari Popmama.com: <https://www.popmama.com>  
Wulan, T. R. (2007). Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 105-130.

# Perempuan: Energi Terbarukan dan Korupsi

Oleh: Dita Angelia

Data emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) yang dirilis worldmeters.info menempatkan Indonesia dalam 10 besar negara dengan emisi karbon tertinggi. Pemerintah Indonesia menetapkan target pada tahun 2030 sebagaimana tertulis pada Updated Nationally Determined Contribution RI Tahun 2021, energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 29% (unconditional) dan 41% (conditional dengan bantuan internasional). Pemerintah Indonesia juga menargetkan untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Isu transisi energi berkelanjutan juga menjadi salah satu isu prioritas Presidency G20 Indonesia.

Salah satu EBT yang dominan di Indonesia adalah energi panas bumi. Indonesia juga merupakan penghasil panas bumi peringkat kedua di Dunia. Penggunaan geothermal energy di Indonesia mengalami peningkatan produksi dari 1.948 Megawatt pada tahun 2018 menjadi 2.342,63 Megawatt pada bulan Oktober 2022. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) menjamin adanya kestabilan harga listrik pada jangka panjang karena tidak mempunyai komponen C (fuel cost) dalam penghitungan biaya pokok penyediaan BPP Listrik.

Akan tetapi, PLTP ini menghadapi beberapa kendala baik dari segi perizinan di mana biasanya potensi

panas bumi biasanya berada di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Andika dkk (2019) menyebutkan energi panas bumi pada PT. Pertamina Geothermal Energy Hulu Hais menimbulkan beberapa dampak kerusakan lingkungan seperti tercemarnya sumber air minum, longsornya tanah, sawah yang tertimbun, perusakan ekosistem sungai, atau gempa bumi minor yang terjadi di Lebong.

Transisi energi baru dan terbarukan ini juga rawan terjadinya korupsi yang semakin meminggirkan perempuan dalam pembangunan. Untuk itu perlu adanya kebijakan anti korupsi yang baik. Dr Vishnu Juwono berpendapat pada Side Event Civil 20 Summit, Recover Together, Recover Stronger: Energy Transition Without Corruption pada Kamis, 6 Oktober 2022, berpendapat potensi korupsi di sektor energi terbarukan pada belanja publik melalui kecurangan tender, suap, inefisiensi, penggelembungan biaya pembangunan infrastruktur EBT. Untuk itu diperlukan tata kelola baik dalam sektor energi seperti regulasi yang baik, transparansi dan partisipasi publik.

Dalam bidang regulasi perlu adanya harmonisasi regulasi dalam mendukung anti korupsi, terutama terkait konflik kepentingan, menerapkan alat evaluasi proyek dari Lembaga keuangan pemerintah maupun non pemerintah, mewajibkan penyelenggara proyek melakukan studi kelayakan dan melibatkan Lembaga audit dalam proyek EBT dari hulu ke hilir. Pada bidang partisipasi publik perlu memberikan akses informasi dan secara masif menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang partisipasi masyarakat dari hulu hilir dan menerapkan aturan partisipasi masyarakat dalam proyek energi terbarukan.

Transisi energi terbarukan ini menjadi dua mata pisau, disatu sisi mengurangi ketergantungan akan bahan bakar fosil di sisi lainnya menimbulkan masalah baru seperti kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial dan ketergantungan. Kerusakan lingkungan ini membuat perempuan lebih rentan terdampak karena perempuan lebih banyak mengakses energi. Perempuan sebagai pengolah pertama Sumber Daya Alam di dalam rumah tangganya akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kekurangan air bersih membuat perempuan bekerja lebih ekstra untuk mendapatkan sumber air bersih. Pencemaran air, udara dan tanah juga dapat mengganggu kesehatan reproduksi perempuan.

Saat ini perempuan dianggap sebagai pengguna dan penikmat EBT saja. Terdapat beberapa kelompok perempuan mampu membangun instalasi EBT, sehingga menghasilkan energi listrik dan energi api dari biogas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sayangnya partisipasi perempuan belum diperhitungkan. Sehingga pengembangan instalasi dan pemanfaatan EBT tidak mempertimbangkan kebutuhan perempuan sehingga perempuan tidak menerima manfaat dari EBT.

Sektor energi terbarukan masih didominasi oleh laki-laki dalam pembuatan keputusan, untuk itu perlu adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam transisi EBT agar perempuan dapat ikut serta dalam pembuatan kebijakan EBT.

Salah satu contoh partisipasi perempuan pada Energi Terbarukan ada pada perempuan di Kabupaten Halmahera Tengah. Bappenas (2015) mengklasifikasikan Maluku sebagai salah satu wilayah dengan pemanfaatan energi terendah. Pada tahun 2015 rasio penggunaan listrik di Provinsi Maluku Utara adalah 70,79 persen, jauh di bawah rata-rata nasional pada tahun 2014 (81,70 persen). Sebagian masyarakat mencoba memenuhi sendiri kebutuhan listrik dengan genset bermesin diesel untuk menyediakan pasokan listrik. Salah satu penyebab krisis listrik di Maluku Utara adalah ketidaktersediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyalurkan energi, serta minimnya pengembangan energi-energi terbarukan.

Hal ini sejalan dengan pengalaman perempuan-perempuan Anggota Koalisi Perempuan di Halmahera Tengah yang menyampaikan bahwa di desanya belum ada listrik. Salah satu desa telah mendapatkan akses listrik tetapi hanya tersedia mulai pukul 18.00 hingga 06.00 keesokan harinya. Perempuan juga



merasa belum dilibatkan dalam pembangunan di sektor energi.

Perempuan-perempuan di Kabupaten Halmahera Tengah, masih diposisikan sebagai konsumen dari energi terbarukan. Perempuan masih menjadi pihak yang terpinggirkan dari perencanaan, pengelolaan, pengambilan keputusan, serta pemantauan pembangunan energi terbarukan. Padahal perempuan memiliki peran strategis dalam menyediakan sumber daya alam untuk mengembangkan energi terbarukan.

Saat ini pemerintah masih membahas terkait Rancangan Undang-Undang Energi Terbarukan. Pada kertas posisi Koalisi Perempuan Indonesia (2017) akan mendorong pemenuhan kebutuhan dan akses energi masyarakat Indonesia terpenuhi dari sistem energi bersih serta inklusif secara sosial dan gender yang menciptakan peluang ekonomi dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Menurut masukan Koalisi Perempuan Indonesia pada Rancangan Undang Undang (RUU) Energi Terbarukan, perlunya memasukkan prinsip dan asas non diskriminasi, kesetaraan dan inklusivitas terhadap proses tata kelola energi. Selain itu perlunya pengelolaan energi selain dilaksanakan oleh pemerintah, badan usaha atau sektor swasta, penting sekali memasukkan komunitas.

Siloam

**DON'T TELL ME  
HOW TO DRESS  
TELL! 'EM NOT 2 RAPE  
TO**

TRA

## PART II

# Suara Perempuan dari Berbagai Wilayah: Kisah tentang Pengetahuan Lokal, dan Perlawanan Ekologis

---

### **Penulis :**

Sukaedah Dewi Mayumi, Wa Ode Indah Febriana, Mariam Lanmay, Novita Sari, Nurfauziah, Rara Yangsen, Nur Herliati Hidayah Herman, Aprianti Angelina, Asrisnawanti, dan Aisyah Sahabuddin

# Peran Perempuan Adat Luwu, Sulawesi Selatan, Dalam Upaya Preventif Atas Krisis Ekologi Akibat Tambang Emas

Oleh: Sukaedah Dewi Mayumi

Sejarah dunia tidak menampik adanya kultur bahwa sejak zaman nenek moyang, terdapat pemisahan ruang tak kasat mata antara peran laki-laki dan perempuan. Dalam konstruksi sosial, masyarakat kerap mendikotomi peran antara perempuan dan laki-laki berdasarkan biologisnya. Laki-laki dianggap sebagai manusia kuat, rasional, perkasa, sehingga layak dijadikan sebagai pemimpin. Lain halnya dengan perempuan yang dianggap lemah lembut dan emosional sehingga sering dinomorduakan dan ditempatkan dalam belunggu kerja-kerja domestik (Catahu LBH Jakarta, 2022:111).

Dalam praktik-praktik kehidupan masyarakat yang terjadi hingga hari ini, marak terjadi diskriminasi terhadap perempuan yang terlihat di dalam segala aspek masyarakat seperti aspek ekonomi, politik, pendidikan, agama, adat istiadat, dan lain-lain. Situasi ini mencerminkan bahwa kultur dalam kehidupan masyarakat yang terlihat terjadi karena semangat anti kesetaraan yang masih mendominasi (Catahu LBH Jakarta, 2022:112). Oleh karena itu, pentingnya peran perempuan di dalam segala aspek seperti peran perempuan adat pada aspek lingkungan dan ekologi.

Seperti yang telah diketahui bahwa perempuan adat dibekali pengetahuan ekologi tradisional secara turun-temurun terkait tata kelola sumber daya, konservasi hutan, pertanian dan mata pencaharian. Ketika terjadi perubahan iklim atau perusakan hutan yang berimplikasi pada lingkungan, maka yang pertama kali menjadi korban adalah perempuan. Menurut data BPS tahun 2010, Indonesia memiliki 1.128 suku, dan diperkirakan jumlah masyarakat adat sebanyak 70 juta jiwa dari 254,9 juta populasi. Estimasi 49% dari jumlah masyarakat adat adalah perempuan adat, yakni 34,3 juta jiwa (Mongabay, Eka Rusdianto: 2018).

Jika ditelaah lebih jauh, masyarakat di wilayah kabupaten Luwu masih banyak yang memegang teguh adat istiadat. Mayoritas masyarakat adat Luwu, Sulawesi Selatan, bermata pencaharian sebagai petani kebun cengkeh, petani kebun coklat, petani kebun kopi, petani persawahan dan lainnya. Namun, dalam hal wilayah yang dibutuhkan untuk mata pencaharian, tempat tinggal, dan aspek hidup masyarakat adat Luwu, terdapat ketimpangan yang terjadi dengan perusahaan pertambangan emas, yang sudah dieksplorasi sejak tahun 1990 hingga sekarang (Media Indonesia, Lina Herlina: 2021). Perusahaan tambang emas tersebut yaitu PT Masmindo Dwi Area, terletak di persimpangan Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu yang beroperasi sejak tahun 1991 hingga 2021. Terdapat polemik antara PT Masmindo Dwi Area dengan warga desa Rante Balla yang masih terjadi lantaran warga belum mendapatkan kompensasi atas lahan yang dieksploitasi sebagai tambang emas. PT Masmindo Dwi Area merupakan anak perusahaan asing asal Australia di bawah naungan perusahaan induk bernama Nusantara Resources Limited (Nusantara).

Nusantara sendiri, pada Desember 2018, berhasil bekerja sama dengan PT Indika Energy, dan berpartisipasi dalam penempatan saham baru untuk 19.9% kepemilikan di Nusantara. Kegiatan ini dilakukan demi kepentingan aktivitas eksplorasi dan pengembangan proyek Awak Mas yang bertempat di Luwu. Peran perempuan adat Luwu dalam mengadvokasi dan menjaga tanah leluhur menjadi hal yang sangat penting. Hal tersebut dapat dilakukan dengan upaya preventif atas krisis ekologi akibat pertambangan emas oleh PT Masmindo Dwi Area yang pusat induknya berada di negara tetangga kita: Australia.



Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, pada tahun 2017 jumlah perempuan sebesar 181 476,00 Jiwa. Jika dihitung berdasarkan umur yaitu:

1. 0 – 4 Tahun : 18 966,00 Jiwa;
2. 5 – 9 Tahun : 18 904,00 Jiwa;
3. 10 – 14 Tahun : 18 873,00 Jiwa;
4. 15 – 19 Tahun : 16 980,00 Jiwa;
5. 20 – 24 Tahun : 14 313,00 Jiwa;
6. 25 – 29 Tahun : 13 755,00 Jiwa;
7. 30 – 34 Tahun : 13 458,00 Jiwa;
8. 35 – 39 Tahun : 13 095,00 Jiwa;
9. 40 – 49 Tahun : 11 217,00 Jiwa;

Data di atas telah menguraikan umur-umur produktif manusia secara fisik dalam memperjuangkan ekologi lingkungan di kabupaten Luwu. Tidak hanya itu, lansia juga dapat berpartisipasi dari segi pengetahuan seperti penceritaan asal usul wilayah adat di Tanah Luwu, Sulawesi Selatan. Kendati jumlah perempuan adat yang belum terverifikasi menurut data di atas, semestinya tidak menjadi halangan untuk menghilangkan peran perempuan adat Luwu untuk berkontribusi, demi memperjuangkan kesetaraan sekaligus mencegah terjadinya kerusakan ekologi karena eksploitasi pertambangan emas. Hal yang dapat dilakukan dalam upaya preventif atas krisis ekologi, dalam hal peran perempuan adat adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pembentukan serikat perempuan adat Luwu. Eksploitasi pertambangan emas makin masif dan kuat, kekuatan perempuan adat Luwu seperti dapat berupa pemahaman terhadap hak-hak dasar yang mereka miliki dalam konteks perlindungan terhadap lingkungan. Maka dari itu, pentingnya pembentukan serikat perempuan adat dibentuk untuk menambah hubungan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Contoh : WALHI, LBH, AMAN dan organisasi lingkungan hidup.
2. Pentingnya pendidikan paralegal iklim dan ekologi pada masyarakat perempuan adat Luwu. Dibutuhkannya pendidikan paralegal iklim dan ekologi pada perempuan adat Luwu untuk mempertahankan wilayah serta mengadvokasi tempat tinggal yang sudah beratus-ratus tahun atau berabad-abad telah dimiliki oleh nenek moyang mereka. Wilayah mereka tidak dapat diganggu oleh pihak yang merusak lingkungan. Paralegal iklim dan ekologi seperti pendidikan ekofeminisme, dan hukum yang berkaitan untuk mencegah kriminalisasi terhadap masyarakat adat merupakan hal yang harus diupayakan.
3. Turut serta dalam mendukung dan mengadvokasi RUU Masyarakat Adat, peran perempuan adat Luwu sangat dibutuhkan dalam mengadvokasi RUU Masyarakat Adat. Hal tersebut berhubungan dengan kondisi dan harapan masyarakat adat di Indonesia yang berkaitan dengan upaya preventif jika terjadi kriminalitas pada masyarakat adat. Perempuan adat tidak hanya memiliki hak yang sama dengan laki-laki, tetapi perempuan adat juga memiliki hak dan turut andil dalam menjaga jati diri dan mempertahankan identitas negara demi kemaslahatan banyak pihak terutama pada masyarakat adat, lingkungan dan seluruh makhluk hidup di alam.

Peran perempuan adat juga dapat dikolaborasi dengan tindakan tanggung jawab Negara yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pemetaan secara berkala pada wilayah kabupaten Luwu. Pemetaan pada wilayah, penduduk, masyarakat adat Luwu, Sulawesi Selatan menjadi hal yang penting dilakukan karena setiap masyarakat adat terutama perempuan adat Luwu memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda-beda. Pemetaan dapat dilakukan dengan berkunjung ke daerah tersebut secara langsung dan melakukan upaya pendekatan terhadap warga sekitar untuk turut andil menjaga kelestarian lingkungan agar dapat menikmati udara, air, tempat tinggal yang bersih dan layak. Mengacu pada UUD 1945 pasal 28H ayat (1): setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”, oleh sebab itu menjaga lingkungan bukan hal yang dilakukan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab dari masyarakat adat, rakyat, pemerintah, dan semua kalangan.

## Wakinamboro: Sosok Gaia Yang Terjajah Di Tanahnya Sendiri

Oleh: Wa Ode Indah Febriana

Sastra, kehidupan dan sosial memiliki hubungan timbal balik (Wellek dan Warren, 1993:109). Mitos kecantikan, salah satu konstruksi sosial yang tanpa disadari telah melemahkan posisi perempuan sejak dahulu kala tergambarkan dengan sangat jelas di dalam karya sastra. Teks sastra yang tersebar di seluruh penjuru nusantara juga merekam proses standar kecantikan wanita Indonesia yang ditetapkan dalam satu kata: 'putih'. Saraswati memperlihatkan dengan jelas bagaimana standar 'putih' tersebut digunakan sebagai metafora yang melekat pada kecantikan, kemurnian, dan kebaikan, sedangkan 'hitam' akan menjadi metafora untuk segala sesuatu yang menakutkan, bencana, duka, dan kejahatan (Saraswati, 2013: 48-52).

Selain mitos kecantikan yang pada akhirnya berkembang menjadi standar kecantikan bagi banyak kaum perempuan, teks-teks sastra juga mendokumentasikan hubungan perempuan dan alam. Relasi-relasi antara perempuan dan alam ini terlihat dengan sangat jelas di dalam beberapa karya sastra yang tersebar dan merupakan ciri khas suatu kelompok masyarakat. “Petir yang menggelegar” ketika ibu memanjatkan doa di dalam cerita Malin Kundang, memperlihatkan bagaimana alam bekerja sama dengan kekecewaan perempuan sebagai seorang ibu yang tidak diakui oleh anaknya.

Namun, ada sisi lain dari pendokumentasian posisi perempuan dalam teks-teks sastra tersebut. Tanpa disadari teks sastra itu tidak hanya mendokumentasikan posisi perempuan sebagai pendukung para pemimpin ataupun seorang ibu dari seorang anak yang tidak berbakti, tetapi juga mendokumentasikan posisi perempuan yang masih menjadi kelompok subordinasi dan tidak memiliki kuasa bahkan atas dirinya sendiri. Masyarakat Buton yang telah mewarisi khazanah kesusastraan sejak kurang lebih 500 tahun, juga memiliki karya-karya sastra yang memperlihatkan posisi perempuan dalam tatanan masyarakat, salah satunya adalah relasi perempuan dan alam.

Dari sekian banyak tokoh perempuan yang tercantum dalam cerita rakyat masyarakat Buton yang telah terdokumentasikan, terdapat satu nama tokoh yaitu Wakinamboro. Tokoh ini jarang menjadi tokoh utama di dalam sebuah cerita, meski sosok ini ternyata memberi klimaks pada setiap cerita. Wakinamboro merupakan tokoh perempuan yang dikisahkan sebagai sosok antagonis, tetapi memiliki hubungan yang erat dengan alam.

Sosok Wakinamboro yang diceritakan sebagai tokoh yang memiliki kuasa atas alam secara jelas tetapi teracuhkan, merupakan tokoh perempuan yang mengalami diskriminasi di dalam cerita. Ketika nilai-nilai pelestarian atau penjagaan terhadap alam di dalam cerita rakyat Buton disandingkan dengan nilai-nilai



patriarki, Wakinamboro akan dihadirkan sebagai sosok yang menjaga alam tersebut dengan kebengisan. Tokoh ini tidak akan segan-segan melukai bahkan membunuh siapa pun yang berani memasuki hutan atau memetik hasil alam yang disebutkan sebagai wilayah teritorialnya. Hal ini sangat jauh berbeda dengan citra yang ditangkap oleh masyarakat ketika mendengar nama Dewi Sri. Sosok Dewi Sri atau dewi kesuburan ini, selalu digambarkan sebagai sosok perempuan cantik dan berbudi pekerti luhur.

Tokoh Wakinamboro dalam kebudayaan masyarakat Buton adalah sebuah penggambaran jelas bagaimana perempuan harus memenuhi peran memelihara, merawat alam, sekaligus memenuhi standar kecantikan perempuan yang mengharuskan sifat keibuan hadir dengan karakter feminim seutuhnya. Tokoh Wakinamboro di dalam setiap cerita dihadirkan sebagai sosok yang memiliki kuasa atas sumber daya alam, bahkan diceritakan sebagai pemilik buah-buahan dan pohon-pohon besar. Sosok ibu bumi jelas tergambar di dalam tokoh Wakinamboro, namun ia digambarkan sebagai tokoh yang memiliki suara besar, badan yang besar, memiliki bau yang tidak sedap, dan sifat yang garang. Aspek caring yang dilekatkan pada perempuan haruslah hadir bersama, kelembutan, kelemahan, dan juga keindahan diri seorang perempuan, jika ia ingin menjadi sosok yang memberikan nilai positif dalam sebuah karya sastra.

Budaya kental patriarki yang didukung oleh mitos kecantikan yang membentuk sebuah pola pikir bahwa seorang perempuan yang memiliki tubuh sintal dan wajah yang rupawan, adalah perempuan yang mampu memberikan positive value pada masyarakat. Berlawanan dengan itu, sosok perempuan yang memiliki perawakan tidak memenuhi standar kecantikan dalam mitos kecantikan tersebut, adalah perempuan yang tidak memiliki positive value. Padahal, jika kita menyelami cerita yang menjadikan Wakinamboro sebagai tokoh, kemarahan tokoh ini disebabkan oleh orang-orang yang mengambil hasil alam sekitar tanpa izin.

Tokoh Wakinamboro memperlihatkan citra perempuan di dalam kebudayaan patriarki yang tidak bisa dimungkiri masih hidup dan langgeng hingga hari ini. Padahal jika membaca cerita-cerita yang menyebutkan Wakinamboro sebagai tokohnya ataupun cerita-cerita lisan yang diwariskan oleh masyarakat Buton, Wakinamboro memiliki ikatan yang sangat kuat dan dekat dengan alam. Hak milik pada sumber daya alam di sekitarnya mampu mengendalikan kekuatan alam untuk memberikan hukuman kepada pihak yang mencoba untuk mengganggu sumber daya alam yang merupakan hak miliknya, adalah penggambaran yang cukup memperlihatkan bahwa tokoh Wakinamboro merupakan tokoh perempuan di dalam cerita yang juga memiliki kedekatan yang erat dengan alam. Kendati demikian, Wakinamboro bukanlah tokoh perempuan yang dihadirkan untuk membuat kagum para penikmat cerita ini. Dia hadir sebagai tokoh jahat dalam cerita sehingga terdapat penggambaran yang berbeda tentang tokoh ini, dengan sebagian besar tokoh perempuan dalam cerita rakyat nusantara yang diceritakan memiliki kedekatan terhadap alam.

Citra sebagai Gaia atau ibu bumi tetap melekat pada Wakinamboro, sebagai pemberi dan juga pelestari kehidupan. Namun, Wakinamboro adalah sosok Gaia yang terdiskriminasi karena fisik dan perilaku yang dianggap tidak memenuhi standar sebagai perempuan yang cantik atau tidak mencerminkan femininitas dari seorang perempuan. Nilai sakral bumi yang diyakini oleh ekofeminisme spiritual terlihat sangat mengagungkan perempuan yang mampu melahirkan dan memelihara hidup yang baru. Tidak hanya membebankan tugas untuk mengatasi permasalahan krisis ekologi pada satu kelompok saja, dikarenakan dasar pemikiran bahwa semua makhluk hidup dan alam adalah satu kesatuan, tetapi juga memiliki nilai dan kekuatan untuk menjaga alam semesta. Wakinamboro yang hadir di dalam cerita dengan perwatakan yang tidak lemah lembut dan tidak cantik dalam kacamata patriarki, seharusnya tidak dicitrakan sebagai tokoh yang sepenuhnya jahat dan tidak memiliki nilai kebaikan di dalamnya.

Diskriminasi tersebut hadir oleh karena pola pikir masyarakat yang hingga saat ini masih berdasar pada pola pikir masyarakat patriarki. Selama ini, perempuan yang dikatakan memiliki hubungan dengan alam, secara spiritual berdekatan dengan mitos bumi sebagai sosok seorang “ibu” dengan karakter melahirkan dan memberi perawatan. Namun, semua itu tidak otomatis memberikan hak penuh kepada perempuan

untuk menentukan hidupnya sendiri, padahal mereka terdengar sangat powerful terhadap hidup itu sendiri. Hubungan istimewa tersebut seakan-akan tidak memiliki arti apa-apa jika telah dihadapkan dengan sebuah sistem yang masih memberikan kuasa penuh kepada laki-laki. Wakinaboro adalah salah satu contoh dari pola tersebut.

Perempuan akan terlihat perempuan seutuhnya jika dihubungkan dengan alam, adalah perempuan yang tidak menentang aturan apa pun yang telah ditetapkan oleh sistem, bahkan berlapang dada untuk menumbalkan dirinya jika hal tersebut berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Pada titik inilah ekofeminisme bekerja, spiritualitas yang berorientasi pada bumi bekerja sama dengan pandangan bahwa sifat maskulin dan feminim itu ada pada kedua gender. Krisis ekologi bukan hanya karena sifat maskulinitas yang mendominasi dan tidak juga hanya dapat teratasi dengan sifat-sifat feminim saja. Peran perempuan yang lebih berdekatan dengan alam secara tidak langsung diposisikan sebagai penyelamat dirinya sendiri yang adalah korban (Endraswara, 2016:223). Cerita Wakinaboro yang telah diperdengarkan kepada anak-anak masyarakat Buton, akan terus menjadi sosok Gaia yang terpinggirkan di tanah yang dia lindungi. Kesadaran bahwa kewajiban melestarikan dan memanfaatkan alam dengan bijak tidak hanya menjadi tanggung jawab kaum perempuan saja, tetapi juga semua manusia tanpa terkecuali.

## Upaya Kreatif Perempuan Meminimalisir Sampah Sepanjang Pantai Teluk Mutiara

Oleh: Mariam Lanmay

Kehidupan manusia tidak terlepas dari lingkungan tempat beradaptasi, maka manusia dan lingkungan saling bergantung. Lingkungan memberikan hidup pada manusia dan manusia harus merawat dan memelihara lingkungan dengan baik. Perempuan yang sebagian besar berperan sebagai ibu rumah tangga, tidak terlepas dari proses pemanfaatan segala sesuatu di lingkungan untuk merawat kehidupan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai kaum perempuan punya peran penting dalam merawat lingkungan hidup di sekitarnya.

Dikutip dari materi feminist political ecology dalam Sekolah Perempuan dan Ekologi, menyebut bahwa alam dan perempuan adalah dua hal yang memiliki hubungan yang sangat erat, aspek caring atau memelihara alam dan seluruh ekosistem. Ketika berbicara mengenai pemanfaatan sumber daya yang tersedia, kelompok perempuan yang dikatakan sebagai kelompok masyarakat yang merepresentasikan alam tersebut tetap saja tidak memiliki akses dan pada akhirnya tidak bisa mendapatkan manfaat dari alam tersebut. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan dunia adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan.

### Persoalan Sampah

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2020, wilayah laut Indonesia tercemar oleh 1.772,7 gram sampah per meter persegi ( $g/m^2$ ). Secara keseluruhan 5,75 juta ton dari luas laut 3,25 juta  $km^2$ . Sampah-sampah tersebut berasal dari daratan dengan sampah plastik terbanyak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia secara keseluruhan masih belum sadar akan pentingnya penertiban sampah-sampah yang dihasilkan, baik dari rumah tangga maupun pabrik. Pemerintah juga belum dapat melakukan langkah tegas dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi penyebaran sampah di laut maupun di daratan. Maka hal ini butuh kesadaran bersama seluruh masyarakat untuk memanfaatkan sampah secara baik.

Di Kabupaten Alor, sebagian penduduk bermukiman di dataran rendah atau pinggiran pantai teluk Mutiara. Pusat perbelanjaan di kota ini tidak jauh dari pantai, sehingga penduduk pinggiran pantai cukup



padat. Sebagian perempuan yang berada di pinggiran pantai bekerja sebagai penjual ikan dan menenun. Namun kenyataannya dari dapur rumah tangga menghasilkan sampah-sampah yang mencemari lautan teluk. Sedangkan teluk sendiri juga menjadi tempat mencari ikan bagi nelayan di pinggiran pantai ini.

Perairan laut teluk Mutiara menjadi tercemar dengan sebagian besar sampah yang berasal dari daratan. Ada yang sengaja dibuang langsung ke laut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan juga sebagian dibawa air sungai ke laut, serta ada juga yang dibawa oleh angin ke laut. Penyebaran sampah secara umum di areal teluk Mutiara yaitu sampah kertas dan katun 37%, Logam 7%, Gelas 2%, Sampah halaman dan dapur 8%, kayu 3%, plastik, Karet dan kulit 40%, lain - lain 4% (Plaimo, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa perairan teluk tercemar dengan berbagai sampah daratan dan sampai saat ini, belum teratasi dengan baik.

### *Peran Perempuan*

Masalah serius ini mendapat perhatian khusus dari Thresher Shark Indonesia (TSI) Kabupaten Alor dengan menjadikan lokasi penghasil sampah terbanyak dekat perairan teluk. Mereka mendorong ibu-ibu di pinggiran pantai mengolah sampah. Media online Super Alor (2022) menjelaskan bahwa TSI melakukan pelatihan pembuatan pupuk bokasi dari sisa sampah dapur berupa sayur dan buah. Selain itu, mereka juga telah melakukan pelatihan pembuatan keranjang dan pernak - pernik dari sampah-sampah plastik. Kehadiran program tersebut membuat ibu rumah tangga tertarik mengikuti pelatihan karena persoalan sampah merupakan hal yang ada disekitarnya. Sampah dapat diolah menjadi sumber ekonomi diri sendiri dan keluarga. Tentu mereka mengharapkan agar terus didampingi oleh TSI hingga bisa mandiri dalam pengelolaan sampah.

Aktivitas yang dilakukan oleh perempuan-perempuan sebagai ibu rumah tangga akan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan juga memberi dampak ekonomi bagi keluarga. Jika semua perempuan dengan tekun dan terus melakukan hal tersebut, maka dalam kurun waktu 5 atau 6 tahun mendatang, perairan teluk mutiara memiliki peluang bebas dari sampah. Seorang ibu juga dapat mengingatkan secara berulang ke anggota keluarganya agar tidak dengan sembarangan membuang sampah, baik di darat maupun di laut. Dengan demikian, peran perempuan dalam memberantas sampah-sampah di perairan teluk sangat efektif dan dibutuhkan dalam merawat lingkungan hidup.

Usaha menghilangkan sampah yang mencemari laut akan melindungi semua biota laut serta terjaga kehidupan dan keindahannya. Tentu dengan perempuan sebagai penggerak perubahan dapat menghentikan pengaliran sampah ke laut teluk melalui pengolahan sampah rumah tangga secara baik yang lebih bermanfaat untuk kehidupan keluarga.

### *Referensi*

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. Target Pengurangan Sampah Hanya Tercapai 14,17% pada 2020. Online, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/09/klhk-target-pengurangan-sampah-hanya-tercapai-1417-pada-2020>, Diakses tanggal 12 Desember 2022.
- Plaimo, Paulus, E. 2018. Status Pencemaran Perairan Teluk Mutiara. Yogyakarta: Q-Media.
- Super Alor. 2022. Mendukung Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Kalabahi Timur. Online, <https://superalor.com/2022/02/20/super-alor-mendukung-pelatihan-pemberdayaan-ekonomi-perempuan-di-kelurahan-kalabahi-timur/>, Diakses tanggal 12 Desember 2022.

# Krisis Iklim, Perkawinan Anak, Dan Ancaman Kemiskinan Di Desa Pulau Raman

Oleh: Novita Sari

Perubahan iklim yang ditandai dengan mencairnya bongkahan-bongkahan es di kutub, turut pula dialami di Jambi. Kondisi ini ditandai dengan bergesernya musim dan peningkatan suhu di sekitar kita. Jambi sebagai etalase bentang alam yang lengkap meliputi dataran tinggi pada wilayah bagian barat, dataran rendah di wilayah timur, dan dataran sedang di wilayah bagian tengah. Tidak hanya itu, Jambi juga memiliki area mangrove, gambut, sungai terpanjang di Sumatera, hingga memiliki 4 taman nasional meskipun secara umum kini memiliki masalahnya masing-masing.

Dengan total luas wilayah mencapai 50,160.05 kilometer persegi, kondisi alam Jambi yang semakin rusak dengan ditandai keberulangan kebakaran hutan, berkurangnya tutupan lahan hingga kondisi pertanian masyarakat yang semakin memprihatinkan. Salah satu tempat yang dapat menjawab kondisi ini adalah Desa Pulau Raman Kec. Pelayung Kab. Batanghari Provinsi Jambi.

Terdapat 5 RT di desa Pulau Raman, dengan jumlah penduduk mencapai 1.253 jiwa. Secara sepiintas tidak banyak yang berbeda dari desa ini, akan tetapi jika ditelisik lebih dalam akan sangat kentara terlihat. Akses jalan menuju desa ini harus melewati sungai sepanjang 150 meter dengan menggunakan perahu.

Tercatat di desa hanya memiliki 1 sekolah dasar, TK, Paud, dan madrasah Ibtidaiyah. Sedangkan untuk melanjutkan pendidikan anak-anak harus menempuh perjalanan yang jauh diluar desa. Masyarakat desa pun hanya 256 jiwa yang tercatat menyelesaikan pendidikan di tataran sekolah dasar (survei beranda perempuan, Januari 2021). Dengan kondisi tersebut, tidak banyak pilihan bagi masyarakat desa. Rata-rata kepala rumah tangga di desa Pulau Raman bekerja sebagai petani, buruh kelapa sawit, dan buruh getah sedangkan para perempuan (istri) menjadi petani padi dan pangan.

## *Perkawinan anak di desa Pulau Raman*

Akibat krisis iklim yang berakibat pada pertanian desa yang sering mengalami gagal panen, membuat anak-anak di desa Pulau Raman tidak memiliki banyak kesempatan untuk menempuh pendidikan. Beranda Perempuan mencatat, pada tahun 2020 telah terjadi 2 kali gagal panen yang dialami petani perempuan disana. Kegagalan panen padi akibat banjir yang tidak terduga akibat naiknya permukaan air sungai, serta gagal panen tanaman pangan (kacang panjang, cabai, labu manis, dan kangkung) oleh berbagai faktor.

Vandana Shiva dalam bukunya Ecofeminism menyebutkan penempatan perempuan dalam tatanan sosial telah mendiskriminasi perempuan dalam posisi yang tidak memiliki skill, tidak terdidik, mendiskriminasi perempuan terhadap akses tanah, teknologi, dan lapangan kerja. Konsep budaya patriarki telah menempatkan apa-apa yang dilakukan perempuan bukan sebagai skill namun hanya dilihat sebagai kebiasaan saja.

Di desa pulau raman, kelompok petani perempuan bagian hulu dan hilir yang merupakan kelompok perempuan yang dibentuk secara organik sering mengeluhkan akses bibit dan pengelolaan lahan pertanian. Kejadian gagal panen dan ketidakstabilan pendapat yang diterima oleh para suami yang menjadi buruh menyebabkan keterbatasan ekonomi untuk menyekolahkan anak-anak mereka, terutama anak perempuan.

Dalam kondisi ini, anak-anak perempuan menjadi lebih rentan untuk dikawinkan. Di desa Pulau Raman, selain akses pendidikan yang sulit kondisi ini membuat anak perempuan tidak memiliki pilihan. Ketika



tamat SMP rata-rata mereka menikah di usia anak. Hal ini yang menguatkan penyumbangan angka perkawinan anak di Provinsi Jambi yang 4,2% lebih tinggi dibanding angka nasional (Plan Indonesia). Sedangkan data dari Susenas mencatat Jambi termasuk 3 Provinsi dengan angka kenaikan perkawinan anak tertinggi di Indonesia pada tahun 2019.

Survei internal Beranda Perempuan mencatat, anak-anak perempuan yang mengalami perkawinan di usia anak menjadi lebih rentan terhadap kasus kekerasan. Dalam wawancara yang dilakukan pada tahun 2021 lalu setidaknya terdapat 5 orang perempuan yang mengaku mendapat kekerasan dari suaminya, mengalami penelantaran, hingga memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batanghari angka kemiskinan daerah ini cukup tinggi, mencapai 10,05% atau sekitar 27.240 orang pada tahun 2022. Kondisi ini kontekstual dengan apa yang terjadi di desa Pulau Raman. Akibatnya, makin sedikit harapan anak-anak di desa Pulau Raman untuk dapat memutus rantai kemiskinan yang menjadi rantai setan perputaran kondisi yang memiskinkan mereka.

Menteri KEMENKO PMK, Muhadjir Efendy pada (25/9/2021) dalam sebuah seminar berujar bahwa pembangunan generasi emas Indonesia harus dimulai sejak dini, salah satunya dengan mencegah perkawinan anak. Perkawinan anak menurutnya akan menyebabkan terampasnya masa depan dan cita-cita anak yang mengakibatkan ketidakadilan antar generasi.

Namun, permasalahan perkawinan anak haruslah dilihat sebagai permasalahan sistemik yang muncul akibat dari kondisi alam yang semakin terpuruk (krisis iklim) yang mengakibatkan para petani mengalami gagal panen, membuat para perempuan memiliki beban ganda dalam menjalankan peran sebagai petani, ibu, dan istri di rumah. Akibatnya anak-anak terutama anak perempuan rentan dianggap sebagai beban keluarga hingga dinikahkan, atau dalam konteks lain si anak berpikir untuk membantu orang tua untuk keluar dari jerat kemiskinan dengan memulai hidup baru sebagai tanggung jawabnya sendiri. Akan tetapi hal ini justru akan melahirkan kondisi baru yang lebih memprihatinkan, mereka justru lebih besar berpotensi mengalami KDRT, ketidaksiapan dalam organ seksual, hingga melahirkan keluarga dan masyarakat miskin baru.

Dengan kondisi tersebut, ancaman kemiskinan masyarakat di desa Pulau Raman semakin nyata, masyarakat tidak lagi menjadikan pertanian sebagai komoditas utama, sehingga para perempuan kini banyak pula yang beralih menjadi buruh, masyarakat desa juga mengalihkan pertanian padi dan pangan menjadi kelapa sawit, hal ini tentu memicu permasalahan baru yang juga tidak melepaskan mereka dari kemiskinan.

## Relasi Perempuan Adat Karampuang Dalam Menjaga Hutan

Oleh: Nurfauziah

Daerah karampuang merupakan daerah perkampungan tradisional yang terletak di kabupaten Sinjai, Sulawesi selatan yang menyimpan banyak sejarah dan keunikan tersendiri di daerah tersebut. Bukan hanya keunikan rumah adatnya yang bersimbol feminitas tapi berbagai upacara adat yang dilakukan untuk menjaga hutan. Masyarakat adat karampuang sendiri meyakini bahwa asal mula adanya daratan di Sinjai berawal dari Karampuang.

Dalam buku Hanuae Karampuang konon, karampuang ini berasal dari adanya suatu peristiwa besar yakni munculnya seseorang yang tak dikenal dan dikenal sebagai To Manurung yang di atas sebuah bukit yang saat ini dikenal dengan nama Batu Lappa. Dahulu daerah ini merupakan wilayah lautan dan hanya ada daratan yang muncul ke permukaan, termasuk karampuang. Daratan yang tersembul itu dinamakan Cimbolo yakni daratan yang muncul layaknya tempurung yang tersembul di atas permukaan air. Di puncak

Cimbolo inilah muncul Tomanurung yang akhirnya digelar Manurung Karampulue. Dalam bahasa lokal, karampulue bermakna seseorang yang karena kehadirannya menjadikan bulu kuduk warga berdiri. Setelah Menurung Karampulue di angkat oleh warga untuk menjadi pemimpin maka ia memimpin warga untuk membuka lahan dan mencetak sawah-sawah yang menjadi mata pencaharian masyarakat Karampuang hingga saat ini. Lambat laun nama Karampulue ini berubah menjadi Karampuang karena daerah ini menjadi persinggahan bangsawan-bangsawan Gowa yang bergelar Kareng dan Bangsawan Bone yang bergelar Puang. Manurung Karampulue ini tak lama memerintah beliau menghilang di tempat ia memunculkan diri pertama kali kepada warganya. Sebelum menghilang Manurung Karampulue ini berpesan “elokka tuo tea mate, elokka madeceng tea meja” yang berarti saya ingin hidup tak mau mati, saya ingin kebaikan dan menghindari keburukan. Tak lama setelah menghilangnya Manurung Karampulue, tiba-tiba muncul tujuh Tomanurung yang berjumlah tujuh orang dan salah satu di antaranya adalah perempuan. Kehadiran tujuh Tomanurung ini diawali dengan kemunculan tujuh cahaya terang di atas busa-busa air. Tomanurung perempuan ini kemudian di daulat menjadi pemimpin Karampuang dan enam Tomanurung lainnya diperintahkan untuk memimpin wilayah lain.

Dalam struktur Adat Karampuang terdapat sejumlah jabatan penting, berdasarkan buku Hanua Sinjai terdapat empat anggota Dewan Adat yang terdiri atas Aruang, Adek, Sanro, dan Guru. Empat anggota dewan adat adalah legislatif yang merupakan tiang penopang keutuhan negeri dengan prinsip kerja “eppak alliri tetepokna hanuae” yang bermakna “empat tiang penyokong negeri”. Menurut buku Hanuae Karampuang kesatuan pemangku adat ini digambarkan sebagai empat elem kehidupan yaitu Api tetong Arung, tana tudang ade', Anging Recko Sandro, Wae Euju Guru. Sebagai penguasa dan mengayomi rakyatnya, padanya diletakkan simbol api yang harus menyala sebagai sumber cahaya dan kehidupan bagi rakyatnya. Gella sebagai pelaksana harian lembaga adat di simbolkan sebagai tanah tempat berpijak karena ia tidak boleh lelah bekerja demi kemaslahatan rakyat dan harus selalu duduk bermusyawarah dengan warga untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sandro sebagai penjaga negeri dan rakyat yang harus selalu memohon kesehatan dan kedamaian sebagai angin yang selalu bersujud. Adapun Guru yang bertugas sebagai penanggung-jawab keagamaan di simbolkan sebagai air yang mensucikan.

Wilayah adat karampuang adalah sebuah kawasan yang terletak sekitar 31 km dari arah barat ibukota Kabupaten Sinjai. Secara administratif, kawasan adat karampuang berada di tiga desa yaitu Desa Tompobulu, Desa Bulutellue dan Desa Duampanuae, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai. Namun, sebagian besar kawasan adat ini berada dalam Desa Tompobulu. Wilayah Adat Karampuang memiliki luas 2.656 ha. Berdasarkan pembagian administrasi pemerintahan, Wilayah Adat karampuang ini berlokasi di beberapa desa yaitu; Duampanuae 302.1 ha, Bulu Tellue 16.4 ha, dan Tompobulu 2260.9 ha. Dusun Karampuang sendiri merupakan bagian dari Desa Tompobulu dan termasuk dalam kawasan Wilayah Adat Karampuang dan memiliki luas 262.7 ha. Berdasarkan data umum Dusun karampuang dari sensus Rumah Tangga dari Tim Sekolah Lapang Karampuang tahun 2019, jumlah penduduk di Dusun Karampuang terdapat 382 dengan jumlah perbandingan Perempuan 51,57% dan Laki-laki 48,43%. Mayoritas pekerjaan masyarakat Karampuang adalah sebagai Petani, tanaman yang ditanam seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan beberapa jenis sayuran, buah-buahan dan tanaman perkebunan. Masyarakat Karampuang juga beternak Sapi, kerbau, kambing dan ayam. Di samping itu, ada juga yang berprofesi sebagai buruh migran, PNS dan pedagang.

Menurut Strong (1995) kunci untuk memperbaiki bumi terletak pada penghormatan terhadap hukum alam yang dipahami oleh masyarakat asli tradisional. Masyarakat ini berbicara dengan kumpulan instruksi yang asli yang diberikan kepada mereka oleh Sang Pencipta. Mereka mengetahuinya dan menghidupi hukum ini, yang menuntun relasi manusia dengan empat elemen pemberi kehidupan, yakni, tanah, air, udara dan api (energi), serta mengajarkan penghormatan kepada kesatuan dan kesinambungan dari seluruh kehidupan;”tidak ada jalan lain untuk perdamaian kecuali semua orang harus meninggalkan gerbang istana persepsi yang relatif, turun ke padang rumput, dan kembali ke jantung alam yang non-aktif. Marilah kita katakan bahwa kunci perdamaian terletak dekat di bumi. Hal tersebut secara praktek di



lakukan oleh masyarakat Karampuang dalam menjaga Hutan dan Alam mereka dengan pengetahuan lokal dalam mengelola Hutan dan Alam mereka masih tetap patuh pada aturan tertulis yang diwariskan oleh leluhur mereka yang disebut dengan pappaseng atau paseng. Bagi warga Karampuang pappaseng dipandang suci dan sakral, bahkan menjadi sumber hukum dan peraturan yang mengatur warga Karampuang.

Pappaseng tersebut berisi bahwa, seluruh penduduk yang tinggal di Karampuang memiliki kewajiban dan tanggung jawab penuh untuk memelihara dan menjaga kelestarian hutan sama halnya menjaga keluarga sebab kalau hutan mengalami kerusakan maka penduduk pun akan mengalami kerusakan atau kecelakaan. Hal tersebut jelas bagi Masyarakat Karampuang hutan adalah keluarga mereka menjaga hutan haruslah bagai menjaga keluarga agar hidup mereka bisa berjalan aman, damai dan sejahtera. Masyarakat karampuang dalam menjalani kehidupan hari-hari terikat dengan keyakinan kepercayaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya keyakinan dan kepercayaan itu tetap ada dalam diri mereka sebagai jawaban dari aktivitas pertanian mereka sehari-hari yang selalu dihindangi pertanyaan akan kelangsungan hidup mereka dalam mengolah tanah. Sebagai masyarakat tani, tanah dan air merupakan bagian yang terpisahkan dari kehidupan mereka. Fungsi tanah juga menjadi sangat penting dan urgent, serta menempati posisi yang sangat terhormat itu sebabnya diperlukan upacara khusus sebagai wujud ungkapan terima kasih mereka terhadap alam.

Peran Perempuan Adat Karampuang dalam menjaga kelestarian hutan alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, dengan adanya Sandro dalam tata pemerintahan Adat Karampuang yang salah satu tugasnya adalah memimpin upacara adat Mappogau Sihanua dan ritual-ritual Adat lainnya. Mappogau Sihanua adalah upacara adat yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Karampuang yang telah habis panen, sebagai masyarakat yang masih mempertahankan Pappaseng leluhur mereka dengan budaya pertaniannya hingga saat ini budaya tersebut masih bertahan. Meskipun, pernah terjadi konflik antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat Karampuang tentang pemanfaatan kawasan hutan namun, hingga saat ini mereka tetap menantikan kebijakan pemerintah untuk segera mengakui hutan adat mereka sebagai kekayaan milik mereka yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada dewan adat sebagai tuntutan dari Pappaseng yang mereka diwarisi secara turun temurun. Bagi perempuan adat Karampuang hutan adalah sebagai apotik, pasar dan kehidupan yang lain. Oleh karena itu mereka menganggap hutan adalah keluarga dan harus menjaga kelestarian hutan layaknya menjaga keluarga. Hal yang menarik juga dalam masyarakat adat Karampuang adalah makna simbolik arsitektur rumah adat yang mengandung makna bahwa perempuan adalah sumber kehidupan manusia sama halnya dengan alam sebagai sumber kehidupan masyarakat adat Karampuang.

## Srikandi Pesisir Dalam Kungkungan Pembangunan Dan Pengelolaan Kota Makassar

Oleh: Rara Yangsen

Pembangunan dan pengelolaan tata ruang yang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah menjadi topik yang masih selalu dipersoalkan. Di satu pihak, ada yang terus mengoreksi kehambaraan partisipasi masyarakat dalam aturan dan kebijakan wilayah. Pihak lainnya, pandangan kepada pemerintah yang tidak aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat juga menjadi masalah yang besar. Hal ini terus menjadi perdebatan yang tiada henti-hentinya, apalagi melihat pembangunan dan pengelolaan terutama kota memberi dampak yang besar bagi kehidupan perempuan di dalam berbagai aspek.

Ditinjau dari segi geografis, kota dapat diartikan suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Kehidupan kota selalu diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan bercorak materialistis. Penataan ruang kota yang bijaksana tentu saja adalah penataan yang mengedepankan kualitas lingkungan yang terjaga dengan baik untuk mewujudkan ruang

wilayah yang aman, nyaman, dan produktif.

Masyarakat yang hidup di daerah laut atau yang disebut sebagai masyarakat pesisir sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Kendati hidup di wilayah pesisir yang seyogyanya menjadikan nelayan sejahtera karena kekayaan laut Indonesia yang melimpah, nyatanya, kehidupan masyarakat di wilayah pesisir masih banyak yang berada di bawah garis rata-rata. Kemiskinan, sumber daya yang terbatas, ruang kelola yang semakin sempit, pengelolaan limbah dan sampah di laut, menampakkan corak kehidupan masyarakat pesisir yang terabai dan terasing. Hal ini tidak lain merupakan pengaruh dari pembangunan dan pengelolaan kota yang selalu, sedang, dan terus diusahakan.

### *Titik balik Kota Kajian Feminis*

Persepsi 'kota' tidak lepas dari pembangunan infrastruktur fisik yang berkelanjutan. Terlihat berbagai infrastruktur di wilayah pesisir seperti Makassar New Port (MNP), Center Point of Indonesia (CPI), atau yang sementara dicanangkan yaitu pembangunan Rel At Grade: jalur rel kereta api menyentuh tanah. Hal ini merupakan salah satu langkah yang kerap diambil oleh pemerintah demi perluasan pembangunan ekonomi. Namun, tanpa rumusan kebijakan pembangunan dan pengelolaan kota yang berwawasan lingkungan, tentu saja kebijakan-kebijakan yang ada malah akan membawa dampak buruk pada kualitas lingkungan hidup.

Keterkaitan antara perempuan dan alam yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan dampak dari pembangunan kota terhadap perempuan menjadi instruksi yang berjalan saling mempengaruhi. Penindasan terhadap alam dan penindasan terhadap perempuan menjadi suatu konsep yang saling berkaitan. Pada tataran ini, perempuan dan alam kerap kali sama-sama dijadikan sebagai objek yaitu sama-sama mengalami penindasan, sama-sama mengalami kerusakan meskipun dalam konsep yang berbeda dan sama-sama mengalami dampak yang serius.

Ekofeminis (sosialis) memandang bahwa kerusakan alam secara langsung maupun tidak langsung tidak terlepas dari paham antroposentrisme yang berpangkal dari sistem kapitalis yang dihasilkan oleh budaya patriarki. Hal ini juga dikaitkan dengan sikap yang melekat pada karakter maskulin. Cara berpikir patriarki, dualistik, dan menindas telah berakibat pada rusaknya alam dan kaum perempuan sebab perempuan dinaturalisasi (dialamiahkan) dan alam difeminisasi (dianggap perempuan), sehingga tidak jelas kapan penindasan satu berakhir dan kapan yang lain mulai karena saling berkaitan satu dengan yang lain.

### *Srikandi Pesisir*

Melaut bagi perempuan nelayan tidak hanya untuk bertahan hidup tetapi juga upaya untuk mengedepankan sikap tegar dalam menghalau segala rintangan demi keberlangsungan pemenuhan kebutuhan keluarga. Hal ini adalah potret dari kekuatan srikandi perempuan yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah demi kemajuan kota sering kali tidak mengedepankan persoalan lingkungan yang mengakibatkan perubahan iklim yang besar. Kaum perempuan yang memiliki tugas dan peran ganda dalam keberlangsungan hidup keluarga berpotensi mengalami dampak signifikan. Terlihat dari tugas dan peran perempuan sebagai istri dan sebagai ibu untuk mengelola kebutuhan pangan menjadi terganggu karena keterbatasan jumlah gizi yang tersedia bagi setiap anggota keluarga.

Kerap pembangunan yang diprakarsai juga tidak melibatkan perempuan. Pada akhirnya, perempuan akan rentan dalam segala bahaya. Berkaca dari pembangunan infrastruktur MNP di Kelurahan Tallo, Kelurahan Buloa dan Kelurahan Camba. Sejak saat itu aktivitas reklamasi pesisir tallo untuk proyek pembangunan MNP mulai dilaksanakan, terlihat dari penimbunan laut yang terus menerus dilakukan. Begitu pula dengan kawasan pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) yang hanya berjarak 100 Meter dari



tempat tinggal warga Pulau Lae-lae. Proyek-proyek tersebut merampas ruang kelola perempuan pesisir sebagai pembantu peningkatan ekonomi keluarga yang menggantungkan hidup dan kehidupannya di laut.

Dampak dari pembangunan seperti cuaca yang ekstrim dan kenaikan permukaan air laut membuat perempuan nelayan memiliki kecemasan yang tinggi ketika melaut. Hal ini diperparah dengan hasil tangkapan jala yang menurun dan tidak menentu karena komoditas ikan yang tidak ingin berada di tepi. Berkurangnya penghasilan karena pencemaran laut dan wilayah kelola yang semakin terganggu mengakibatkan semakin tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan pembelian solar bagi nelayan.

Tidak sampai di situ, ancaman dari kawasan industri membuat masyarakat daerah pesisir mengalami krisis air bersih. Hal ini sangat mempengaruhi kehidupan perempuan dari segi produksi seperti mencuci, memasak, membersihkan, sampai mengurus anak. Problema perempuan terkait krisis air bersih juga berpengaruh pada kegiatan reproduksi perempuan seperti harus mengangkat atau mendorong gerobak air dari jauh demi kebutuhan keluarga. Hal ini menyangkut kesehatan rahim perempuan yang rentan terhadap tekanan berat dan terjadi secara repetitif. Inisiatif perempuan menghadapi perubahan iklim sangat dipengaruhi oleh kedekatan perempuan dengan alam.

Ekofeminisme berada dalam dua disiplin yang saling berkaitan, yaitu feminisme yang fokus pada perhatian pada isu-isu alam dan lingkungan, dan feminisme yang memberikan perhatian secara khusus pada isu-isu gender. Kehadiran ekofeminis mengidealkan tindakan yang menaruh perhatian kepada perempuan dan alam yang tidak layak untuk didominasi dan dieksploitasi. Ketidakadilan terhadap perempuan berangkat dari adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia yang memiliki kekuasaan terhadap alam. Menghadapi hal ini, perempuan harus memiliki pengetahuan yang lebih untuk terus bergerak dan menyuarakan isu-isu feminis agar terhindar dari segala bentuk kekerasan dan marginalisasi.

Pemberdayaan bagi perempuan di pesisir merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang terwujud dalam pendidikan formal maupun pendidikan nonformal seperti sekolah gratis untuk generasi nelayan, penyuluhan, dan berbagi pengalaman untuk penguatan srikandi pesisir. Upaya pemerintah dalam pembangunan dan pengelolaan kota semestinya berwawasan lingkungan dan ramah kepada perempuan. Selain itu partisipasi perempuan dalam pembangunan dan pengelolaan kota juga merupakan hal yang utama. Kesadaran untuk lebih menghargai dan menjaga kelestarian ekologi dan kesetaraan gender akan mewujudkan kesejahteraan hidup antara manusia dan alam.

## Solastalgia Perempuan Kodingareng: Dampak Tambang Pasir Laut Terhadap Psikologis Perempuan Kodingareng

Oleh: Nur Herliati Hidayah Herman

### *Solastalgia*

Mungkin istilah solastalgia terdengar asing bagi orang awam termasuk saya sebagai penulis. Solastalgia merupakan konsep pemikiran yang dikembangkan oleh seorang filosof environmentalis Glen Albrecht. Secara etimologis solastalgia berasal dari bahasa Latin solacium (ketentraman, kedamaian) dan akhiran Yunani -algia (lara, duka), yang bermakna gambaran kondisi psikis seseorang yang kehilangan rasa tentramnya di lingkungan yang ditempatinya. Akibat dampak solastalgic, seseorang merasakan depresi mental gara-gara perubahan yang terjadi di lingkungannya (Ekofenomenologi, 2015).

Dari pengertian etimologis solastalgia di atas, dapat disimpulkan bahwa solastalgia merupakan gangguan psikis terhadap manusia sebagai akibat dari kerusakan lingkungan di sekitarnya. Solastalgia merupakan fenomena yang memberi gambaran tentang hubungan antara alam dan manusia yang saling bergantung. Tidak tumpang tindih seperti yang dilakukan oleh banyak manusia, karena menganggap bahwa manusia memiliki superioritas tertinggi di alam semesta. Kemudian melakukan perusakan alam demi kepentingan segelintir manusia.

### *Tambang Pasir Laut di Wilayah Tangkap Nelayan*

Salah satu kegiatan industri ekstraktif yang mulai marak dilakukan adalah tambang pasir laut. Tambang pasir laut yang dilakukan di wilayah tangkap nelayan Kodingareng sendiri untuk memenuhi kebutuhan material pembangunan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kota Makassar. Dalam hal ini adalah Makassar New Port (MNP) yang terletak di pesisir Tallo. Wilayah konsesi tambang pasir laut berada di Copong Lompo tempat utama nelayan Kodingareng dan sekitarnya mencari ikan. Copong Lompo seperti kantor utama bagi nelayan karena sangat kaya akan hasil laut.

Di Copong Lompo terdapat pelbagai jenis ikan, beragam jenis terumbu karang dan biota laut lain (udang, cumi, kepiting dan lain sebagainya). Itulah alasan mengapa Copong Lompo menjadi wilayah primadona bagi nelayan dengan berbagai jenis alat tangkap. Namun ketika tambang pasir laut merusak wilayah tangkap nelayan, tak ada lagi hasil laut yang mampu dijadikan pundi-pundi penghasilan nelayan. Mereka terpaksa harus berpindah tempat menangkap ikan dan mengeluarkan biaya lebih dengan hasil yang sering tak sebanding.

### *Dampak Terhadap Perempuan*

Nelayan yang tak mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah karena wilayah tangkapnya rusak juga memberi pengaruh besar terhadap perempuan. Mengapa bisa demikian? Perempuan yang diberi tugas dan tanggung jawab domestik harus mengatur banyak hal dan diberi beban berlapis. Tak hanya mengurus rumah pun juga mengatur keuangan keluarga. Ketika nelayan tidak mendapat hasil sepulangnya dari mencari hasil laut artinya tak ada uang yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan untuk memenuhi kebutuhan seisi rumah. Tak ada uang untuk membeli sembako, keperluan sekolah anak, dan nelayan terpaksa harus mengutang untuk keperluan melaut (seperti bensin, rokok, dan kopi sebagai bekal).

Hal ini tentunya mendatangkan dampak yang lain, yakni dampak psikologis berupa rasa stress dan tertekan. Karena terus memikirkan keadaan wilayah tangkap nelayan yang rusak dan berakibat pada hilangnya sumber pendapatan. Ditambah lagi fenomena alam yang nyata dirasakan oleh perempuan Kodingareng berupa abrasi dan kenaikan volume air laut (intrusi air laut). Kesaksian beberapa perempuan Kodingareng mengatakan bahwa “Dulunya bibir pantai di (RW 3) mencapai 2 meter ketika musim timur atau musim kemarau dalam istilah umum. Tetapi sekarang setelah ada tambang pasir laut bibir pantai tak sepanjang dulu lagi. Dan ketika masuk musim barat rumah yang ada di pesisir pantai pasti akan tenggelam dimasuki air alias banjir. Siapa yang tidak takut kalau selalu merasa terancam pulaunya akan tenggelam.” Ucap salah satu perempuan yang saya temani berdiskusi sehari yang lalu.

Kemudian ada lagi beberapa kesaksian dari beberapa perempuan Kodingareng ketika saya tanyai perihal keadaan psikologis mereka.

*“Semenjak ada tambang pasir laut bahkan sampai sekarang setahun lebih tidak keluar mi lagi, pernah ki sering mimpi tenggelam pulau. Kah diambil pasir kah di laut pasti terkikis sedikit-sedikit pasir di Pulau Kodingareng. Kalau begitu terus tidak lama maki ini tenggelam. Mana lagi ombaka di sekitar Copong tambah besar nah bilang suamiku. Bikin khawatir kalau keluar ki. Masuk musim barat ombak kencang sekali, air laut kah tambah tinggi. Ideeh....malla ku jah nakke tallangi pulauku.”*



Dari penuturan perempuan diatas terdapat beberapa dampak psikologis yang dirasa perempuan Kodingareng. Pertama, stress dan amarah akibat suami yang melaut tidak membawa hasil sedangkan terus mengeluarkan modal untuk melaut. Kedua, rasa khawatir melihat fenomena abrasi dan intrusi air laut yang mereka lihat secara langsung. Khususnya bagi mereka yang tinggal di sekitar bibir pantai. Ketiga, takut akan pulaunya yang terancam akan tenggelam. Keempat, cemas setiap memikirkan suaminya yang harus menghadapi perubahan kondisi laut yang ekstrim akibat dari kerusakan lingkungan.

### *Solastalgia Perempuan Kodingareng*

Tekanan psikologis yang dialami perempuan Kodingareng dapat dikategorikan “solastalgia”. Seperti yang dijelaskan pada paragraf pertama tulisan ini bahwa solastalgia merupakan gangguan psikologis terhadap manusia akibat perubahan yang terjadi di lingkungannya. Rusaknya wilayah tangkap nelayan sangat berpengaruh terhadap psikologis perempuan. Psikologis perempuan terganggu tak hanya akibat kesulitan terhadap sumber pendapatan nelayan, tetapi juga rasa takut, cemas dan khawatir akibat kerusakan lingkungan berupa abrasi dan intrusi air laut. Abrasi dan intrusi air akibat hilangnya wilayah tutupan terumbu karang di Copong Lompo membebani perempuan dengan rasa takut dan cemas akan ancaman tenggelamnya pulau yang mereka jadikan rumah selama ini. Tulisan ini berasal dari hasil observasi dan wawancara langsung di lapangan. Penulis melihat ada dampak psikologis yang jarang dibahas oleh khalayak ramai sebagai akibat dari kerusakan lingkungan.

Manusia sangat bergantung pada alam. Karena manusia juga merupakan bagian dari entitas alam. Kerusakan yang terjadi karena kegiatan penambangan pasir laut berdampak langsung pada entitas biota laut. Pun juga berdampak pada kesehatan masyarakat. dalam hal ini psikologis perempuan. Tidak hanya pemiskinan perempuan Pulau Kodingareng, kerusakan laut akibat dari kegiatan tambang pasir laut juga membuat perempuan Kodingareng menderita secara psikologis atau mental ditandai dengan rasa stress, cemas, dan ketakutan. Menurut Erazim Kohak “Ketidakadilan, ketidakseimbangan, serta diskriminasi yang ditimpakan manusia pada alam terjadi sebagai imbas ketidakpahaman manusia terhadap konsep posisi serta relasinya dengan dunia.” (Ekofenomenologi, 2015)

Dampak psikologis terhadap perempuan Kodingareng terjadi juga karena segelintir manusia tidak mempertimbangkan relasi antara manusia dengan alam. Hal ini akibat rasa superioritas manusia terhadap alam atau yang dikenal dengan istilah “Antroposentrisme”. Tapi perempuan Kodingareng tidak berhenti melakukan gerakan penolakan terhadap tambang pasir laut meski terus dibayangi ketakutan akan banyak hal. Mereka sampai saat ini masih semangat memperjuangkan hak mereka atas lingkungan yang baik dan sehat. Sekian, tulisan ini masih menyisakan banyak kekosongan dan kesalahan. Semoga kamerad sekalian berkenan memberi kritik dan saran. Terima kasih....

## **Peran Pemerintah Daerah Dalam Memperhatikan Perempuan Sebagai Wujud Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan**

Oleh: Aprianti Angelina

### *Pendahuluan*

Tidak dapat terelakkan keterkaitan antara perempuan dan lingkungan sangatlah erat. Perempuan sebagai ibu rumah tangga mempertahankan kehidupan dirinya dan keluarganya dengan bergantung pada lingkungan. Mulai dari menyediakan air bersih, menyediakan makanan bergizi, mengelola limbah, dan memelihara tanaman sayur dan buah. Perempuan sebagai ibu rumah tangga memiliki peran yang besar menjaga ekosistem agar tetap terawat, juga bisa mengendalikan kondisi lingkungan yang sehat.

Lingkungan yang sehat dalam interpretasinya adalah lingkungan yang kondusif, bebas polusi, pemukiman sehat, dan pengelolaan sampah yang baik. Sampah menjadi salah satu masalah yang serius dalam lingkungan hidup di seluruh dunia. Di Indonesia, masalah sampah sangatlah rumit karena kurangnya pengertian masyarakat terhadap akibat yang dapat ditimbulkan oleh sampah dan meningkatnya taraf hidup masyarakat yang disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang persampahan, partisipasi masyarakat yang kurang untuk memelihara kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya.

Pengaruh sampah ditinjau dari tiga aspek yaitu melalui aspek fisik, kimiawi, dan biologis. Secara fisik sampah dapat mengotori lingkungan sehingga memberikan kesan jorok, tidak estetik, terlebih apabila sampah tersebut membusuk sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Secara fisik pula sampah dapat mencemari saluran bahkan badan air sehingga mengganggu alirannya.

Masalah sampah harus ditangani sebaik mungkin, dalam hal ini kita sangat membutuhkan aksi perempuan, karena keterikatan perempuan dan lingkungan tak terelakkan. Mulai dari menyediakan air bersih, menyediakan makanan bergizi, mengelola limbah, dan memelihara tanaman sayur dan buah. Perempuan sebagai ibu rumah tangga memiliki peran yang besar menjaga ekosistem agar tetap terawat, juga bisa mengendalikan kondisi lingkungan yang sehat. Olehnya, perempuan harus dibekali pengetahuan tentang bagaimana mengelola dan meminimalisir sampah.

Di daerah saya sendiri, di Batangase, Kab.Maros. TPS penuh dengan sampah yang tidak diorganisir terlebih dahulu oleh masyarakat. Akibatnya, menyulitkan petugas kebersihan dan tentu tanpa disadari sampah tersebut akan memberikan dampak yang buruk jika dibawa ke TPA. Lantas apakah pengetahuan tentang pemilahan sampah pada masyarakat khususnya pada perempuan menjadi alternatif yang paling jitu dalam masalah ini?

### Isi

Partisipasi perempuan sangat berkorelasi dengan kualitas lingkungan, hal tersebut dibuktikan jika perempuan aktif dalam pengelolaan lingkungan maka lingkungan akan menjadi bersih, teratur, indah, dan hijau. Perempuan sebagai ibu rumah tangga harus dibekali pengetahuan paling dasar tentang pemilahan sampah. Peningkatan pengetahuan dapat dilakukan dengan pendidikan formal maupun informal. Cara yang paling mudah dilakukan adalah dengan cara peningkatan pengetahuan secara informal seperti sosialisasi ke masyarakat, penyuluhan, penyebaran media promosi berupa poster dan selebaran.

Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah. Pemahaman kegiatan pemilahan sampah antara lain :

1. Pemilahan sampah adalah kegiatan yang penting dalam penanganan dan pewadahan sampah di sumbernya.
2. Pemilahan sampah di mulai di rumah-rumah terhadap sampah organik/ sampah basah/ sampah dapur dan sampah anorganik/ sampah kering.
3. Pemilahan sampah yang baik akan mempengaruhi kinerja daur ulang.
4. Awal dari proses 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

.Sesuai hasil observasi dan wawancara sederhana dengan ibu rumah tangga di daerah saya di Kab.Maros diketahui bahwa sebagian dari ibu rumah tangga menghasilkan sampah di rumah mereka berupa sampah limbah rumah tangga yaitu jenis sampah organik (seperti sampah sayuran dan sisa bahan dapur, dan kertas), lalu sampah anorganik (seperti sampah plastik, sampah, sampah kaca, dan sampah elektronik yang berupa tv bekas, radio bekas, hp bekas dan lainnya). Untuk sampah jenis B3 yaitu berupa sampah dari



racun serangga, hair spray, lem perekat, batu baterai, obat nyamuk dan lainnya.

Sebagian ibu tidak mengorganisir sampah karena tidak memiliki pengetahuan kategori sampah, sebagian lainnya karena terbiasa mengumpulkan lalu membuang tanpa memilah. Hal ini mempengaruhi TPS hingga berakhir buruk di TPA. TPA Kabupaten Maros sendiri mengalami overload atau melebihi kapasitas normal. Dikutip dari laman berita [upeks.co.id](https://upeks.co.id) pada bulan Maret 2022 pemerintah Kabupaten Maros mewacanakan akan menambah lahan sekitar 1 hektar yang membutuhkan anggaran 1-2 Miliar. Berbagai kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang tertuang pada Peraturan Bupati Maros No.118 Tahun 2008 sampai saat ini belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini benar jika melihat target pengurangan sampah seperti yang tertulis di pasal 5 ayat 1 tidak tercapai.

Pemerintah seharusnya merealisasikan pengelolaan sampah dimulai dari memberikan pengetahuan pengelolaan sampah pada perempuan. Sosialisasi di setiap kelurahan tentang pemilahan sampah, pemanfaatan sampah yang bisa bernilai ekonomis. Serta penyediaan bank sampah sesuai ketentuan KLHK. Memperhatikan peran perempuan adalah realisasi yang paling fundamental. Selain dukungan dari pemerintah, kita sebagai anak muda yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sepatutnya mengajak masyarakat dan memberikan pengetahuan melalui media sosial contoh yang paling kecil menyebarkan informasi melalui grup whatsapp keluarga.

### Penutup

Pemerintah harus memperhatikan perempuan karena diperlukan partisipasi perempuan secara aktif dalam mengelola sampah mereka, hal ini dapat dimulai dari rumah tangga yakni dengan cara melakukan pemilahan sampah organik, sampah anorganik sehingga dengan sudah berkurangnya sampah karena sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, maka yang terangkut ke TPA hanya sebagian kecil saja yaitu sisanya. Perempuan perlu di motivasi dan dorongan dalam hal mencari kemudian menunjuk lembaga yang profesional di bidangnya atau perorangan yang dapat dipercaya dalam pengelolaan sampah di wilayahnya. Harapannya dengan pengelolaan sampah yang sesuai dan benar maka akan dapat dijadikan sebagai penopang kehidupan sosial, ekonomi dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

- Berita online, <https://upeks.co.id/2022/03/overload-tpa-maros-akan-diperluas/> diakses tanggal 29 Oktober 2022.  
Rahmi N, Ernawati. 2021. Perilaku ibu rumah tangga dalam pengelolaan sampah di kecamatan pauh kota Padang. JGEJ. 2 (1) : 2  
Peraturan Bupati Maros Nomor 118 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kabupaten maros tahun 2018-2025

## Etika Budaya Bugis Dari Agensi Perempuan Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Sumber Pengetahuan

Oleh: Asrisnawanti

### Pendahuluan

Satu dari banyaknya masalah yang sedang dihadapi oleh seluruh negara di dunia yaitu perihal sampah. Sampah menjadi dilema karena memberi dampak yang sangat komprehensif di kehidupan dewasa ini. Berdasarkan CNN Indonesia (2022), Indonesia sendiri berada pada peringkat kedua penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Kemudian didukung kembali pada tingkat pembuangan sampah yang tidak sebanding dengan tingkat daur ulang yang hanya mencapai 9% (Tempo, 2019). Sungguh ironis jika permasalahan ini terabaikan, jika sejak dari pikiran dan tindakan tidak diperbaharui. Maksud dalam hal ini perubahan paradigma tentu harus berubah, penegakan hukum negara yang mesti lebih kuat dari korporasi, pengawasan dan evaluasi yang harus didesak.

Sistem penanganan sampah dengan teknik operasional yang masih dominan open dumping, membuat upaya pemerintah belum dapat memberikan hasil optimal. Jumlah penduduk dari data BPS (<https://sulsel.bps.go.id>), Kota Makassar di tahun 2022 adalah 1.571.814 jiwa dan didukung peningkatan volume sampah mencapai 7.374,5 ton per bulan dan 245,8 ton per hari (<https://geoportal.makassar.go.id>). Fakta ini mesti menjadi batu loncatan untuk segera dikelola secara baik untuk mengurangi emisi dan perubahan iklim agar menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) MAMMINASATA yang menjadi contoh baik bagi lima Kawasan perkotaan lainnya.

Rendahnya tingkat pengelolaan sampah, dari laporan Fajar.co.id (2022) dimana sebanyak 88% diangkut ke TPA dan hanya 10% berhasil diolah, ketersediaan sarana dan prasarana serta kapasitas dan daya tampung TPA menjadi isu penting, ditambah gerakan inovasi yang minim dan rendahnya kepedulian masyarakat tentang pengelolaan sampah. Adanya program Bank Sampah dari pemerintah menjadi angin segar untuk permasalahan ini. Didukung oleh Walikota Makassar Moh. Ramadhan “Danny” Pomanto dalam Forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) (<https://makassarkota.go.id,2021>) dan dikutip dari laporan ([SuaraSulSel.id, 2022](https://suarasulsel.id,2022)) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ariaty Puspasari Abady menyatakan bahwa berkenaan dengan HPSN pihaknya berkenaan akan kembali menghidupkan Bank Sampah sebagai upaya mengatasi tingginya volume sampah di Kota Makassar (dengan catatan dari DLH Bank Sampah yang dimiliki Kota Makassar 1.000 unit dan sekitar 300 unit yang tercatat aktif).

Seni dalam hidup secara keseluruhan memiliki makna yang menjadi cermin dalam kehidupan sosial, (Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya “Wajo pada Abad XV-XVI” Disertasi tahun 1979) mengetahui kebudayaan masa lalu untuk melihat masa kini adalah suatu upaya dalam kearifan sebuah sosio historis manusia. Sehingga etika Bugis dalam kehidupan masyarakat sangat penting agar dapat dijadikan sebagai falsafah hidup dan simbol jati diri dalam bersikap dan berinteraksi.

Etika dalam budaya bugis ini perlu menjadi pembelajaran agar dalam hidup bermasyarakat dapat saling mengenal, menghargai, pengertian dan sebagainya. Era modern ini tidak ada salahnya moral maupun etika dibentuk secara kuat dengan aturan adat dan nilai-nilai etika agar tidak terjadi penyimpangan dan konflik permasalahan pada masyarakat. Dewasa ini kearifan lokal (dalam hal ini budaya etika dalam berbagai kebudayaan), dalam tulisan Ida, dkk “Feminisme: Hubungannya dengan Kearifan Lokal terhadap Perempuan” feminisme multikultural memanfaatkannya sebagai politik budaya perempuan yang tidak sekedar sebagai kekuasaan tetapi dengan pendidikan dan perubahan yang mendasar pada tatanan sosial budaya atau politik perempuan, akan berkaitan dengan kehidupan dan pengalaman perempuan sehari-hari. Sehingga agensi perempuan sinergi akan dinamika budaya dan keberagaman.

### **Pengelolaan Sampah**

Perubahan paradigma pengelolaan sampah, dari orientasi kumpul, angkut, dan buang menjadi lebih berorientasi kepada pengurangan sampah semaksimal mungkin dari sumber sebelum ke TPA. Permen LHK 14 (2021) menjelaskan bahwa, Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Landasan hukum melalui program yang dicanangkan oleh pemerintah/kota untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah terkhusus di Kota Makassar meliputi: 1) Perpres Nomor 35 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan; 2) Permen LHK Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah; 3) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah; 4) Perwali Kota Makassar Nomor 12 tahun 2011 tentang Penarikan Retribusi Sampah; 5) Perwali Kota Makassar Nomor 119 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 6) Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan Hidup; 7) Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (JAKSTRADA); 8) Peraturan Walikota Makassar Nomor



70 tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.

Bank Sampah di Kecamatan Rappocini merupakan salah satu sistem pengelolaan sampah kering yang dilakukan secara kolektif oleh masyarakat, dengan luas wilayah 9,23 km<sup>2</sup> dan memiliki 11 kelurahan. Berdasarkan data Yayasan Peduli Negeri (YPN), jumlah Bank Sampah Kecamatan Rappocini yang tercatat ada 62 unit dan hasil kunjungan yang dilakukan pada bulan Juli-Desember 2022 terdapat kurang lebih 25 unit yang masih aktif di setiap kelurahan.

Sasaran utama program Bank Sampah ini adalah setiap kelurahan masing-masing RT di Kecamatan Rappocini. Pembentukan Bank Sampah, ada beberapa yang mesti dilakukan yaitu: 1) Pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya yang dilakukan sejak dari sumbernya (Rumah Tangga); 2) Tiap rumah memiliki sarana untuk mengumpulkan sampah kering terpilih (plastik) dan minyak jelantah; 3) Menyediakan pengurus bank sampah; 4) membuat sistem administrasi (ketua dan jajarannya, buku tabungan bank sampah, dan pencatatan timbangan sampah); 5) Kerjasama antara pihak pemerintah dan lembaga lainnya serta penyediaan offtaker dengan jadwal pengambilan rutin.

Pengelolaan sampah dengan bank sampah ini tidak hanya terfokus pada sampah plastik yang dijadikan sebagai aspek lingkungan dan ekonomi salah satunya ada (Ibu Asma Arif, direktur bank sampah Srikandi Lorong dan Ibu Emi, direktur bank sampah Aisyiyah). Pengembangan yang dilakukan pun beragam, salah satunya seperti yang dilakukan oleh Ibu Rosmini (direktur bank sampah Pelita Bangsa) yang mengembangkan budidaya maggot, pemanfaatan RTH Mini, dan pembuatan eco-enzim sebagai bahan multi fungsi yang keseluruhan memanfaatkan sampah organik yang ada serta melakukan pelatihan kepada masyarakat yang ada di wilayah tersebut agar dapat memilah sampah dari rumah dan memanfaatkan sampah dengan baik dengan melihat sampah pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Pembagian peran dalam suatu organisasi diperlukan untuk menampung keahlian atau spesialisasi manusia yang dapat saling melengkapi dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan bersama (Dwiyati, 2002). Kemudian Dwiyati kembali menuliskan bahwa kelompok perempuan yang lebih kuat dan kohesif baik dari segi organisasi maupun produktivitas akan meningkatkan jumlah produksi, baik dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi di suatu wilayahnya secara signifikan.

### ***Budaya Etika Bugis dalam Agensi Perempuan Dalam Pengelolaan Sampah***

Etika sangat erat dengan suatu keyakinan, sikap, aktivitas atau sesuatu yang akan menentukan suatu tindakan dalam bermasyarakat dan perilaku sehari-hari (Ardiansyak, dkk., 2021). Dari hasil kunjungan setiap bank sampah di Kecamatan Rappocini, bentuk etika budaya bugis dalam agensi perempuan dalam mengolah sampah ditemukan bentuk etika budaya bugis yakni Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge.

#### **1. Sipakatau**

Sipakatau merupakan merupakan konspirasi yang tidak terputus atas lima nilai utamanya dalam setiap perilaku sosial, kebudayaan, agama maupun dalam kemasyarakatan. Sipakatau adalah suatu nilai dasar berdimensi sosial-horizental dan vertikal yang saling memanusiatkan (Ardiansya, dkk., 2021). Dalam tulisan Muhammad Husain "Ade' Sipakatau" bahwa sipakatau bukanlah doktriner, bukanlah Tuhan, dan bukanlah raja atau penguasa tetapi ia adalah nilai kapasitas fitrawi yang dimiliki oleh semua manusia (kemampuan), dalam bahasa Bugis "makamaka" (hasrat yang tinggi) jasmaniah dan rohaniah. Adapun yang ditemukan dalam bincang bersama salah satu perempuan direktorat BSU berdasarkan hal tersebut yaitu:

### ***“Apa yang mendasari Ibu melakukan kegiatan ini?”***

“Banyak yang menilai bahwa ini hanya sampah, kotor, dan lainnya. Untuk membuktikan bahwa sampah jika dilakukan pemilahan dan pengelolaan yang baik akan sangat bernilai. Untuk membuat perubahan, kita (diri sendiri) yang harus memulai lebih awal dan jika dilakukan secara kontinyu maka yakin akan terjadi perubahan dan boleh jadi akan terciprat ke orang lain. Itu terbukti dengan adanya BSU ini. Saat ini kita ada di persoalan tempat sehingga tidak lagi melakukan penimbangan. Nasabah yang pernah aktif semua mendesak untuk mengaktifkan kembali.”

### ***“Mengapa mereka begitu antusias untuk mengaktifkan kembali BSU ini?”***

“Nak, sebagian dari nasabah ini ada yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga, dimana sebelum penimbangan ini aktif setiap sampah yang mereka kumpulkan dan hasil dari itu mereka tabung, meskipun terkadang hanya Rp2.000 dari hasil penimbangan. Setiap nasabah dilengkapi dengan buku tabungan dan dilakukan pencatatan. Biasanya mereka akan mengambil tabungan mereka pada hari raya atau pada saat setelah anak-anak mereka masuk tahun ajaran baru. Terkadang mereka terkejut saat mengambil uang tersebut. (Bu, kenapa bisa banyak begini uangku? Dan pertanyaan lainnya). Itu karena kebiasaan mereka dari uang yang mereka tabung dari 0 menjadi tabungan berbukit” (Bincang dengan Direktur Bank Sampah, Ibu Nur Zamzam, 2022).

### ***“Bagaimana cara Ibu mengatur Hasil penimbangan mereka?”***

“semua sampah yang telah ditimbang akan dipilah kembali dan dilakukan pencatatan di buku tabungan (salah satu BSU terdapat pula catatan dengan bentuk spanduk volume sampah tiap bulan) dan uang nasabah saya klip di setiap buku tabungan mereka (adapun hasil penjualan sampah keseluruhan dimasukkan di bank khusus nasabah), sehingga setelah mereka ingin mengambilnya saya tidak repot lagi menghitung karena telah rapi berdasarkan pencatatan. Itu semua dilakukan secara transparan karena ini merupakan suatu tanggung jawab dan harus dilakukan secara jujur” (Bincang dengan Direktur Bank Sampah, Ibu Atma Yualita, 2022).

Dari sini dapat dilihat bahwa, budaya Sipakatau sangat terlihat pada peran perempuan dalam pengelolaan sampah yang dapat dilihat dengan melansir Lontara dalam tulisan Muhammad Husain “Ade’ Sipakatau” bahwa “duduki kedudukanmu, dan tempati tempatmu”, artinya jangan memilih kedudukan sedangkan engkau tidak mengetahui secara persis tentang apa yang akan kamu kerjakan atau tentang hak dan kewajibanmu. Merusak tata tertib ini adalah kezaliman bagi mereka. Kewajiban yang dibaktikan memperoleh hak yang sepadan, adalah suatu perlakuan yang patut.

## **2. Sipakalebbi**

Dedi Ardiansyah dalam jurnal Kependidikan tahun 2021, bahwa Sipakalebbi merupakan sikap menghargai satu sama lain, bukan hanya terjadi dalam kalangan tertentu, melainkan secara horizontal.

“Siapa saja yang menjadi nasabah dalam BSU yang Ibu bentuk?”

“Semua yang ada di wilayah ini (sebut saja RW03, Kec. Rappocini-misalnya) jika sampah yang telah terkumpul (baik itu hanya setengah kantong saja) mereka akan membawanya dan dilakukan penimbangan dan bisa di lihat (menunjuk salah satu kebun sayur di halaman Beliau yang sangat subur) siapa saja yang membutuhkan sayur bisa memetikinya tanpa harus membeli” (Bincang dengan Direktur Bank Sampah, Ibu Rosmini, 2022).



Saat melakukan bincang tersebut, Beliau menunjuk salah satu rumah yang bertingkat dan saya melihat rumah di sebelahnya yang sederhana. Disana menunjukkan bahwa BSU ini terbuka untuk siapa saja mau mereka pejabat atau ibu rumah tangga sekalipun semua terbuka untuk mereka tanpa memandang status sosial dan penimbangan akan sesuai dengan sampah yang mereka bawa di tempat bank sampah. Sehingga disadari atau tidak bahwa budaya sipakalebbi ini dibangun melalui komunikasi dengan saling menghargai dan mengapresiasi siapa saja yang membawa hasil pilahan masyarakat melalui buku tabungan yang tercatat dengan baik.

### 3. **Sipakainge**

Sipakainge artinya saling menasehati dan saling mengingatkan dalam kebaikan.

“Apa motivasi Anda dalam menjalankan kegiatan ini?”

“Saya sebagai pegawai pensiun, aneh saya rasa tidak ada aktivitas setelah pensiun. Membuka BSU ini menjadi kesibukan yang sangat membuat saya kembali bersemangat. Kenapa? Karena dengan ini saya mampu mengikuti berbagai pelatihan dalam pengelolaan sampah dan itu menjadi bekal untuk saya bagikan untuk nasabah saya. Memberikan info pentingnya menjaga lingkungan dan sampah tidaklah selamanya jorok namun dapat bernilai ekonomi” (Bincang dengan Direktur Bank Sampah, Ibu Atma Yualita, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, setiap ada kebaikan yang diperoleh yang mampu memberi perubahan yang sangat besar bagi diri pribadi ada baiknya kebaikan itu disebarluaskan agar memberi dampak yang lebih luas pula sesuai dengan adat budaya bugis Sipakainge.

### *Penutup*

Agensi dalam segala peran yang diambang sangat berkaitan erat akan keberdayaan dan tanggungjawab yang diajarkan dalam setiap konteks kebersamaan. Peran tidak berhenti sekadar berdaya, namun bagaimana untuk dapat memberdayakan. Melawan dengan keyakinan akan pentingnya tujuan terhadap segala bentuk jebakan yang kerap kali dialami (terkhusus perempuan) pada penilaian sekitar atau stereotip berbagai peran domestik hanya untuk perempuan dan penghalangan partisipasi sosial lain. Tentu tidak ada revolusi yang bisa terjadi jika salah satu (perempuan dan laki-laki) mengabaikannya. Kesetaraan yang hakiki, bukan pada pembagian porsi kerja di rumah yang dilakukan sama rata. Kemampuan bernegosiasi dan saling berempati dalam memenuhi ekspektasi, kondisi khusus dalam hubungan dan preferensi yang dinyatakan oleh perempuan dan laki-laki dalam menjalani kesepakatan sehari-hari, adalah kunci utama dalam kesetaraan.

## Cantik, Anugerah Atau Tuntutan?

Oleh: Aisyah Sahabuddin

Perempuan dan kecantikan adalah dua hal yang sulit untuk dipisahkan. Bagi masyarakat secara umum kecantikan adalah hal yang utama bagi seorang perempuan. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang harus terlihat indah. Standarisasi kecantikan pun terus dibuat oleh masyarakat. Saat ini standar kecantikan bagi wanita yaitu kulit bersih, mulus dan putih, paras yang cantik, rambut lurus dan hitam, serta tubuh yang ramping. Survei yang dilakukan oleh Magdalene (dipublikasikan September, 2022) yang melibatkan 725 responden lintas generasi, mulai dari generasi X (1965 – 1980), Y (1981 – 1994), hingga Z (1995 – 2010). Hasil survei, menunjukkan sebanyak 56 responden yang mendefinisikan cantik secara harfiah berarti memiliki kulit putih. Sementara, sebanyak 254 orang memilih kulit glowing sebagai perluasan makna kulit cerah. Cantik yang berarti putih atau berkulit cerah juga terlihat dari 188 responden, yang memutuskan memakai filter guna menaikkan warna atau tone kulit. Hal ini kemudian

disusul dengan 126 responden yang mengedit foto terlebih dahulu sebelum mengunggahnya ke media sosial.

Wanita seolah dituntut untuk mencapai titik tersebut barulah dapat dikatakan sebagai seorang wanita yang utuh. Filsuf feminis Simone de Beauvoir dalam buku legendarisnya *The Second Sex* (1949) mengatakan bahwa, perempuan adalah salah satu dari beberapa hal yang dikonstruksi secara sosial. Masyarakat telah mendikte apa yang seharusnya dilakukan/dicapai wanita. Bagaimana mereka harus berpenampilan, bagaimana seharusnya bertindak, dan peran yang dianggap harus dimiliki oleh wanita. Wanita yang tidak mencapai standar tersebut seolah-olah harus terasing, diabaikan dan bahkan mendapatkan diskriminasi di tengah masyarakat. Hal-hal tersebutlah yang menjadikan perempuan masa kini menjadi tidak percaya diri pada tubuhnya sendiri, melupakan jati diri yang sesungguhnya bahkan berusaha menjadi bentuk yang lain dari dirinya. Perempuan-perempuan Indonesia khususnya terus disuguhkan dengan promosi-promosi kecantikan yang menggiurkan yang mendorong keinginan mereka untuk mengikuti standar kecantikan. Mereka terus berupaya memenuhi standar kecantikan melalui produk-produk perawatan kulit, produk kecantikan dan produk pewangi.

Standarisasi kecantikan wanita dan perubahan gaya hidup akhirnya memicu tumbuh dan berkembang pesatnya industri kosmetik. Bahkan di Indonesia sendiri, industri kosmetik mengalami kenaikan jumlah perusahaan hingga 20,6%. Sepanjang tahun 2021 hingga Juli tahun 2022, industri kosmetik mengalami penambahan dari 819 menjadi 913. Kebanyakan didominasi oleh UKM yaitu sebanyak 83% (Sumber BPOM, 2022). Industri kosmetik yang menawarkan berbagai produk kecantikan dan perawatan kulit yang sangat beragam ini, tidak serta-merta memperhatikan kondisi masyarakat. Mereka hanya memperhatikan keuntungan yang dihasilkan dari penjualan produk. Beberapa produk kosmetik yang tersebar di Indonesia banyak yang tidak melalui tahapan pengujian BPOM, sehingga kandungan dan zat yang terkandung di dalamnya tidak dapat dijamin. Kandungan-kandungan berbahaya kerap kali ditemukan dalam produk-produk kosmetik, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh (Alodokter, 2022) dalam situsnya bahwa beberapa bahan berbahaya dalam produk kosmetik yang berdampak buruk bagi kulit yaitu merkuri, hidroquinon, phthalates, dan timbal.

Produk-produk kecantikan berbahaya tak hanya sekedar mitos untuk menakut-nakuti masyarakat saja tapi benar adanya. Tahun ke tahun terus ditemukan produk-produk kecantikan berbahaya yang beredar di masyarakat. Pada 20 November 2018, suar.grid menginformasikan daftar lengkap 11 kosmetik berbahaya yang dirilis BPOM, termasuk produk kosmetik merek korea. Pada Tahun 2020 CNBC Indonesia melaporkan bahwa BPOM merilis daftar kosmetik yang dilarang beredar di pasaran, lebih dari satu juta item kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya ditemukan. Adapun jenis kosmetiknya mulai dari pewarna bibir, perona pipi, hingga pewarna kuku. CNN Indonesia juga melaporkan pada 18 November 2021 Daftar kosmetik berbahaya dan mengandung merkuri yang diperoleh dari BPOM. Kembali pada 16 Oktober 2022 Kompas TV mengabarkan Daftar 46 merek kosmetik yang ditarik oleh BPOM dan terbukti mengandung bahan berbahaya dan terlarang. Berdasarkan pada beberapa kutipan berita tersebut dapat disimpulkan betapa banyaknya kosmetik berbahaya yang beredar dimasyarakat saat ini dan tentu saja merugikan konsumen, yang mana mayoritas konsumennya adalah kaum perempuan.

Selain berdampak buruk bagi kesehatan kulit, beberapa kandungan produk kosmetik juga mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat mencemari dan merusak lingkungan. Dikutip melalui BeautyJournal.id bahwa beberapa kandungan dalam kosmetik berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Seperti plastic microbeads exfoliating merupakan kandungan yang biasa digunakan sebagai partikel scrub dalam produk eksfoliator. Partikel plastik ini sebagai pencemar sungai dan danau, bahkan ini berpotensi termakan oleh hewan-hewan yang tinggal di habitat tersebut. Kandungan dalam chemical sunscreen, (oxybenzone dan octyl methoxycinnamate) dapat mengganggu kerja kelenjar endokrin dan saat dibilas oleh air berpotensi menyebabkan kerusakan pada lingkungan laut karena bersifat racun bagi koral. BHA (butylated hydroxyanisole) dan BHT (butylated hydroxytoluene) merupakan dua zat kimia



yang umum digunakan sebagai pengawet dalam produk kosmetik, seperti sampo, body lotion, dan deodorant memiliki kandungan berbahaya bagi lingkungan dan bersifat racun bagi organisme yang hidup di air, serta amfibia. Triclosan juga merupakan zat kimia yang kerap digunakan pada produk hand sanitizer atau deodoran. Saat terbilas zat ini mencemari air dan makhluk hidup, baik itu hewan maupun tanaman, yang tinggal di dalamnya. Triclosan juga sulit untuk terurai, sehingga cenderung menumpuk pada lingkungan dan berpotensi untuk bereaksi membentuk zat racun.

Selain beberapa kandungan zat yang berbahaya juga industri kosmetik banyak menyumbang limbah. Menurut laporan terbaru dari Zero Waste Week, limbah dari kemasan produk kecantikan berjumlah 120 miliar unit setiap tahun. Itu termasuk plastik, kertas, kaca, dan logam, yang semuanya berakhir di tempat pembuangan sampah tahun demi tahun. Sehingga disimpulkan bahwa kebiasaan perempuan yang konsumtif terhadap kosmetik justru berdampak buruk bagi lingkungan. Hal ini tidak dapat sepenuhnya menjadi tanggung jawab perempuan sebagai konsumen, tapi juga diperlukan kesadaran dari pihak produsen selaku pembuat produk kosmetik. Selain itu peran pemerintah selaku pihak yang berwenang mengawasi peredaran produk-produk kosmetik.

Keterlibatan pemerintah dalam perlindungan kaum perempuan selaku konsumen dari produk kecantikan belum terlihat upaya maksimal. Juga perhatian pemerintah terhadap kerusakan alam yang terjadi akibat limbah-limbah produk kosmetik masih belum terlihat. Hal ini masih saja diabaikan oleh pihak-pihak terkait. Sejalan dengan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasil penelitian yang dilakukan oleh Desiana dan Mutia (2019) terkait Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar bahwa:

(1) Pemenuhan tanggung jawab sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha, namun masih banyak pelaku usaha kosmetik tanpa izin yang melakukan perbuatan curang dalam memproduksi kosmetik tanpa izin dengan bahan kimia yang didapatkan dengan harga murah tanpa memikirkan dampaknya bagi konsumen yang menggunakan.

(2) Faktor yang menjadi kendala terkait pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar yaitu: kurangnya pengawasan oleh pemerintah terhadap peredaran kosmetik tanpa izin, kepedulian dan kesadaran pelaku usaha terhadap keamanan konsumen masih rendah, penegakkan hukum masih lemah membuat para pelaku usaha mengambil kesempatan untuk dapat menggunakan bahan berbahaya pada produknya, dan kurang efektif pemberian ganti rugi kepada konsumen yang mana apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi maka hari ke delapan konsumen tidak lagi berhak meminta ganti rugi.

Penelitian yang juga sejalan dilakukan oleh Awaliah M. (2022), mengenai Perlindungan Konsumen Atas Produk Kecantikan Yang Mengandung Merkuri dan Masih Beredar Luas di Pasaran, menunjukkan hasil penelitian bahwa penerapan tentang hak-hak konsumen dan perlindungan konsumen belum dijalankan secara optimal oleh pemerintah dan juga produsen dan pelaku usaha. Hal ini juga dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak serta hukum perlindungan konsumen.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas, terlihat bahwa peran pemerintah dalam menegakkan dan menerapkan hukum yang telah ditetapkan terhadap pelaku usaha produk kecantikan yang berbahaya masih sangat minim. Perlindungan terhadap konsumen yang terdampak akibat bahan berbahaya pun masih belum dipenuhi hak-haknya bahkan semakin dirugikan. Budaya tersebut semakin meresahkan bagi kaum perempuan selaku pengguna kosmetik. Kurangnya peran pemerintah yang seharusnya melindungi ini menunjukkan adanya ketidakpedulian pemerintah terhadap kaum perempuan. Pihak-pihak korban yang menjadi konsumen dari produk kosmetik berbahaya pun ditelantarkan. Pengobatan dan pemulihan dilakukan sendiri oleh korban, bahkan mereka semakin mendapatkan diskriminasi dari beberapa pihak di masyarakat karena efek yang diterimanya terhadap tubuhnya.

Perempuan terus disalahkan akibat kekurangannya dalam mencapai standar kecantikan umum. Insecurity semakin meningkat di kalangan perempuan menjadikan mereka terobsesi untuk menggapai standar kecantikan, bahkan mengabaikan penipuan-penipuan yang dilakukan oleh produsen-produsen kosmetik. Abainya pemerintah dalam pengawasan peredaran produk berbahaya dan pemberantasan produsen kosmetik berbahaya. Serta kurangnya tanggung jawab pelaku usaha sebagai produsen kosmetik terhadap dampak yang diterima konsumen. Hal tersebut menunjukkan betapa terdiskriminasinya perempuan di Indonesia, yang mana dituntut agar menjadi seperti yang diinginkan masyarakat namun di pihak lain tak pernah diberi perlindungan sebagai konsumen bahkan tak mendapatkan hak-haknya sebagai korban.





INTERNATIONAL WOMEN'S DAY SULSEL 2024

**PEREMPUAN MEREbut RUANG INKLUSIF,  
LAWAN RAPOR HILANG DEMOKRASI**



MAS  
UNKAN  
PUAN  
IN

DO  
HOV  
TELL

## PART III

# Menuju Keadilan Ekologis untuk Keberlangsungan Bumi

---

**Penulis :**

Nurwahyuni Muslimin, Winona Lutfiah, Hikmawaty Sabar, Aini Syahrunnisa,  
Musnika Muharani Albantani, dan Nunky Aulya Syakiroh



# Perempuan, Alam, dan Keberlangsungan Lingkungan Hidup Di Masa Mendatang

Oleh: Nurwahyuni Muslimin

Wacana ekologi kini menjadi sesuatu yang sangat hangat dibahas melihat wacana ini telah menjadi isu global yang sangat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan. Isu ekologi yang marak digaungkan para pemerhati lingkungan kini menjadi sorotan dari berbagai pihak. Kesadaran akan kerusakan lingkungan harus dimiliki masyarakat mengingat kerusakan lingkungan yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan lagi. Berbagai macam dampak dari kerusakan lingkungan seperti banjir, longsor, tsunami dan bencana lainnya menjadi tamparan keras bagi seluruh manusia di muka bumi. Isu lingkungan menjadi akar masalah dari kebanyakan bencana alam yang terjadi. Bencana alam yang terjadi bukan serta merta hanya karena Takdir Tuhan melainkan juga adanya campur tangan manusia atau aktivitas manusia dibalik itu semua. Hal ini terjadi disebabkan karena adanya paradigma antroposentris dimana manusia menganggap dirinya sebagai makhluk yang superior atau pusat dibanding makhluk lainnya. Adanya paradigma yang berkembang tersebut membuat sebagian manusia berpikir dapat menggerus atau mengeksploitasi alam sebebas-bebasnya. Kondisi ini menyebabkan ketidakadilan yang terjadi terhadap alam.

Diskursus mengenai ekologi juga sering dikaitkan dengan wacana gender. Konstruksi konsep gender yang terbangun di tengah masyarakat mengenai sifat maskulin yang dilekatkan kepada laki-laki dan sifat feminisme yang dilekatkan kepada perempuan. Adanya kesamaan kondisi antara perempuan dan lingkungan membuatnya dikaitkan satu sama lain. Sifat feminisme yang dilekatkan terhadap perempuan dalam hal ini pasif, tidak berdaya, lemah lembut, penyayang dan yang lainnya menjadikan perempuan berada pada posisi alam. Dimana adanya sifat maskulin yang dimiliki laki-laki sehingga sebagian besar mereka bersifat eksploitatif serta superior atas alam dan perempuan. Seringnya terjadi eksploitasi terhadap perempuan dan alam menjadikan mereka saling terhubung satu sama lain. Berangkat dari hal ini, maka muncullah paham ekofeminisme dimana paham ini berusaha untuk melawan segala bentuk ketidakadilan yang hadir atas budaya patriarki terhadap alam dan perempuan. Paham ini hadir untuk mengejawantahkan masalah yang hadir di lingkungan. Para ekofeminis berpendapat bahwa hadirnya ketimpangan hari ini berasal dari dualisme nilai dan cara berpikir hierarkis dimana perempuan dan alam dianggap sebagai sesuatu yang dapat dieksploitasi secara semena-mena. Konstruksi gender yang hari ini dibuat untuk melemahkan posisi perempuan dengan cara mengartikannya sebagai kodrat perempuan. Banyaknya aksi-aksi yang telah dilakukan para ekofeminis guna mengubah paradigma masyarakat bahwa perempuan dan alam adalah makhluk yang harus diperlakukan adil tanpa adanya sifat untuk mendominasi dan dieksploitasi. Contoh aksi yang telah dilakukan para ekofeminis adalah aksi memeluk pohon yang dilakukan di India, aksi perempuan kendeng yang menolak tambang semen di Kendeng, aksi Mama Aleta di NTT menolak eksploitasi gunung dan banyak lagi aksi-aksi yang dilakukan perempuan guna mempertahankan kelestarian lingkungan. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa perempuan sangat berperan penting dalam mempertahankan keberlangsungan lingkungan hidup. Perempuan bukan hanya makhluk pasif yang lemah tak berdaya tetapi perempuan dan alam juga memiliki hak untuk diperlakukan layaknya makhluk Tuhan yang lain tanpa adanya eksploitasi dan dominasi.

Terjadinya krisis ekologi sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Adanya keterkaitan antara ekologi dan sosial-ekonomi sehingga menjadikan sesuatu yang harus sama-sama jadi perhatian khusus masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam harus selalu memperhatikan aspek sosial dan dampak yang terjadi kedepannya. Eksploitasi terhadap alam kerap kali terjadi dikarenakan masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Terjadinya berbagai macam bencana alam tidak dapat dipungkiri terdapat campur tangan manusia itu sendiri. Menganggap alam sebagai subjek dapat menyebabkan ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Contoh ancaman tersebut adalah longsor, banjir, kebakaran hutan, kekurangan sumber air bersih dll. Beberapa bencana tersebut

telah melanda salah satu daerah di Sulawesi Selatan akhir-akhir ini. Curah hujan yang tinggi menyebabkan longsor serta banjir bandang di beberapa daerah di Enrekang.

Selain dari curah hujan yang tinggi, adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh beberapa orang di enrekang menjadi penyebab terjadinya bencana ini. Maraknya pembukaan lahan secara besar-besaran yang dilakukan membuat banyaknya hutan gundul serta tidak adanya hutan yang dapat menyerap air guna menanggulangi banjir. Seperti yang diketahui bahwa daerah Enrekang sebagian besar profesi masyarakatnya adalah petani dimana pembukaan lahan yang dilakukan tidak dibarengi dengan penghijaun guna menghindari hutan gundul. Selain itu, sangat diharapkan kesadaran dari berbagai pihak baik dari pemerintahan, masyarakat untuk saling bersinergi dalam menjaga lingkungan hidup khususnya di Enrekang. Dikarenakan dengan adanya pembukaan lahan secara berlebihan dapat menyebabkan bencana yang lebih parah lagi kedepannya yang dapat merugikan berbagai pihak.

Perempuan dan alam memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam hal ini, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga lingkungan hidup. Dari hal tersebut muncullah sebuah paham feminis yang mengaitkan erat antara perempuan dan alam. Kerusakan lingkungan yang terjadi berdampak terhadap krisis air bersih. Krisis air bersih yang terjadi ini mendorong perempuan untuk terus berusaha mendapatkan air bersih. Adanya ketimpangan gender yang terjadi selama berabad-abad menyebabkan perempuan harus berpikir keras untuk mendapatkan air bersih. Peran yang dilekatkan terhadap perempuan untuk berada di wilayah domestik memaksa mereka untuk bertanggung jawab atas ketersediaan air bersih di rumah. Laki-laki yang dilekatkan untuk mencari nafkah secara otomatis tidak dapat terlibat dalam pencarian sumber air bersih. Berbeda dengan perempuan dimana mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka demi memenuhi tanggung jawab yang selama ini mereka emban di wilayah domestic.

Walaupun terdapat kebijakan pemerintah untuk mempermudah akses terhadap air bersih, tetap saja hal tersebut masih merugikan perempuan dikarenakan mereka tidak dilibatkan secara langsung dalam mengusung kebijakan tersebut padahal melihat perempuanlah yang berperan penting dalam mengakses air bersih. Dengan adanya keterlibatan perempuan dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan dapat memudahkan mereka dalam mengakses air bersih. Dalam hal ini, paham ecofeminism hadir untuk mengejawantahkan masalah yang hadir antara perempuan dan alam. Perlunya proses penyadaran bahwa alam bukanlah sebuah objek yang semata-mata dapat dieksploitasi secara berlebihan. Alam seharusnya dilihat sebagai subjek atau makhluk yang juga memiliki hak untuk dilestarikan sebaik mungkin. Adanya dorongan ekonomi menjadi pemicu eksploitasi alam ini dilakukan secara besar-besaran.

## Perubahan Iklim dan Peluang Kontribusi Perempuan Dalam Menjaga Eksistensi Kehidupan

Oleh: Winona Lutfiah

Perubahan iklim menjadi tantangan global yang menduduki urutan kedua dari 20 isu global sebagaimana yang dikemukakan oleh Human Right Careers. Berdasarkan laporan keenam dari The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2022, diuraikan serangkaian risiko jangka pendek dan jangka panjang terkait perubahan iklim yang akan terjadi, apabila dalam kurun waktu 2021-2040 pemanasan global mencapai 1,5°. Adapun risiko jangka pendek yang dimaksud ialah peningkatan bahaya iklim yang tidak terhindarkan dan ancaman terhadap ekosistem. Sedangkan, risiko jangka panjang yaitu ancaman kesehatan, kematian dini, ancaman kota dan pemukiman, serta bahaya lainnya (IPCC, 2022: 21).

Dampak dari perubahan iklim akan mengalami peningkatan sejalan dengan berlanjutnya peristiwa perubahan iklim. Sebagian besar dari aspek perubahan iklim akan terus bertahan berabad-abad lamanya bahkan jika emisi gas rumah kaca berhasil dihentikan. Selain itu, sebagian besar dari dampak perubahan



iklim juga tidak dapat diubah. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan iklim seharusnya mendapat perhatian demi menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi.

### *Perubahan Iklim Sebagai Tantangan Global*

Perubahan iklim merupakan perubahan signifikan pada cuaca yang bersifat alami, namun sejak periode 1800-an aktivitas manusia menjadi pemicu utama sehingga berimplikasi pada perubahan komposisi atmosfer dan variabilitas iklim alamiah secara global (Santos & Bakhshoodeh, 2021:7). Komposisi atmosfer bumi seperti Gas Rumah Kaca (GKC) pada dasarnya dibutuhkan demi kestabilan suhu bumi, namun yang perlu diketahui bahwa peningkatan GKC secara cepat dan berkala akan memicu penebalan lapisan atmosfer. Bagaikan pedang bermata dua, program pemerintah yang awalnya ditujukan untuk membantu masyarakat mengakses listrik ternyata menuntut harga yang jauh lebih mahal untuk dibayar di kemudian hari. Penebalan lapisan atmosfer ini akan menyebabkan terperangkapnya panas bumi dan mengakibatkan peningkatan suhu. Realitas perubahan iklim merupakan fenomena yang menjadi tantangan global karena dampaknya tidak hanya berskala regional, tetapi juga global.

Dampak dari perubahan iklim yang terjadi akan mempengaruhi makhluk hidup di dalam ekosistem bahkan peradaban manusia. Perubahan iklim yang ekstrim membuat tumbuhan dan hewan berisiko punah diakibatkan ketidakmampuan tumbuhan dan hewan untuk beradaptasi, meningkatnya frekuensi dan penyebaran penyakit, kebakaran hutan, kekurangan air bersih, kekeringan, banjir, penurunan kualitas udara, bahkan kematian (IPCC, 2022). Dampak dari hal tersebut pada akhirnya merembes ke dalam sektor pertanian, perekonomian, kelautan dan perikanan, serta perindustrian yang kemudian mempengaruhi miliaran orang dengan cara yang berbeda-beda.

### *Peluang Kontribusi Perempuan dalam Menjaga Eksistensi Kehidupan*

Eksistensi kehidupan sedang terancam dengan hadirnya fenomena perubahan iklim yang memicu dampak di berbagai sektor kehidupan. Dampak yang dilahirkan akan rentan terhadap komunitas yang lemah disebabkan karena kurangnya kemampuan untuk beradaptasi. Perempuan merupakan kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim sehingga diperlukan strategi berbasis kesetaraan gender dalam kebijakan dan praktik perubahan iklim (Lau, 2021: 186-192). Berdasarkan hal tersebut, meski perempuan berada pada kondisi rentan terkena dampak, bukan berarti kontribusi untuk menjaga eksistensi kehidupan tidak mampu dilakukan oleh perempuan.

Apabila ditinjau dari perspektif Creative Problem Solving (CPS), tawaran gagasan yang menjadi konsep kontribusi perempuan akan mudah ditemukan dengan berangkat dari akar permasalahan perubahan iklim yang paling mendasar, yakni permasalahan Gas Rumah Kaca (GKC). Langkah awal yang mesti dilakukan adalah membentuk komunitas perempuan peduli lingkungan yang berorientasi pada aktivitas sosialisasikan gaya hidup peduli lingkungan yang dimulai dari hal kecil seperti: efisiensi energi, gerakan gemar berjalan, pengurangan penggunaan plastik dan sampah organik. Dengan demikian berdirinya sebuah komunitas peduli lingkungan merupakan keharusan sebagai langkah awal dengan pertimbangan sosialisasi akan lebih berpeluang besar dan menjangkau lebih banyak orang sehingga efeknya pun jauh lebih cepat.

Langkah selanjutnya adalah memulihkan ekosistem dengan mengembalikan fungsi alam dengan gerakan penyelamatan alam, penanaman, eksplorasi jenis tumbuhan dan introduksi satwa liar. Dengan optimalnya fungsi alam maka kemampuan mengatur iklim, produksi air bersih, penyerbukan tanaman dan pengendalian hama penyakit akan mudah dilakukan karena secara alamiah alam memiliki kemampuan tersebut, yang perlu dilakukan adalah kembali membantu alam agar mampu memaksimalkan kembali kemampuannya. Selain itu, penanaman kesadaran gender dalam pemanfaatan energi terbarukan perlu ditumbuhkan diikuti dengan penyuluhan kegiatan hemat energi yang bisa dimulai dari ranah keluarga. Perempuan yang umumnya merupakan seorang ibu memiliki peluang untuk mensosialisasikan kegiatan

hemat energi di dalam keluarganya. Dengan demikian, setidaknya ancaman lenyapnya sumber energi mampu diminimalisasi dengan mengubah gaya hidup menuju perilaku peduli lingkungan.

Kesimpulannya, perubahan iklim merupakan fenomena yang mengancam eksistensi kehidupan makhluk hidup. Tumbuhan dan hewan yang tidak mampu beradaptasi serta komunitas manusia yang lemah sangat rentan menjadi sasaran utama dampak perubahan iklim. Perempuan sebagai komunitas yang rentan terhadap dampak tersebut bukan berarti tidak mempunyai peluang untuk berkontribusi menjaga eksistensi kehidupan. Hal yang dapat diusahakan dapat dilakukan dengan tiga cara seperti: pembentukan komunitas perempuan peduli lingkungan, pengembalian fungsi alam, serta penanaman kesadaran terkait energi terbarukan di samping penyuluhan gaya hidup yang hemat energi selain itu, krisis iklim telah dipecahkan, fakta dan solusinya telah diketahui maka yang perlu dilakukan adalah bangun dan berubah. Dengan demikian, perempuan turut andil secara khusus dalam penyelamatan terhadap dirinya sebagai kaum yang paling rentan, dan secara umum menyelamatkan eksistensi kehidupan di planet ini.

## Manifestasi Perempuan dalam Memerangi Antroposentrisme

Oleh: Hikmawaty Sabar

Bumi terlihat samar tidak lagi hijau. Paru-paru dunia perlahan menyisakan kabut sesak. Semilir angin dipenuhi udara kotor berpadu polusi. Lautan dan tepi sungai mulai keruh berbaur dengan limbah. Gunung tinggi hingga tanah terus menyusut bersama derasnya banjir. Lalu, ironi apalagi yang terjadi?. Tidak terhitung. Manusia menjamah alam ibarat mesin yang terus bekerja. Padahal, manusia tahu bahwa saatnya harus berhenti.

### *Manusia Vs Alam*

Manusia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari alam. Manusia dan alam adalah kesatuan dalam ekosistem kehidupan. Keterkaitan satu sama lainnya ibarat penanda bahwa keduanya merupakan satu sistem yang saling mempengaruhi. Hubungan timbal balik tersebut turut melahirkan berbagai perubahan yang terjadi antara manusia dan lingkungan.

Persoalan lingkungan merupakan salah satu persoalan dunia yang mengemuka pada seperempat abad terakhir, termasuk di Indonesia, sehingga isu lingkungan menjadi sangat menarik untuk dikaji dan didiskusikan lebih mendalam (Bram, 2014). Berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini sebagian besar bersumber dari perilaku manusia (Keraf, 2006). Kita tidak lagi membayangkan jika banjir yang datang menerjang dan meluluhlantakkan rumah adalah bagian dari skenario alam semata tanpa campur tangan kita. Namun, boleh jadi semata akibat kita yang tidak lagi pandai merawat dan senang merusak.

Barry (2007) menyebut salah satu hubungan antara penurunan kualitas lingkungan hidup dan manusia (sosial) yaitu sebagian besar penurunan kualitas lingkungan hidup merupakan hasil dari tindakan atau perilaku manusia. Menurut Naes, krisis lingkungan dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan tindakan manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal. Menemukan solusi terkait masalah lingkungan, salah satu prasyarat adalah menciptakan perubahan perilaku orang (Tuncay et al., 2011).

Lantas, jika selama ini masalah lingkungan hanya berputar soal apa saja yang telah dilakukan manusia hingga alam menjadi murka, maka sudah saatnya kita me-restart kembali dasar di balik pikiran itu. Kita perlu mendaur kembali satu hal yang sering dilupakan, yaitu paradigma atau cara pandang. Kita boleh saja menyepelekan paradigma. Menganggapnya tak penting. Tapi tahukah bahwa paradigma yang keliru soal



alam dan manusia adalah awal eksploitasi kita yang tidak berkesudahan. Kita merasa bahwa alam sifatnya adalah objek, tidak lagi subjek. Pandangan kita yang seolah sepele itu terus mendominasi dan menciptakan kemapanan hingga terus bertahan sampai saat ini. Maka, tidak keliru pula jika kita menyebut bahwa saat ini bumi sedang diperah tanpa perasaan.

### *Watak Antroposentrisme*

Kesalahan fundamental-filosofis dalam pemahaman atau cara pandang manusia mengenai dirinya, alam, dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem, pada gilirannya akan melahirkan tindakan yang juga keliru terhadap alam. Watak antroposentrisme memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta, dan hanya manusia yang mempunyai nilai (Keraf, 2006). Orientasi kepada alam tidak diletakkan sebagai tujuan tindakan sosial, melainkan sebatas alat bagi kepentingan manusia (Susilo, 2014).

Marx berpandangan bahwa hubungan manusia terhadap alam dimediasi tidak hanya lewat produksi, tapi secara langsung lewat peralatan-peralatan-yang merupakan hasil transformasi manusia atas alam lewat produksi-memungkinkan manusia mentransformasi alam secara universal. Alam bermakna praktis bagi manusia sebagai hasil aktivitas-aktivitas kehidupan dan produksi alat-alat kehidupan. Bagi Marx, dominasi atas bumi bermakna kompleks, dialektis, dan berasal dari konsep keterasingan. Hal tersebut bermakna, pertama, dominasi bumi oleh manusia yang memonopoli tanah; kedua, dominasi bumi dan benda mati atas sebagian besar manusia (Foster, 2013).

Burchett (2016) dalam disertasi penelitiannya berjudul *Antroposentrism as Environmental Ethic* menyebut bahwa sejak dulu, hubungan lingkungan dengan non-manusia telah menjadi topik utama yang mendasari kerusakan lingkungan. Non manusia (non antroposentris) tidak menjadi bagian dalam wacana lingkungan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa alam yang merupakan non antroposentris, bukanlah bagian dari lingkungan. Kortenkamp dan Moore (2000), *Anthropocentrism* menganggap manusia sebagai yang paling penting dalam kehidupan, dan bentuk kehidupan lain menjadi penting hanya sejauh bahwa mereka yang dapat berguna untuk manusia.

Kondisi demikian senanda dengan apa yang disampaikan oleh Candraningrum (2022), pada salah satu kegiatan bertajuk Sekolah Perempuan dan Ekologi. Dalam rilis materinya, Ia menjelaskan bahwa sebelumnya dan masih hidup secara permanen dalam pandangan dunia masyarakat modern bahwa binatang dan alam adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan instrumentalisasi perikehidupan manusia. Perikehidupan selalu dikaitkan dengan kemanusiaan. Perikehidupan manusia memutus dirinya pada kebutuhan-kebutuhan dirinya, sandang-pangannya, tanah-rumahnya, dan segala kenyamanan-kenyamanan yang didapat dari alam dan binatang. Binatang adalah piara, alam adalah instrumen sumber daya untuk eksploitasi tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya, tanpa mempertimbangkan sirkularitas ekosistem, ketergantungan antara alam, manusia dan binatang. Manusia meletakkan identitas dirinya secara superior di atas kedua elemen tersebut.

Watak antroposentrisme ibarat tembok yang menjadi tameng keberlangsungan manusia dalam mempertahankan sikap dan tindakan yang hanya akan merugikan lingkungan semata. Eksploitasi tanpa henti menjadi dampak serius betapa antroposentrisme adalah ancaman nyata eksistensi masa depan bumi. Kita sepatutnya tidak lagi mengandalkan sisi egois sebagai satu-satunya makhluk hidup. Bagaimana bisa eksistensi itu terus bertahan saat panggung yang menjadi tempat kaki manusia berpijak perlahan retak dan justru akan menyeret tubuh dalam kubangan lumpur?. Apa guna meramu warna sedemikian hebat jika kelak hanya mendatangkan kelam?. Antroposentrisme adalah dalang atas liarnya perilaku dan tindakan manusia yang tidak terkendali atas perubahan lingkungan.

## Manifestasi Perempuan

Buku berjudul Gerakan Perempuan Peduli Lingkungan Hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup (2003) menyebut bahwa kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh ketidakpedulian terhadap pelestarian lingkungan. Hal tersebut semakin diperparah oleh ketimpangan pola hubungan antara perempuan dan laki-laki. Masih banyak perempuan yang dikesampingkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Pada masyarakat tradisional di pedalaman misalnya, perempuan merupakan pengelola dan sumber pengetahuan akan potensi keanekaragaman hayati sebagai bahan makanan sehari-hari maupun yang berguna sebagai ramuan obat. Dengan kondisi tersebut, sejatinya perempuan memiliki keterlibatan dalam segala hal yang menyangkut pengelolaan lingkungannya.

Lebih lanjut, dijelaskan pula bahwa kebijakan lingkungan hidup di Indonesia tidak membedakan peran perempuan dan laki-laki. Namun, kenyataannya tidaklah seperti itu. Sering kali tidak ada akses dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terhadap pembangunan di sekelilingnya. Sehingga, kaum perempuan tidak terwakili kebutuhannya dan tidak memiliki kontrol terhadap perkembangan pembangunan.

Jika demikian yang terjadi, lalu bagaimana bisa keseimbangan atau keadilan itu hadir saat perempuan tidak mendapatkan akses setara dengan apa yang diperoleh laki-laki?. Bukankah masalah lingkungan hingga penyelesaiannya kelak tidak lagi akan berdebat soal jenis kelamin mana yang lebih berhak berkontribusi dan memberi solusi?. Siapa saja berhak terlibat. Tidak ada lagi eliminasi gender. Perempuan dengan segala kapasitas yang ada dalam dirinya justru bisa jadi solusi di tengah kerusakan lingkungan yang semakin merajalela.

Keterlibatan perempuan dalam lingkungan atau ekologi kini semakin masif disuarakan. Gerakan tersebut dikenal dengan istilah ekofeminisme. Konsep ini menegaskan posisi perempuan dan lingkungan yang tidak lagi dilihat sebagai properti, melainkan memiliki andil yang sama dalam proses keberlangsungan lingkungan hidup (PSLH UGM, 2022).

Meski demikian, keberadaan perempuan terkadang masih kurang mendapat perhatian. Kerap kali putusan atas kebijakan malah menjadikan perempuan sebagai pihak yang paling terdampak dari kerusakan lingkungan yang terjadi. Padahal, posisi strategis perempuan bisa dimaksimalkan melalui efektivitas kegiatan produksi yang secara langsung bersinggungan dengan alam.

Melibatkan perempuan secara efektif melalui keikutsertaannya dalam setiap pengambilan kebijakan terkait lingkungan, dapat dimulai dengan merekonstruksi paradigmanya tentang alam. Mematikan munculnya antroposentrisme adalah dasar membangun kesadaran dalam pengelolaan lingkungan. Melihat alam adalah kesatuan dan bukan lagi objek semata. Dengan dukungan gerakan ekofeminisme, seruan untuk berperan aktif dalam setiap pemeliharaan alam adalah wujud bagaimana perempuan juga mampu berkontribusi dengan andal.

Metamorfosa paradigma kaum perempuan dapat dimulai dengan terlebih dahulu menyadari posisinya sebagai manusia yang juga terikat dengan alam. Kesadaran itu akan membentuk pemahaman bahwasanya posisi alam sama pentingnya dengan manusia sebagai satu kesatuan. Sehingga, tidak ada lagi watak antroposentrisme yang hanya memandang segala kebutuhan manusia di atas keberlangsungan lingkungan hidup. Bagian ini menjadi poin krusial sebab ketiadaan antroposentrisme, secara perlahan diharapkan mampu merevolusi paradigma manusia tentang pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dengan tidak melakukan eksploitasi dan kapitalisasi alam secara serampangan. Dan, atas langkah-langkah tersebut, perkembangan partisipasi perempuan dalam segala kebijakan lingkungan pun secara selaras dapat tumbuh dan hidup berdampingan.



Manifestasi ini bukan saja rintisan jangka pendek dalam menyikapi kompleksitas permasalahan lingkungan. Ini bisa saja disebut sebagai ikhtiar dalam upaya secara perlahan memerangi tumbuh dan mewabahnya watak antroposentrisme yang dimulai dari gerakan perempuan. Kita perempuan tidak lagi sibuk hanya sekadar meramu sajian di dapur. Tidak juga mahir berkutat dalam karir semata. Apalagi candu dengan euforia menjaga eksistensi ala-ala media sosial. Lebih dari itu, kita bisa mengupayakan segala gerakan untuk membangun asosiasi dengan siapa pun dalam rangka upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Perempuan bisa. Pasti bisa!

## Referensi

- Barry, J. 2007. *Environment and Social Theory*. London: Routledge.
- Bram, Deni. 2014. *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan*. Malang: Setara Press.
- Burchett, L. K. 2016. *Antropocentrism as Environmental Ethic*. Dissertations Philosophy, University of Kentucky.
- Candraningrum, Dewi. 2022. *Ekofeminisme: Filsafat, Ideologi Gerakan, dan Narasi Perempuan*. Pada Sekolah Perempuan dan Ekologi WALHI Sulawesi Selatan.
- Foster, B.J. 2013. *Ekologi Marx Materialisme dan Alam (Edisi Terjemahan)*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2003. *Gerakan Perempuan Peduli Lingkungan Hidup*. Jakarta.
- Keraf, Sony. 2006. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kortenkamp, K.V and Moore, Collen. 2000. *Ecocentrism and Anthropocentrism: Moral Reasoning about Ecological Commons Dilemmas*. *Journal of Environmental Psychology*, 6(06): 02.
- Susilo, R.K. (ed.) 2014. *Sosiologi Lingkungan*. Rajawali Press : Jakarta.
- Tuncay, Busra., Tuzun, O.Y., and Teksoz, G.T. 2011. *The Relationship Between Environmental Moral Reasoning and Environmental Attitudes of Pre-Service Science Teachers*. *International Electronic Journal of Environmental Education*, 1(3): 168.
- Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Gajah Mada. 2022. *Perempuan dan Pelestarian Lingkungan*.

# Pentingnya Peran Generasi Muda dan Kaum Perempuan Dalam Kepedulian Terhadap Lingkungan

Oleh: Aini Syahrunnisa

## Pendahuluan

Perubahan struktural dalam kehidupan sebagian besar wanita. Gerakan feminis berhasil membentuk karakter sosial situasi perempuan dan memperoleh identitas gender perempuan. Meskipun banyak perubahan dan kesetaraan, penindasan, diskriminasi dan subordinasi perempuan tetap banyak gagasan dan isu gerakan yang begitu diterima oleh mayoritas masyarakat sehingga kelas penguasa di negara-negara kapitalis meyakini perempuan bahwa mereka berada di era "pasca-feminis" dan bahwa pembebasan perempuan tidak lagi diperlukan karena kesetaraan telah tercapai. Namun, kenyataannya berbeda, dan perempuan di negara-negara kapitalis maju terus tertindas, terutama selama krisis ekonomi dan sosial kapitalis.

Di negara-negara kapitalis maju di mana gerakan pertama kali muncul, tahun 1970-an adalah masa ketika berbagai arus gerakan bersatu untuk menuntut hak-hak perempuan dalam aksi massa di serikat buruh dan koalisi gerakan progresif lainnya dalam skala nasional dan internasional, misalnya sebagai abortus. Keberhasilan yang diraih justru memperlambat aktivitas. Selama periode yang sama, gerakan ini dipengaruhi oleh kepemimpinan tradisional dari gerakan kelas pekerja, yang berbelok ke kanan melalui program penghematan yang diprakarsai oleh kaum borjuis. Serikat pekerja menganut rencana penghematan, yang melemahkan perjuangan buruh dan gerakan sosial lainnya Fragmentasi organisasi negara-negara dunia yang muncul pada awal 1980-an menunjukkan penurunan tajam dalam gerakan feminis. Hal ini disebabkan oleh:

1. Banyak aktivis membangun karir mereka di instansi pemerintah dan/atau kegiatan pelayanan sosial

2. Struktur serikat dan manajemen perusahaan mulai diserahkan kepada perempuan
3. Banyak feminis beralih ke masalah sosial seperti perdamaian dan lingkungan

Selanjutnya, peran delegasi generasi muda dalam menyuarakan aspirasi dan komitmen pada perhelatan akbar PRE-SUMMIT SUSTAINABLE AND LIVABLE PLANET yang tergabung dalam Y20 kemarin merupakan wujud kontribusi yang dapat dibuktikan secara nyata baik di bidang penelitian maupun sebagai aktivis penggerak salah satunya dalam bidang lingkungan yang berkelanjutan

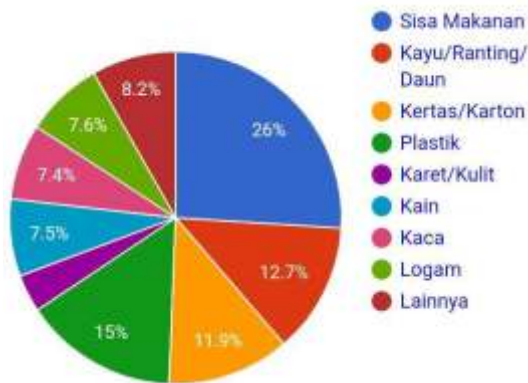
Pemuda adalah decision maker yang nantinya akan menerima tongkat estafet kepemimpinan dan suara pemudalah yang sangat patut dan layak dipertimbangkan mengingat generasi milenial berdasarkan populasi di Indonesia adalah penduduk mayoritas sebanyak 53%.

Perempuan memberikan banyak peran bagi kehidupan ekonomi dan lingkungan. Buktinya dari sisi lingkungan, perempuan ternyata lebih peduli terhadap dampak perubahan iklim bahkan berdasarkan data Women's Forum for the Economy & Society, POLITICO 2021 lebih banyak persentase dari kaum perempuan telah mengubah perilaku mereka untuk memerangi perubahan iklim dibandingkan laki-laki. Hal tersebut terjadi karena banyaknya kaum perempuan di negara-negara berkembang yang bekerja di sektor informal yang juga merupakan tulang punggung bagi pengelolaan sampah dan industri proses daur ulang.

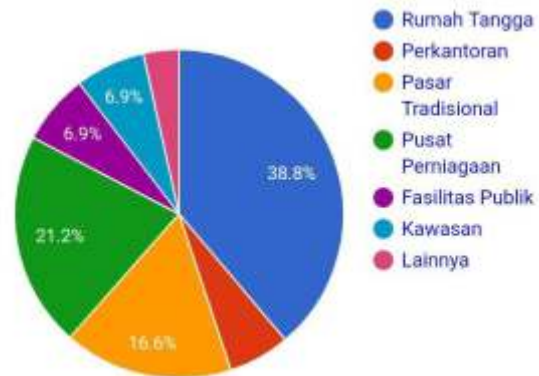
Perilaku tersebut contohnya melaksanakan daur ulang seperti mengumpulkan dan menyerahkan sampah plastik air minum dalam kemasan ke pengepul dan bank sampah untuk meningkatkan pendapatan mereka seperti yang dilakukan oleh kebanyakan kaum perempuan di daerah saya yang kebetulan tinggal di daerah sekitar TPA Antang. Kontribusi kecil di atas telah menunjukkan bahwa kaum perempuan telah mampu memainkan peran yang sejalan dengan tujuan global dalam perubahan iklim yaitu mitigasi dan adaptasi. Lalu pengaruh apa lagikah bagi kaum perempuan dan generasi muda dalam kepedulian mereka terhadap lingkungan?

**Isi**

Di Indonesia, grafik komposisi sampah pada tahun 2021 berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklasifikasikan komposisi sampah berdasarkan jenis sampah dan sumber sampah. Hal tersebut terlihat pada gambar grafik 1 dan 2 di bawah ini



Gambar 1. Grafik Komposisi Sampah Berdasarkan Jenisnya



Gambar 2. Grafik Komposisi Sampah Berdasarkan Sumbernya



Sampah sebagai salah satu penyebab perubahan iklim. Persentase komposisi sampah di Indonesia didominasi oleh sampah hasil sisa makanan yang berasal dari rumah tangga. Saya yakin hal tersebut mungkin juga terjadi di negara maju bahkan di negara berkembang lainnya. Namun, tidak semua negara-negara tersebut sukses dalam mengelola sampahnya. Alih-alih menjadi pendulang rupiah, sampah di beberapa negara masih menjadi masalah. Oleh karena itu, perlunya pengelolaan sampah rumah tangga yang baik dengan melakukan berbagai sosialisasi dan pendekatan.

Saya adalah seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan pada Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Universitas Hasanuddin. Selain belajar sebagai kewajiban, saya juga kerap mengisi bincang bersama dalam pengelolaan sampah khususnya di daerah saya. Perbincangan tersebut telah dibuat grup saat ini beranggotakan 55 orang yang didominasi oleh kaum perempuan yakni para ibu yang ingin belajar tentang cara mengolah sampah rumah tangga mereka menjadi pupuk kompos sehingga tidak menyulitkan mereka untuk membayar biaya retribusi sampah per bulannya.

Inisiatif tersebut awalnya saya lakukan ketika saya melihat ada beberapa pedagang di pasar bahkan pedagang sayur yang hampir tiap harinya berkumpul di depan rumah saya sedang asyik bercerita sambil membuang sisa sayurannya di samping rumah saya yang kebetulan rumah saya itu berdampingan dengan rawa-rawa. Berdasarkan masalah tersebut, saya juga telah menyiapkan beberapa tempat sampah aerobik yang dibuat sendiri dari tempat bekas cat tembok untuk memfasilitasi mereka agar tidak membuang sampah di rawa samping rumah saya lagi. Walaupun bagi saya aksi ini masih sangat kecil dampaknya. Namun, saya yakin jika banyak yang melakukan hal seperti ini, maka akan banyak sampah yang dapat terkendali dan terkelola dengan baik sehingga kedepannya terbebaslah kita dari masalah persampahan di Indonesia bahkan dunia.

### *Penutup*

Perempuan merupakan agen perubahan yang berpengaruh besar terhadap kualitas lingkungan. Masih ada banyak hal lagi yang dapat dilakukan kaum perempuan sebagai wujud kepedulian mereka terhadap lingkungan seperti : memaksimalkan penggunaan kosmetik agar tidak terbuang sia-sia, membuat deterjen yang lebih ramah lingkungan berbahan dasar garam seperti penelitian yang telah saya lakukan bersama kawan saya di daerah kabupaten Jeneponto sebagai daerah penghasil garam, perempuan dapat melakukan perannya di rumah untuk mengendalikan produksi sampah sisa makanan dengan mengompos, perempuan sebagai ibu rumah tangga merupakan seseorang yang aktif melakukan penanaman sehingga seorang ibu bisa menanamkan kepedulian terhadap lingkungan kepada keluarga dan anak-anaknya, serta perempuan dapat mendirikan suatu komunitas dan mengajak kaum perempuan lebih banyak lagi agar lebih peduli terhadap lingkungan dengan cara menyebarkan tulisan melalui media agar informasinya tersebar luas dan dapat dijangkau masyarakat secara global karena saya yakin dan percaya bahwa lebih baik menyalakan lilin daripada menjanjikan sejuta bola lampu.

## Peran Perempuan Berdaya Untuk Pelestarian Lingkungan Yang Berkelanjutan

Oleh: Musnika Muharani Albantani

Sejak sebelum kemerdekaan sampai dengan masa kebebasan berpendapat dan berekspresi, pandangan terhadap keberadaan perempuan masih lekat dengan ketertinggalan. Katanya, perempuan adalah rahim peradaban, sosok yang kelak akan melakukan perubahan. Menghantarkan negara ini pada masa kemajuan dengan berbagai inovasi terbaru. Nyatanya, kerap suara perempuan diredam, keberadaannya diacuhkan, bahkan tak jarang haknya pun tidak diberikan.

Muncul sebuah pemahaman yang menuntut kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, disebut

dengan feminisme (Ilaa, 2021). Kehadiran pemahaman ini menimbulkan beberapa perbedaan pendapat. Sebagian pihak menafsirkan kesetaraan yang dimaksud adalah kesamaan derajat untuk diakui dan dihormati. Sementara, sebagiannya lagi menafsirkan kesetaraan sama dengan kesamaan dalam mendapatkan hak hidup yang didapatkan seperti laki-laki. Dalam hal ini, saya sepakat bahwa perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk diakui keberadaannya, bebas berpendapat dan berekspresi selama tidak bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara.

### *Paradigma Ekofeminisme*

Berkaitan dengan isu lingkungan ialah adanya paham ekofeminisme yang berasal dari kata ekologi berarti lingkungan dan feminisme (Supriatna, 2019). Dalam pemahaman ini dijelaskan peran perempuan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Lingkungan adalah tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup dan perempuan dalam kehidupan adalah makhluk yang sejatinya mengayomi dan melindungi dengan penuh cinta kasih. Dengan ini, lingkungan dan perempuan seharusnya memiliki relasi yang kuat karena hampir seluruh keseharian perempuan berkaitan dengan lingkungan (Saleh, 2014).

Pada salah satu pertemuan Sekolah Perempuan dan Ekologi, bertajuk Ekologi Feminisme : Gerakan Perempuan Mewujudkan Keadilan Lingkungan dan Sosial, yang dibawakan oleh Dewi Candraningrum, menekankan pentingnya manusia menjalin relasi dengan alam. Manusia harus menyadari bahwa alam telah banyak memberi manfaat untuk hidup manusia. Sehingga penting manusia menjaga kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, Ia menitikberatkan pada peran perempuan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan tanggap terhadap isu perihal lingkungan. Meskipun perempuan kerap dikatakan sebagai penghasil limbah terbanyak karena menggunakan pembalut plastik atau alat kecantikan lainnya (Wolok, 2019). Ternyata perempuan juga memiliki solusi untuk mengatasi hal tersebut dan lebih ramah pada lingkungan. Sudah banyak pemberitaan dan aksi nyata perempuan dalam memilah dan mengolah sampah. Melalui kegiatan di rumah ataupun kelompok ibu-ibu yang memiliki tujuan sama untuk mengurangi limbah rumah tangga. Salah satunya yang dilakukan oleh Ibu saya sendiri.

Gerakan kecil ibu saya dilakukan dengan mengolah limbah makanan menjadi kompos organik dan memanfaatkan sepetak halaman rumah menjadi lahan pembuatan kompos untuk tanaman di rumah pula. Sampah-sampah anorganik yang berada dirumah, seperti pembungkus sabun, minyak, dan lain sebagainya dipilah untuk kemudian diantarkan ke bank sampah. Sebagian sampah yang dapat dimanfaatkan seperti plastik minyak, kerap beliau jadikan sebagai pot tanaman pengganti polybag. Hal tersebut hanyalah contoh yang sangat sederhana. Banyak lagi kisah peran perempuan di sekitar rumah maupun dalam skala besar yang berpengaruh pada kelestarian lingkungan. Namun, semua itu hanya bisa dilakukan oleh perempuan yang berdaya. Perempuan yang memiliki pemahaman, kemampuan dan kemauan untuk bangkit dari stigma keterbelakangan dan zona nyaman yang diberikan oleh keluarganya.

### *Perempuan Berdaya*

Penting diketahui berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa perempuan berdaya adalah dia yang bisa mengidentifikasi potensi diri, mengaktualisasikan, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. "Jika perempuan berdaya, keluarga menjadi bahagia, dan negara pasti akan menjadi kuat, karena keluarga adalah entitas terkecil sebuah masyarakat". Menjadi berdaya tidak harus setelah mendapat gelar sarjana. Sebab pendidikan, bukan tentang lamanya waktu belajar yang ditempuh atau tingginya gelar yang diraih. Namun tentang, perempuan yang memiliki kepekaan serta keinginan untuk memberikan uluran tangannya pada yang membutuhkan. Hadirnya pemimpin-pemimpin perempuan seperti Alexandria Ocasio-Cortez (Green New Deal), Greta Thunberg (Climate Strike), Sukinah (Kendeng Lestari), Alessandra Munduruku (tokoh masyarakat adat di Amazon), Vandana Shiva (tokoh agroekologi di India), dan lainnya adalah contoh peran perempuan dalam pelestarian lingkungan yang mendunia (Magdalene, 2022).



Cara berfikir dan pandai melihat peluang adalah hal yang seharusnya terus dikembangkan oleh seorang perempuan sesuai dengan kemajuan zaman. Tidak berhenti pada sebatas mencari pengakuan, namun patut terus memperjuangkan hak-haknya didengarkan. Dalam ekofeminisme nyata dijelaskan bahwa banyak sekali yang dapat perempuan lakukan. Bahkan sejak dahulu hingga sekarang, perempuan menjadi garda terdepan yang paling mengetahui dan apik menjaga keutuhan lingkungan dengan naluri keibuan (Qamar, 2014).

Berbicara tentang kekayaan ekologi Indonesia tentu tidak akan ada habisnya, namun pasti akan habis sumber daya alamnya jika tidak dilestarikan secara berkelanjutan. Kemerdekaan yang kini dimiliki kerap dikatakan entah milik siapa, karena sejatinya undang-undang yang mengatakan bahwa seluruh kekayaan alam akan diolah dan dilindungi oleh negara untuk kesejahteraan rakyat (Pasal 33 ayat 3, UUD RI 1945), tampaknya hanya mensejahterakan beberapa pihak. Salah satu kasus di Nusa Tenggara Timur yaitu sekelompok warga menolak adanya tambang marmer karena merusak alam. Gerakan tersebut dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Mama Aleta. Beliau melakukan perlawanan dengan membentuk gerakan menenun yang juga merupakan keseharian para perempuan adat Mollo di Nusa Tenggara Timur. Dari menenun itu mereka memahami figur-figur satwa yang menjadi pusat cerita dalam motif tenun mereka. Mereka pun berhasil menghentikan aktivitas tambang dengan melancarkan protes melalui gerakan tersebut (Ulfah, 2016).

Contoh nyata peran perempuan lainnya adalah kasus yang terjadi di Jawa Timur. Kebijakan akan diberdirikannya pabrik semen di daerah Kendeng, disambut demonstrasi para perempuan. Mereka menunjukkan bahwa stigma keterbelakangan telah menjadi penguat bagi mereka untuk mengambil peran sebagai agen perubahan. Bahwa dapur tidak melulu menjadi hal yang menyibukkannya. Namun, dapur rumah tangga adalah kewajiban yang harus ditunaikan sebagai seorang ibu. Sementara bergerak untuk negeri adalah panggilan hati yang harus ditepati serta kewajibannya sebagai warga Negara.

Perempuan dapat melakukan perubahan dari hal terkecil dirumah. Memilah sampah, mengolahnya dan menjadikannya sebagai sesuatu yang bernilai ekonomis (Administrator, 2021). Sampai pada hal besar, perempuan dapat berperan penting bagi kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan bahwa perempuan adalah rahim peradaban menjadi benar adanya apabila dilihat dari perspektif bahwa perempuan berdaya untuk dirinya sendiri, keluarga dan negara.

## Referensi

- Annisa Innal Fitri, I. A. (2017). Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme Di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 83-102.
- Aquarini Priyatna, M. S. (2017). Ekofeminisme dan Gerakan Perempuan di Bandung. *Patanjala*, 439 - 454.
- Astuti, T. M. (2012). Ekofeminisme dan Peran Perempuan dalam Lingkungan. *Indonesia Journal and Conversation*, 49-60.
- Fahimah, S. (2017). Ekofeminisme: Teori dan Gerakan. *Alamtara*, 6-19.
- Ika Wijayanti, N. K. (2019). Gerakan Ekofeminisme Dalam Pemberdayaan Perempuan Pengolah Limbah (Studi Kasus Komunitas Pengolah Limbah di Desa Narmada). *Resiprokal*, 40-52.
- Jasruddin, R. A. (2015). Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 87-95.
- Suliantoro, B. W. (2011). Rekonstruksi Pemikiran Etika Lingkungan Ekofeminisme Sebagai Pondasi Pengelolaan Hutan Lestari. *Jurnal Bumi Lestari*, 111-119.

# Peminggiran Suara Serta Peran Perempuan dan Kaum Marjinal Dalam Relasi Kuasa

Oleh: Nunky Aulya Syakiroh

Lingkungan atau alam dimana kita hidup seharusnya menjadi rumah untuk seluruh makhluk hidup. Mengingat diantara makhluk hidup bukan hanya manusia saja, maka tidak ada pengecualian manusia atau bukan manusia diantara keduanya. Keberlanjutan ekosistem dan kehidupan manusia juga ditentukan oleh keduanya. Namun sayangnya, dewasa ini kondisi lingkungan terbilang memprihatinkan. Deforestasi

yang semakin masif, kenaikan permukaan air laut yang menyebabkan banjir rob di berbagai daerah, pencemaran air tanah, pencemaran air laut karena sampah, penurunan kualitas udara dan lain sebagainya.

Permasalahan tersebut nampak di berbagai daerah di Indonesia, seperti halnya di Indramayu dengan adanya PLTU Indramayu I petani mengalami kerugian panen di musim kemarau dikarenakan perubahan cuaca ekstrim akibat dari polutan PLTU batubara seperti PM<sub>2,5</sub>, PM<sub>10</sub>, Nox, SO<sub>2</sub> serta debu yang menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca (Mongabay.co.id,2019). Banjir juga terjadi di Kalimantan Tengah akibat dari deforestasi dengan luas mencapai 1,9 juta hektar dalam rentan waktu 19 tahun. Deforestasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, namun indikasi terbesar adalah alih fungsi tutupan lahan perhutanan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, tambang dan hutan tanaman industri (Betahita.id,2019). Dalam ekspedisi yang bertajuk Ekspedisi 3 Sungai, watchdoc juga memperlihatkan betapa tercemarnya kondisi 3 sungai besar di pulau Jawa akibat dari pembuangan limbah pabrik sembarangan, pembuangan sampah warga langsung ke sungai, polutan sampah plastik yang sulit terurai yang menyebabkan kontaminasi mikroplastik pada ikan, dan beberapa faktor lainnya (Watchdoc, 2022).

Masyarakat sekitar kerap kali menjadi “tumbal” dari adanya pembangunan masif tersebut. Beberapa perlawanan dan penolakan dilayangkan warga demi menjamin keberlanjutan hidup mereka. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah perempuan Wadas atau Wadon Wadas. Mereka menggelar performance art dengan menganyam besek (tempat yang terbuat dari bambu) di halaman PTUN Semarang saat berlangsung gugatan warga Wadas kepada Gubernur Jawa Tengah. Mereka mengirim pesan bahwa dengan hancurnya alam Wadas karena penambangan batu andesit tersebut, maka hubungan perempuan dan alam akan hancur karena bambu semakin hilang (projectmultatuli.org, 2021). Selain Wadon Wadas, Ma Leta atau Aleta Baun juga berjuang melawan penambangan marmer yang terdapat di pegunungan Mojo. Perjuangan Ma Leta dan kawan-kawannya merupakan penolakan perusakan sumber mata air yang banyak tersimpan dalam pegunungan Mojo (Dewi Candraningrum,2013). Dalam perlawanannya, selain dengan menghadang menggunakan alat tenun mereka juga mengeluarkan payudara sebagai bentuk protes bahwa perempuan tidak bisa menyusui lagi (Jurnal Perempuan, 2013.)

Dalam analisis ekofeminisme Warren, peristiwa diatas terjadi bukan hanya sekedar kebijakan pemerintah melawan penolakan masyarakat semata, masalah tersebut terjadi karena adanya kesalahan paradigma terkait hubungan antara ruang hidup manusia dan alam dalam pengaruh patriarki. Karen melihat permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh pengaruh patriarki yang telah terjadi dapat menjadi penjelas bagi permasalahan yang menimpa perempuan, anak-anak, kaum marjinal lainnya serta alam ataupun sebaliknya (Karren J Warren, 2000). Budaya patriarki yang melekat pada institusi pemerintahan seperti dalam contoh kasus tersebut dengan jelas memperlihatkan pemikiran yang opresif terhadap kontrol kekuasaannya.

Karen menjelaskan setidaknya ada 3 ciri pemikiran opresif dalam kerangka pemikiran patriarki; pertama, pemikiran berdasarkan nilai hirarki. Artinya pemegang kuasa memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding yang mereka kuasai dalam hal ini rakyat dan sumber daya yang berada dalam wewenang kuasa; kedua, adanya dualisme nilai yang mendukung satu dari dua. Memosisikan diri sebagai eksklusif dan terpisah satu dengan lainnya. Dalam hal ini pemerintah menilai pengontrolan atas sumber daya alam yang ada menjadi wewenang mutlak tanpa harus melibatkan masyarakat; dan ketiga, memberikan kelangsungan adanya “logika dominasi”. Logika dominasi merupakan struktur argumentasi yang menjelaskan, membenarkan dan memelihara subordinasi pada grup inferior oleh grup superior. Logika dominasi memberikan persetujuan akhir pada “pembenaran” terhadap subordinasi yang mana memiliki nilai lebih rendah atau tidak bernilai (Karren J W, 1998).

Pertanyaan mengapa pemerintah memilih melakukan operasi terhadap masyarakat yang dijadikannya inferior dapat dianalisis dengan kerangka gunung es yang menunjukkan bahwa Upah material merupakan

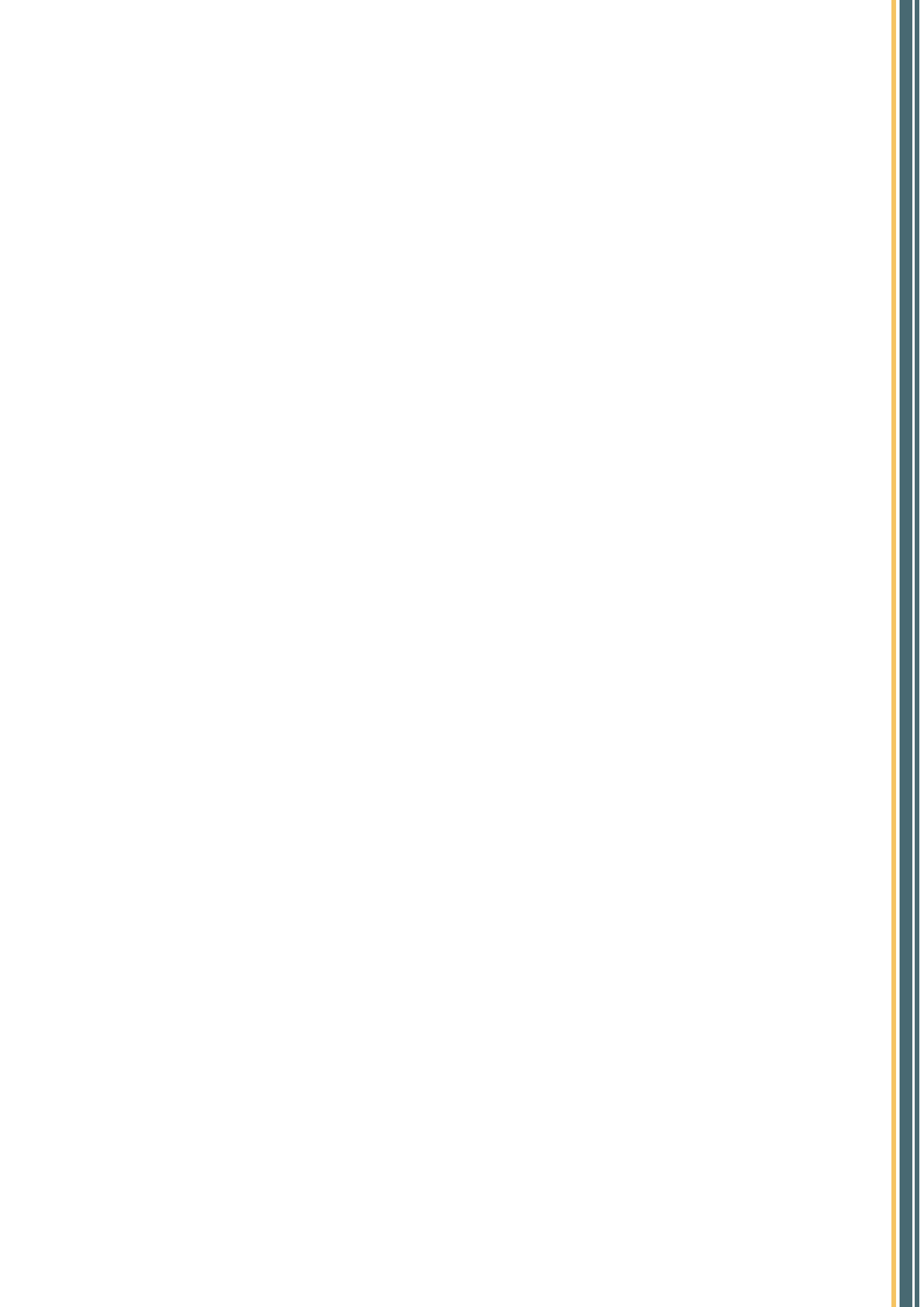


indikator utama dalam sistem ekonomi kapitalis. Perhitungan sistem ekonomi kapitalis menegaskan banyak faktor yang mengarah pada keberlanjutan. Persis seperti beberapa permasalahan di atas, pemerintah hendak mengontrol sumber daya guna menunjang bisnis yang anak memutar roda perekonomian berbasis kapitalis dengan indikasi material atau uang yang terus tumbuh. Sedangkan, faktor-faktor seperti perempuan pekerja rumah tangga, pekerja anak, petani yang menjalankan sistem pertanian berkelanjutan dan alam tidak dianggap dalam perhitungan (Maria Mies dan Veronika, 2000). Faktor-faktor tersebut tidak memiliki nilai nominal dalam nilai konkret. Dengan kata lain, kebijakan yang dilakukan pemerintah gagal melihat sisi keberlanjutan yang usung dan disuarakan oleh masyarakat yang terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut.

Dalam renungan Saras Dewi terkait ketidak seimbangan antara permasalahan manusia dan alam atau ia menyebutnya dengan Disekuilibrium, Saras Dewi merujuk salah satunya pada fenomenologi Merleau-Ponty yang menyatakan bahwa jiwa dan tubuh bukanlah dua kategori yang berbeda seperti nilai hirarki opresi diatas. Jiwa dengan tubuhnya bekerja layaknya jaringan kompleks bagi subjek. Hal ini memungkinkan pemikiran ulang bagaimana subjek terhubung dengan dunianya. Tegasnya, manusia tidak dapat dipisahkan dari alamnya. Alam adalah bagian dari moda mengada subjek -dengan tidak bermaksud meringkas penjelasan Saras Dewi (Saras Dewi, 2015). Penelidikan kembali pemaknaan tubuh dan jiwa nampaknya menjadi suatu yang sangat susah untuk dilakukan dewasa ini mengingat kecepatan waktu menyeret manusia dalam lingkaran kemajuan semu.

Tetapi hal ini justru dilakukan oleh warga Kendeng di Pati, masyarakat adat Laman Kinipan di Kalimantan Tengah dan lain sebagainya. Mereka berusaha mempertahankan eksistensi alam tempat mereka hidup dengan menolak kebijakan pemerintah yang merusak alam. Karena alam bagi mereka bukan saja sumber memperoleh makanan ataupun penghasilan, tetapi menjaga keberlangsungan alam atau hutan adat juga berarti menjaga tempat roh nenek moyang mereka bersemayam. Terdapat penghormatan agung atas kepercayaan hutan sebagai tempat yang suci. Selain itu, alam atau hutan bagi mereka adalah sumber pengobatan yang utama. Terdapat ilmu luhur terkait pengetahuan meramu obat langsung dari pohon hidup hutan (Dewi Candraningrung, 2022).

Maka peminggiran perempuan dan kaum marjinal serta kerusakan alam yang terjadi, bukan semata konflik horizontal antara pemerintah dan masyarakat. Lebih jauh, kebijakan yang diterapkan pemerintah merupakan paradigma patriarki kapitalis dengan melanggengkan sistem operasi yang dilakukan dengan mendominasi sektor sumber daya alam. Meminjam bagian akhir dari buku Saras Dewi, menyerahkan otoritas pada negara semata-mata – sebagaimana ide totalitarianisme-lingkungan – sebagai pemeran tunggal agar alam dapat terawat, merupakan wujud kepatuhan palsu yang tidak sungguh-sungguh membahas kesadaran manusia ataupun keikutsertaan bebas manusia dalam mengupayakan adanya keseimbangan antara alam yang lestari dan fenomena alam perlawanannya (Saras Dewi, 2015).



FAKTA  
EKOLOGI

*Edisi April 2026*